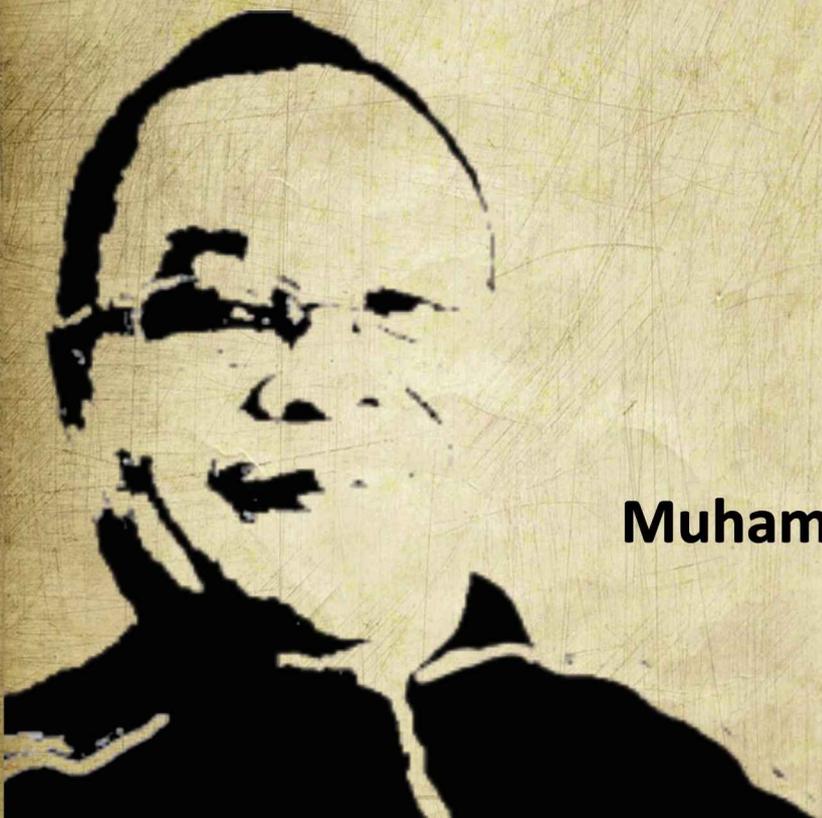


ESAI-ESAI

POLITIK REFORMASI

ESAI-ESAI POLITIK REFORMASI



Muhammad Idris Patarai

Muhammad Idris Patarai

Esai-Esai Politik Reformasi

© Muhammad Idris Patarai Cetakan Pertama, Oktober 2012

Desain Sampul/Lay Out,

Festa M.F. Goenawan - Friska Monita Goenawan

Diterbitkan oleh:

De La Macca

(Anggota IKAPI Sulsel No.007 /SSL/03)

Jln. Borong raya No. 75 A Lt. 2 Makassar 90222 Telp. 0411-2410294-0811468957

Email : gunmonoharto@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang- Undang.

Dilarang mengutip isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan Penerbit.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

159 + xii halaman.

ISBN : 978 979 3897 57 8

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DARI PENULIS	1
MUNDUR SALAHKAH, TUHAN ?	7
PEJABAT PUBLIK BERPIKIR PUBLIK.....	7
KEPALA DAERAH DAN PNS DARI DUA DUNIA BERBEDA	9
PERSPEKTIF KOTA DAN WALIKOTA.....	12
PESAN DARI YOKOHAMA UNTUK PARA CALON WALIKOTA	16
SIAPAPUN BISA MENJADI WALIKOTA.....	19
KOTA DUNIA DALAM PERSPEKTIF PERENCANAAN	23
Visi Kota Dunia 2014.....	24
Perspektif Pembangunan	24
Aspek ekonomi	27
Aspek Politik.....	27
Aspek Infrastruktur	27
Aspek Pariwisata.....	28
Era Perdagangan Bebas.....	28
ANALISIS SIMETRIS MUSRENBANG DENGAN APBD	29
DESENTRALISASI, STRUKTURAL ATAU CULTURAL	33
PERSPEKTIF DEMOKRASI DALAM OTONOMI DAERAH	36
MENGATASI KLEPTOKRASI	40
KITA DAN KPK	42
KONG X KONG = KONG KONG	46
CALON SEKKOT MAKASSAR, KENAPA BERSOAL ? (Sepenggal Pelajaran Pilkada)	50
DAERAH DAN NEGARA	54
Pembangunan Daerah	55
Capres Daerah.....	56
KAMPANYE HITAM DAN MOTIF DIBALIKNYA	58
GUBERNURNUR ATAU KEPALA DAERAH, SIAPA YANG PILIH.....	62
KEPEMIMPINAN ADAPTIVE TANTANGAN PILGUB SULSEL	68
UANG POLITIK ATAU POLITIK UANG	71
TNI DAN PERANG DI DPR.....	74
PRESIDEN LANGSUNG ATAU LANGSUNG PRESIDEN.....	79

GOLPUT DALAM ERA MULTI PARTAI	82
KONFLIK DAN PARTAI POLITIK.....	85
DARI GUSDUR KE MEGA, SEBUAH PENDIDIKAN POLITIK	90
SUATU MALAM DENGAN JUSUF KALLA	93
PERSPEKTIF DEMOKRASI DALAM OTONOMI DAERAH	96
DIPERLUKAN NASIONALISME PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU	100
MILITER,APAKAH SEBUAH DUNIA YANG BERBEDA.....	103
DAFTAR PUSTAKA	106
CURICULUM VITAE.....	110

Dari Penulis

Mundur, Salakah Tuhan ? adalah kumpulan artikel, baik yang telah maupun belum dipublikasi. Tulisan tulisan yang ada di dalamnya berkisar penomena politik, hukum, pemerintahan pasca reformasi. Buku ini bisa sangat rasional, juga bisa sangat emosional. Berceritera tentang pilihan mundur dari jabatan selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Makassar, akhir Pebruari 2012 berdasarkan pertimbangan rasional, namun akibat langsung dari mundur itu berdampak emosional, bathin saya terasa dirongrong untuk bisa menerima keadaan.

Rasa sepi menggelayut, setelah sebelumnya hampir tak ada waktu jedah, tiba tiba berhenti dan tidak ada alasan tergesah gesah ke luar rumah. Anak anak ikut bingung, keluarga termasuk isteri Saya, jika tidak kuat bisa *droup*. Tidak ada yang menyalahkan saya namun saya selalu mohon dimengerti. Seorang staf Saya, yang sudah bersama sejak 2005 (7 tahun), *Isty*. Sekali pernah nge-sms ke saya “ *Bagaimana keadaanta Pa’?*”, Saya jawab “ *Buruk. Jika selama ini saya punya ‘tintong’, jika saya tekan, maka serta merta berdiri gadis cantik didepan Saya. Sekarang saya tidak punya tintong itu lagi dan tidak ada lagi orang cantik..*”. Dia tertawa terbahak bahak di layar ponsel saya : “ *ha ha ha ha*”.

Saya sempat mengalami kejatuhan moril, namun saya segera menolong diri saya dan mencoba menemui teman teman lama saya. Bulan April 2012 saya mendapat rekomendasi bisa pindah berkarir di kantor provinsi, namun sekalipun segala daya telah saya lakukan untuk bisa dilepas dari pemerintah kota, tidak ada yang berhasil. “ *Walikota masih membutuhkan*”, demikian Kepala BKD, Kasim Wahab pernah menyampaikan. Istri dan anak saya pernah menemui Walikota. Saya sendiri dua kali menemui beliau untuk urusan pindah, tetapi tidak berhasil. Akhirnya saya diam.

Tentulah banyak resiko resiko yang saya hadapi, tidak mungkin saya beberkan seluruhnya (maaf). Alhamdulillah, sakitnya bisa saya telan. Bulan Oktober 2012 mestinya saya mengalami kenaikan pangkat dengan Golongan setara IV C, tetapi dalam posisi staf itu tidak memungkinkan. Tahun 2013 saya memasuki masa pensiun pada umur 56 tahun, sekalipun teman teman saya rata rata mengalami pertpanjangan hingga usia 60 tahun. Terakhir saya berusaha menjadi tenaga fungsional – dosen di lingkungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Nenegri (STPDN). Alhamdulillah untuk ini saya telah mendapat rekomendasi Rektor.

Resiko mundur yang amat terasa ialah kehilangan beberapa teman, satu persatu diantara mereka menjauh, secara terang terangan atau perlahan lahan. Ada di antara mereka menyesali saya, tentu karena tidak memahami alasannya, ada yang mencoba mengambil posisi *sefty*, mungkin karena

saya berhadapan dengan “penguasa” Makassar. Anak saya yang kini kuliah di New Castle University mengeritik saya dengan mengatakan “ It doesn’t necessary..”. Pada hari ulang tahunku yang ke 55 bulan Agustus kemarin, anak saya yang tertua – kini di kedokteran Universitas Hasanuddin- menyampaikan pesan : *Selamat Ulang Tahun Pa, semoga ke depan bisa lebih bijak*. Kemudian yang bungsu –kini sedang di SMA 17 Makassar- tidak pernah membicarakan hal ini, namun saya yakin dia amat tertekan karena gurunya sering bertanya tentang saya : Dimana sekarang Bapak ... Apa dia kerja.... Kenapa bisa begitu.... dan sebagainya pertanyaan yang tentu tidak kuasa dia jawab. **“Mundur, Salahkah Tuhan ?”**

Mundur telah mengubah saya pada satu karakter, sekalipun itu bersumber pula dari satu karakter yang sesungguhnya, yaitu Saya. Banyak hal yang tidak terduga ternyata bisa terjadi, namun dibaliknya Saya menemukan yang lain. Benar yang orang katakan, bahwa kita tidak bisa memiliki semuanya, kita akan menemukan yang lain setelah sebelumnya kita kehilangan yang lain atau sebaliknya. Seperti itulah kehidupan harus dijalani, yang tidak mungkin menjadi mungkin. *“Bagaimanapun hal itu akan tersimpan sebagai sisi privasi, sebagai sesuatu jalan indah yang pernah ditempuh dan membuat penulis bertemu “manusia”, sekaligus mengenal dunia seperti yang senantiasa diajarkan parapilsuf. Pengalaman mundur memberi pengalaman spiritual yang mendalam”, (hal 3).*

Pernyataan mundur saya dari jabatan di pemerintahan Kota Makassar sempat mengundang perhatian media, terbukti ketika itu saya mengalami kelelahan psikis melayani media, elektro maupun cetak. Saya berusaha menghindar karena saya tidak mau hal ini mengeksploitasi privasi saya. Sekalipun sebenarnya kasus mundur saya itu bukan hal luar biasa dan wajar saja, mengingat menjelang mutasi pejabat pemerintah kota, Walikota Makassar melakukan pertemuan khusus di Rumah Makan Surya, tanggal 25 Pebruari 2012. Beliau mengundang seluruh pejabat dan jajarannya. Dalam pertemuan itu, Walikota berulang ulang menyampaikan, bahwa mutasi yang dia lakukan itu tidak tepat, karena menjelang Pemilihan Gubernur dimana dia sangat membutuhkan dukungan, namun menurutnya mutasi tetap harus dia lakukan. *“Jika ada yang tidak puas, kecewa, tidak apa apa dan mau mendukung calon lain tidak apa, boleh juga, yang penting hubungan silaturahmi tidak putus “*. Pernyataan Walikota ini memberi nuansa baru bagi pertemuan itu, dan semua orang memprediksi arah ucapan itu. Pernyataan itu bagi saya, seakan memberi ruang berbeda dan Walikota sendiri telah menutup ruangnya.

Suasana bathin yang lain yang lebih substantif mendorong kemunduran saya ketika itu ialah kedekatan saya dengan teman teman NGO Kota Makassar untuk mendorong

terbentuknya Indonesia's Islands of Integrity for Makassar melalui satu forum yang digagas dan dilaksanakan pada tang 13 – 14 September 2011. Acara ini diprakarsai dan dibiayai masing masing The Asian Foundation; Transparansi International Indonesia; KEMITRAAN.; KOPEL Sulawesi ;KINERJA- USAID; Ombudsman Kota Makassar; SIPS Project (CIDA – KPK).

Rapat Kerja Antar Pihak dihadiri segenap Organisasi Non Pemerintah (NGO) Kota Makassar, dibuka Walikota Makassar, Keynot Speak Teten Masduki serta utusan dari Bappenas. Rapat kerja berhasil menyusun kesepakatan antar pihak serta konsep Rencana Aksi Daerah Pencegahan Korupsi (RADPK) di Kota Makassar.

Keakraban dan suasana kebatinan yang terjalin ketika itu terganggu oleh kebijakan Walikota yang masih mempertahankan Ir.Ridwan Muhadir sebagai Kepala Dinas PU Kota Makassar sementara yang bersangkutan ketika itu sudah mendekam di Rutan sebagai terpidana korupsi.Selain itu kalangan NGO juga mempersoalkan promosi H. Ibrahim Saleh, SE sebagai Kepala Bappeda yang pada saat itu sedang diperiksa dalam kasus bantuan sosial rehabilitasi rumah masyarakat miskin yang diprogramkan Dinas Sosial Kota Makassar.

Kondisi empirik yang demikian itu melahirkan asumsi ketidakseriusan Walikota mewujudkan Islands of Integrity for Makassar dan penjabaran RADPK. Kondisi ini sekaligus mendorong kemunduran saya atas jabatan baru yang ditawarkan selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

Sekalipun Walikota berusaha menjelaskan kebijakan mutasinya kepada beberapa NGO melalui pertemuan pertemuan yang dilakukan secara maraton dan tanpa melibatkan Saya, namun kekecawaan akan keseriusan Walikota terhadap upaya upaya pencegahan korupsi tetap tidak teratasi. Konsesi maksimal yang dicapai ketika itu adalah mencopot Ridwan Muhadir sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum melalui Mutasi berikutnya yang khusus dilakukan untuk itu.

Sebetulnya terdapat pula agenda menganulir Ibrahim Saleh pada jabatan Kepala Bappeda, namun saya sendiri tidak merespon agenda teman teman itu, karena hal tersebut akan tendensius, subyektif. Itupun jika dilakukan tidak akan mengembalikan saya kepada posisi sebagai Kepala Bappeda, Saya sudah terlanjur mundur. Saya harus akui, bahwa pertemuan pertemuan yang dilakukan Walikota dengan beberapa NGO telah berhasil meleraikan kesatuan emosional Saya dengan beberapa Organisasi Non Pemerintah itu.

Penjelasan seputar hal ini penting bagi Saya karena tidak sedikit orang yang mengira ngira bahwa kemunduran Saya dipicu oleh kekecewaan atas mutasi yang diselenggarakan Walikota Makassar yang memindahkan Saya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar. Sekalipun tentu kekecewaan itu bermotif pasti, atas logika: kalau Saya tidak dipindah tentu Saya tidak mundur. Namun Saya ingin pertegas bahwa kemungkinan mundur itu selalu ada, termasuk sebagai Kepala Bappeda.

Jujur Saya akui bahwa mundur Saya tempohari, Saya lakukan dalam kerangka bertindak publik, berpikir publik dan mengabaikan kepentingan pribadi. “... *setiap individu memiliki hak otonom untuk berkehendak (atonomie des willens) sebagai sumber universalitas, dan inilah yang disebut Zursebagai kepublikan dari heteronomi*’: *hak hak publik bersumber dar iindividu individu.*

Seorang pejabat publik dapat dimasukkan dalam kategori tidak bermoral apabila kebijakannya melalui tindakan pribadi tidak melalui proses imperative bathin. Pejabat publik Pejabat publik sangat tidak etis berada pada skala ketegangan tinggi untuk hal hal yang tidak bersifat publik. Dalam hal ini kepublikan (berpikir publik) dibutuhkan, dan dari situ dapat terbaca apakah seorang pejabat publik berpikir publik dan bertindak publik, karena kepublikan merupakan atau tidak lain adalah ide atau cara berpikir (hal 7).

Untuk kepentingan pribadi, misalnya pertimbangan jabatan, pangkat dan pendapatan, kita bisa saja mengabaikan perasaan. Kita terima penugasan, terima perintah pimpinan, lalu kita menjadi bawahan yang baik, selesai. Hanya saja, untuk hal seperti ini, bagi saya terdapat kendala tersendiri. Saya terpola pada satu sikap tingkah laku untuk lebih menghargai yang benar dibanding berusaha menjadi “baik”. Menjadi benar sudah jelas baik; sebaliknya berusaha menjadi baik cenderung menjadi bodoh atau sekaligus berbuat salah, semacam “kongkalikong”. Perbuatan kongkalikong adalah interaksi saling berbagi “kebaikan”: saling memberi dan menerima yang jika tidak hati hati bisa menjadi cikal bakal tindak pidana korupsi.

“Daya tarik korupsi sangat luar biasa, sehingga dapat menjadi prilaku yang disenangi dan disukai, sekalipun dalam bahasa aslinya (Latin) : corruptio – corrumpere berarti busuk, rusak. Dalam The Lexicob Webster Dictionary (1978) diartikan: kejahatan, ketidakjujuran, tidak bermoral atau penyimpangan dari kesucian. Terakhir, presiden kita menyebutnya “kongkalikong”. (hal 57)

Tidak jarang kita terjebak untuk tidak menolak pemberian hanya karena enggan melukai, tidak mau mengecewakan, khawatir bisa membuat tersinggung, maka kita merasa baik jika bisa menerima kebaikan, sekaliun itu salah. Gratifikasi, suap dan semacamnya bermula dari

ketidakmampuan berbuat rasional, tidak bisa memilah kebaikan dan itu berbuah Kongkalikong. *“Kongkalikong khususnya dilakukan atau sesuai dugaan presiden berlangsung pada saat saat pembahasan, perumusan anggaran, antara eksekutif dengan legislatif. Jika demikian halnya kejadian seperti ini tidak hanya di tingkat APBN tetapi juga di tingkat APBD, bukan hanya di tingkat kementerian, akan tetapi juga di tingkat SKPD. Malangnya lagi hal ini bisa terjadi atas sepengetahuan atau diketahui atasan”*.(hal58.)

Prilaku korupsi seperti modus kongkalikong dikenal sebagai kleptokrasi. *“...suatu pemerintahan yang dipimpin oleh para pencuri. Ada dua ciri pemerintahan yang demikian, pertama jika pemerintah tidak lagi malu malu mencuri; dan kedua, jika pencurian itu telah direncanakan”* (hal 49).

Pencurian yang direncanakan itu bisa terjadi pada lembaga perencanaan seperti yang pernah saya pimpin, Bappeda. *“... korupsi yang dilakukan bukan lagi karena faktor kebetulan, semacam gratifikasi, penyuapan, pemerasan. Pencurian dengan gaya direncanakan lebih sistimatis, jejaring, baik internal eksekutif maupun dengan lembaga legislatif, institusi yang memiliki kebijakan budgeting. Biasanya pencurian gaya ini dilakukan pada saat penyusunan anggaran, baik pokok, maupun perubahan.(hal...)*. Hal ini sangat rentan jika seorang kepala SKPD tidak memiliki penguasaan di bidang tugasnya, yang dienal sebagai kompetensi, atau tidak memiliki kapasitas daya tangkal mengingat kedudukannya sangat bergantung pada satu orang yang jika tidak dikontrol secara baik bisa menjadi semacam “monarchi”. *“...cara pandang Kepala Daerah (KD) terhadap pegawai di daerahnya lebih bijak jika diletakkan pada tataran Kepala Daerah dan PNS dari Dua Dunia Berbeda agar hubungan keduanya tidak mengalami distorsi atau kekeliruan. Berbagai literature mendiagnosa tujuan birokrasi ditentukan oleh mekanisme yang ada di luar birokrasi, dan birokrasi itu dipimpin oleh pimpinan yang direkrut dari mekanisme politik yang ada di luar birokrasi. Penggarisan ini cukup memisahkan keduanya dan memberi demarkasi yang tegas”* (hal 9).

Ada pihak yang menduga bahwa kemunduran saya itu karena persaingan untuk menjadi Sekkot Makassar. Jujur saya akui, bahwa untuk kepentingan karir dan perbaikan Makassar saya butuh jabatan itu, hanya saja saya tidak tepat bagi kebutuhan pimpinan di jabatan itu, sekalipun saya direkomendir banyak pihak, baik lisan maupun tertulis. Saya dapat rekomendasi dari KPPSI Sulawesi Selatan dan dari Pasantren Hidayatullah serta beberapa organisasi non pemerintah (NGO), namun pergolakan disekitar pengusulan Sekkot Makassar itu sarat kepentingan. *“Di dalam pengelolaan Sekkot itu terdapat conflict intrest, yaitu karena pengelola kepegawaian juga mengincar jabatan*

Sekot tersebut. Seterusnya Ketidakadaan transparancy – keterlibatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) patut diduga tidak epektif.” (hal 64)

Ada pula yang menilai bahwa mundur saya itu adalah sebuah strategi, untuk saya masuk kembali ke Makassar dan bukan lagi sebagai Kepala SKPD. Pandangan atau analisa seperti ini berseliuran pasca pernyataan mundur saya, bukan hanya di kafe kafe, tetapi bahkan di kalangan legislatif dan di kantor legislatif.

Bagi saya hal tersebut bukan hal yang mustahil, namun hal itu bisa terjadi sebagai dampak dari kemunduran. Patut saya luruskan bahwa hal tersebut tidak pernah terpikir hingga menjadi sebagai satu tujuan: *“Jujur, mundur itu bukan kebutuhan, bukan kepentingan dan bukan target.” (hal 3).*

Patut pula dikemukakan, bahwa : *“mundur (tempohari itu) bukan hal yang menyenangkan bagi saya, bukan hal yang saya sukai.” (hal 5)*. Kalaupun nanti saya mendapat peluang untuk hal yang dimaksud, sebagai kader birokrasi dan aparat pemerintahan yang telah mengabdikan mulai dari bawah, tentu saya siap. Apalagi untuk hal ini saya mengerti anatomi Makassar, tahu masalahnya, ada teman yang selama ini bermitra melakukan inisiasi inisiasi sosial (*best practices*) siap mendorong dan bekerjasama ke depan. Sebagai mantan Kepala Bappeda, Saya Tahu Makassar !

Penulis,

H.M.Idris Patarai

MUNDUR SALAHKAH, TUHAN ?



Oleh : **M. Idris Patarai**

Di banyak negara, kalau tidak mampu, politisi atau pejabat publik mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral kepada rakyat. Demikian dikemukakan pengamat politik Sebastian Salang dalam Seminar "Kata Survei DPR Terkorup". (Kompas Senen 11 Juni 2012). Sebelumnya, di Makassar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fausi menyatakan akan mundur jika program KTP-electronic gagal. Demikian halnya Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsi, mengundurkan diri dengan alasan sakit sebelum akhirnya meninggal akibat kanker paru yang diderita almarhum. Satu lagi, Tere Anggota DPR sekaligus Pengurus Partai Demokrat menyatakan mundur dari keanggotaan dan kepartaian, diduga Tere mundur karena gerah oleh "kondisi" partainya.

Sesungguhnya, selain pertanggungjawaban kepada publik ala Pak Gamawam Fausi, kita kenal adanya pertanggungjawaban moral semisal Tere Anggota DPR-RI itu. Begitu juga terhadap almarhuma Sedyaningsi membuktikan mundur sebagai pertanggungjawaban spritualitas. Almarhum mengemas dan menyelesaikan segalanya sebelum pergi. Bukankah begitu ?

Mungkin berbeda yang dialami Nikos Liberopoulos dan Kostas Chalkias, masing masing striker dan kipper di Tim Yunani. Keduanya mundur setelah Timnya tersingkir 22 Juni dari Piala Eropa 2012. Kemunduran ini dipastikan sebagai profesionalisme. Namun, apapun namanya, mundur diharapkan menjadi model akuntabilitas di negeri yang gemar *status qou* ini.

Di negeri kita memang, mundur belumlah menjadi lasim, sebagian melihatnya sebagai sangat spektakuler, ada yang memuji "jantan" bagi individu yang memiliki kesadaran mundur, tetapi ada juga yang mencemooh "kecewa". Bisakah mundur itu

menjadi pertarungan bagi pejabat publik, seperti yang diinginkan Sebastian Salang. Sulit dibayangkan, mundur itu menggejala positif di negeri kita. Tidak mudah terjadi, terutama karena mental bekerja pejabat publik kita tidak "fighter", tidak ngotot dan cenderung bekerja normatif saja. Selain itu sistem dan perilaku kepemimpinan atasan turut berpengaruh. Terdapat atasan yang *meninabobokan* aparat, mungkin alasan politis, kekerabatan, atau ada ada saja. Jika terdapat pejabat berkesadaran berhenti atas alasan rasional, buru buru atasan menolak: "*tidak perlu, situ aja, ndapapa kok*".Pertanyaannya, apakah mundur berdimensi dialogis atau didialogkan?

Itulah sebabnya mungkin di banyak tempat di negeri kita, masih ada aparat yang doyan menggunakan "output" sebagai standar kinerja sekalipun untuk hal ini sudah ada Instruksi Presiden No. 7/1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Belum lagi bila dikaitkan dengan pola kerja para aparat kita yang masih sangat terpatok pada spektrum APBD secara kaku. Parahnya lagi APBD itu disusun dengan pola monoton tanpa itikat mensinergikan, sinkronisasikan atau integrasikan program antar stakeholder. Masing masing berjalan sesuai dengan mekanisme pagu anggaran dan mengabaikan tawaran sistem *money follow punction* dalam perencanaan dan penganggaran (Permendagri 54 /2010).

Bukan kebetulan jika Penulis, secara pribadi adalah aparat, pernah terposisi sebagai pejabat yang mengurus publik, sekaligus punya pengalaman mundur. Namun demikian tulisan ini tidak akan menjadi *pledoi* kemunduran penulis. Bagaimanapun hal itu akan tersimpan sebagai sisi privasi, sebagai sesuatu jalan indah yang pernah ditempuh dan membuat penulis bertemu "manusia", sekaligus mengenal dunia seperti yang senantiasa diajarkan para filsuf. Pengalaman mundur memberi pengalaman spiritual yang mendalam.

Jujur, mundur itu bukan kebutuhan, bukan kepentingan dan bukan target. Mundur itu pilihan. Jika kasus penulis tempo hari, mundur ditempuh sebagai pilihan dari jalan buntu. Pertanyaannya kenapa buntu ? Buntu karena kondisi yang dihadapi bertabrakan sistem nilai yang dianut, dan kita tentu diatur oleh sistem nilai kita yang tidak dapat kita *utak – atik* sesuai kebutuhan. Sistem nilai berifat universal dan fundamental!

Pengalaman ini juga mengajarkan, bahwa mundur itu pilihan, dan memilih merupakan implementasi dari cara berpikir bebas, sekaligus implementasi dari kebebasan:

kebebasan dari tidak adanya belenggu *pragmatisme* , ancaman *security* dan jaminan *supervising* .

Saya menduga bahwa belenggu belenggu itulah yang membuat pula mundur bukan hal yang mudah. Disarankan kiranya kita mengappresiasi kebebasan, mengingat kemampuan memilih, sekali lagi, bermula dari kebiasaan menghargai kebebasan, dan perbuatan mundur mengandung magnet kebebasan memilih.

Aksiomanya kemudian adalah, bahwa bagi yang tidak bisa memilih berarti tidak dapat mengappresiasi kebebasannya; dan bagi yang tidak dapat mengappresiasi kebebasannya berarti tidak mengetahui keinginannya, yang berarti pula tidak memiliki perencanaan tentang apa yang tepat baginya dan tentang apa yang harus dilakukannya. *Frankl* dalam *Triantoro* (2004) mengklasifikasi 3 (tiga) kebebasan : kebebasan berkehendak (*Freedom of will*); kehendak hidup bermakna (*will to meaning*) dan makna hidup itu sendiri (*life of meaning*). *Frankl* juga memberi toleransi terhadap kebebasan bersikap, yaitu kebebasan yang membuat manusia mampu mengambil jarak dengan dirinya sendiri (*self detachment*), semacam terlepas dari belenggu belenggu tadi; dan kebebasan menentukan apa yang diinginkan untuk kehidupannya (*the self determining being*). Mundur itu sarat makna selain akuntabilitas.

Implementasi kebebasan sesungguhnya bukan hanya pada kebebasan memilih, kebebasan berkehendak dan bersikap, melainkan juga menyangkut banyak hal, mengingat kebebasan adalah esensi kemanusiaan, atau hak hidup itu sendiri. Kebebasan berkait juga dengan *equity* (keadilan), berkait dengan toleransi, berkait dengan transparansi dan seterusnya. Jika unsur unsur kebebasan itu tidak terjelma dalam prilaku sosial secara luas, maka mundur dapat menjelma menjadi sebuah substansi.

Mungkin Anda menduga bahwa saya sedang mencari teman dan mengkampanyekan mundur menjadi prilaku akuntabel. Kiranya tidak begitu. Patut dikemukakan, bahwa mundur (tempohari itu) bukan hal yang menyenangkan bagi saya, bukan hal yang saya sukai. Namun saya meyakini (dalam perintah berjihad)...mungkin sesuatu tidak kamu senangi, namun baik bagimu menurut Tuhan, Mungkin kamu menyukai sesuatu namun tidak baik bagimu menurut Tuhan (Q-S Al-Baqarah-216). Apakah Tuhan

menyukai perbuatan mundur? Pertanyaannya susah kita jawab, namun bukankah mundur itu, juga menyentuh aspek akuntabilitas spritualitas ? Salahkah, Tuhan ?

Pejabat Publik Berpikir Publik



Oleh: M. Idris Patarai

Kata 'publik' seringkali diucap orang dalam bermacam konteks, terutama dalam hal mewakili pengertian umum. Dalam konotasi pejabat publik atau pelayanan publik, kata publik dimaksudkan sebagai pembeda dari individu, orang seorang yaitu masalah atau urusan yang tidak berkaitan dengan publik. Publik dalam konteks ini berarti "pubes" (Yunani) yang berarti "kedewasaan", baik kedewasaan fisik, emosional, maupun intelektual. Orang dewasa diklasifikasi mempunyai kemampuan bertindak secara publik (Kartasasmita, 2006). Mungkin itu pulalah sebabnya, sehingga K.H. Abdurrahman Wahid, Gusdur -mantan Presiden RI- berseloro tentang Anggota DPR sebagai "Kanak Kanak". Cara pandang Gusdur itu mempertegas bahwa DPR senantiasa berpikir kanak kanak dan tidak berpikir dewasa.

Lebih jauh jika kita telusuri, ada benarnya jika stigma itu diarahkan kepada para anggota lembaga terhormat itu. Terkesan mereka tidak berpikir dewasa. Mereka hanya senang mempersoalkan dana representasi mereka, fasilitas mereka atau pembangunan gedung mewah bagi mereka, dan lainlain yang berkonotasi untuk dirinya, bukan untuk orang lain, orang yang diwakilinya. Artinya anggota terhormat itu berpikir kanak kanak, mereka tidak berkecukupan pada hal hal yang berkaitan dengan kepentingan orang lain atau umum, katakanlah yang lagi mencuat terakhir ini, gedung kantor KPK.

Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1795), menyatakan bahwa idealnya setiap individu dapat bertindak berdasarkan maksimumnya, yaitu keyakinan moralnya. Tindakan moral berdasarkan maksimum itu adalah tindakan yang senantiasa memperhitungkan orang lain. Disadari bahwa setiap individu memiliki hak otonom untuk

berkehendak (*atonomie des willens*) sebagai sumber universalitas, dan inilah yang disebut Zur sebagai “kepublikan dari heteronomi”: hak hak publik bersumber dari individu individu.

Seorang pejabat publik dapat dimasukkan dalam kategori tidak bermoral apabila kebijakannya melalui tindakan pribadi tidak melalui proses *imperative bathin*. Pejabat publik relevan bertindak publik dan berpikir publik. Pejabat publik sangat tidak etis berada pada skala ketegangan tinggi untuk hal hal yang tidak bersifat publik. Dalam hal ini kepublikan (berpikir publik) dibutuhkan dan dari situ dapat terbaca apakah seorang pejabat publik berpikir publik dan bertindak publik, karena kepublikan merupakan atau tidak lain adalah ide atau cara berpikir.

Hana Arent, dalam *The Public and the Privat Realm* (Penguin Books 2000) mengemukakan distingsi organisasi politik (*polis*) dengan organisasi keluarga (*natural-alamiah*). Organisasi politik atau organisasi publik mesti memperhitungkan ekspektasi publik, sedang organisasi keluarga, partikular dapat sebatas memperhitungkan tindakan lingkup privasi, itupun sepanjang tidak mengeleminasi kemanusiaan seseorang, karena hak kemanusiaan adalah hak publik yang berarti bahwa dalam hidup privat ada hidup lain, yang disebut “hidup politis”. Setiap individu mempunyai dua macam eksistensi, eksisten pribadi (*idion*) dan eksisten publik (*koinon*) (Hana Arent). Dulu di Yunani (*Athena*), seorang individu tidak bisa eksis tanpa kolektivitas dimana dia hidup. (Werner Jaenger dalam *The Ideals of Greek Culture*, Oxford University Press, 1933). Mungkin kita juga di sini, dan juga sekarang harus begitu.

Sebagai filsuf abad XX Werner menyebutkan antara negara (*polis*) dengan rakyat (*privat*) ada istilah tengah yang menjembatani dan disebut Ruang Publik. Ruang Publik bersifat universal dan ruang privat bersifat partikular. Ruang publik dijaga dan diwujudkan oleh pejabat publik yang tercermin dari kebijaksanaan kebijakannya yang ditempuh yang sekaligus mencerminkan cara berpikir mereka.

Kepala Daerah dan PNS dari Dua Dunia Berbeda



Oleh : M.Idris Patarai

Nampaknya cara pandang Kepala Daerah (KD) terhadap pegawai di daerahnya lebih bijak jika diletakkan pada tataran judul tulisan ini, "Dari Dua Dunia Berbeda", agar hubungan keduanya tidak mengalami distorsi atau kekeliruan. Berbagai literature mendiagnosa tujuan birokrasi ditentukan oleh mekanisme yang ada di luar birokrasi, dan birokrasi itu dipimpin oleh pimpinan yang direkrut dari mekanisme politik yang ada di luar birokrasi. Penggarisan ini cukup memisahkan keduanya dan memberi demarkasi yang tegas.

Jika terjadi pengusuran pejabat yang tidak jelas asesmennya, tidak jelas rujukannya, orang-orang menamainya "limbah politik", itu karena dunia mereka tidak dipisah. Konon di dalam limbah ini terdapat pegawai yang bagus namun "digarasikan", tidak berdaya dan tidak diberdayakan.

Tidak bisa dipungkiri ada KD (Kepala Daerah) menggunakan sudut pandang penguasa tunggal dalam pengelolaan sumberdaya manusia aparatur. Hipotesis dari gejala ini karena KD tidak memahami anatomi aparat,

sistim karir dan berbagai metode yang mesti dipahami seorang KD sebagai Pembina Kepegawaian di daerah.

Sebagai pembina kepegawaian KD semestinya *sharing expectancy* terhadap karir kepegawaian seseorang. Infut dari proses ini diharapkan menjamin pengembangan karir pegawai dan terdapatnya manajemen kepegawaian yang baik yang menciptakan pegawai negeri yang produktif.

Akibat langsung dari kekeliruan pendekatan pembinaan ini berimplikasi pada hilangnya kepercayaan diri PNS untuk bertindak benar ketimbang bertindak menyenangkan-nyenangkan atasan. Akibat lainnya adalah tidak dapatnya dihindari kebingungan para pegawai menempatkan diri atau bersikap dalam konstalasi yang rentang.

Diperlukan kesadaran masif untuk seperti judul tulisan ini, mengingat PNS –adalah agent untuk suatu entity. Kesenyawaan PNS dengan tujuan birokrasi jauh lebih dianjurkan ketimbang pada kesenyawaannya dengan aktor politik yang direkrut dari luar mekanisme karir. Esman mengajarkan bahwa supaya birokrasi berkinerja baik, maka disyaratkan memiliki efesiensi sumberdaya, maksudnya tentu fokus pada tupoksi untuk mengembalikan esensi dasar pemerintah selaku *public servant* ,penyelenggara pelayanan umum.

Endang Wirjatmi Trilestari mensinyalir lemahnya kesadaran tentang arti pentingnya pelayanan umum dan manajemen di kalangan pemerintahan tidak lepas dari tidak epektifnya aparat birokrasi yang berimplikasi pada lemahnya aspek kepublikan pemerintah. Keseluruhannya dilatarbelakangi oleh kondisi kondisi yang tidak memberi rangsangan, tantangan dan tindakan sugestif ialah karena mereka dilingkupi trauma politik tak berkesudahan.

Saxena (1986) mengingatkan mengenai hambatan birokrasi, salah satunya pada. Hambatan pada proses itu yakni karena terdapatnya distorsi, nepotisme dan partikularistik di kalangan birokrasi (Riggs, 1957). Umum mengetahui, kondisi seperti ini diperparah oleh sistem dan perilaku politik yang memasukkan aparat dalam ranah politik yang menghalalkan cara-cara nepotisme dan partikularistik itu.

Agar birokrasi berkinerja baik, dianjurkan perlunya memahami anatomi organisasi pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah sebagai bukan organisasi partikular (Esman). Birokrasi patut dipahami sebagai organisasi publik, yaitu satu lembaga yang dirancang secara diferensiasi sesuai dinamika kebutuhan publik dengan kekuatan *spesialization* dan bukan alat politik. Sekalipun disadari bahwa organisasi pemerintahan yang didalamnya terdapat elemen birokrasi hanya dapat berkembang dalam komunitas politik (Riggs). Regulasi kontemporer memisahkannya pada dua dunia yang berbeda.

Perspektif Kota dan Walikota



Oleh

M. Idris Patarai

Dulu, ketika masih di Desa, sangat sering saya mendengar ungkapan: Mau ke Kota. Berkunjung, maksudnya! Konon di kota banyak hal tersedia dan mudah ditemukan. Sebenarnya apa itu Kota ? Apa saja kriteria sebuah Kota ? Apakah tempat bermukim banyak orang cukup disebut kota? Atau apakah sebuah pemukiman yang dilengkapi berbagai fasilitas sudah bisa dinamakan kota ? Seperti apa standar-standar dasar yang memungkinkan pendekatan terhadap kota, interpretasi tentang kota dan perspektif kota? Apakah sebuah kota dicirikan dengan kemacetan lalu lintas, sampah, gedung gedung vertikal atau apakah jalan layang ?

Konon di negara kecil seperti Swiss, sebuah pemukiman dengan jumlah penduduk 15.000 orang pasti akan digolongkan sebagai sebuah Kota dengan luas sekitar 5 km². Tentulah ini tidak bisa dibandingkan dengan Kota Makassar yang luasnya 175,77 Km² dengan jumlah penduduk 1.339.374 jiwa (Hasil Sensus 2010).

Ukuran Kota sangat relatif, klasifikasi Kota juga begitu. Kota tidak cukup dengan lahan, ukuran luas, jumlah penduduk, sekalipun itu dominan. Tidak bisa diabaikan faktor prinsip-prinsip lain yang berhubungan erat. Akibatnya pandangan tentang kota sangat variatif, bergantung orangnya, perspektif dan bidang ilmunya, Kota sangat ambigu.

Markus Zahnd (1999), mensinyalir seseorang dengan profesi di bidang geografi misalnya tentu saja akan menekankan pada permukaan kota dan lingkungannya dengan mencari hubungan antara wajah kota, bentuk serta fungsi pemukiman atau kota itu. Seorang geolog, penekanan pada lahan dan tanah di bawah pemukiman atau kota itu dan bagaimana hubungannya dengan pembangunan akan menjadi prioritas pertama. Kalau Anda seorang antropolog, tentu saja akan memandang kota dari lingkup budaya dan sejarah serta perkembangannya. Lain lagi dengan sudut pandang seorang ekonom, pasti akan menilai dari perspektif masalah perdagangan kota dan kegiatan-kegiatan serta

hubungan-hubungan yang fokus pada potensi kota secara finansial. Lain pula dengan seorang politikus yang menekankan pada cara mengurus kota dan bagaimana hubungan antara pihak swasta dan pemerintah. Seorang sosiolog akan menenknakan perhatian dan fokus pada klasifikasi pemukiman kota dari semua aspek tabiatnya. Seseorang dengan profesi di bidang kesehatan tentu saja akan fokus pada keadaan lingkungan kesehatan pemukiman kota. Seorang dengan profesi di bidang hukum akan fokus pada hubungan peraturan dan keputusan dengan perencanaan kota serta pelaksanaannya. Seorang insinyur akan memandang kota dari sistem prasarana kota dan pembangunannya serta struktur anatomi kota dan perencanaannya. Sedangkan dari perspektif arsitek mungkin tidak akan jauh berbeda dari insinyur tetapi lebih menekankan pada aspek-aspek kota secara fisik dengan memperhatikan hubungan antar ruang dan massa perkotaan serta bentuk dan polanya .

Sampai di sini, lelah tentu kita mengurut perspektif masing masing latar belakang yang cenderung berbeda. Cukuplah menjadi pegangan memilih Walikota yang figurnya juga tidak sedikit. Tidak kurang dari 10 (sepuluh), kalau pendekatannya dari sisi baliho, benner, sticker, tagline . Versi Koran ini 26 figur (Tribun, 14 Juli). Sejumlah nama yang ada “di jalan2” dan yang dalam box Tribun, tentu pula memiliki perspektif tersendiri tentang Kota, khususnya tentang dimana dia beritikad menjadi Walikota. Idealnya tentu begitu karena dari perspektif masing masing diharapkan muncul ide gagasan yang kompetitif.

Pertanyaannya, apakah banyaknya kandidat merupakan pertanda baik? Ini juga bergantung pada perspektif masing masing orang. Lebih jauh lagi, kenapa lebih banyak bernyal “pingin” jadi Walikota ketimbang jadi Gubernur ? Dari sisi baliho, benner, sticker, tagline nampak yang mencalonkan diri jadi gubernur belum sampai angka 5 (lima). Begitu juga yang “RI 1”.

Mudah mudahan saja gambaran tentang nyali yang mengerucut ke atas itu adalah karena faktor kerumitan. Menjadi Presiden tidaklah mudah dibanding menjadi Gubernur. Demikian juga menjadi Gubernur tidaklah mudah tentu dibanding menjadi Walikota. Cara pandang seperti itu logis saja, namun akan menyedihkan jika cara pandangnya menilai: Walikota gampangji. Suatu penilaian tanpa perspektif yang lebih menukik.

Sesungguhnya Walikota memiliki kompleksitas masalah tersendiri sebagaimana kompleksitas Kota. Penelitian LSI 2011 tentang masalah yang paling mendesak ditangani di Kota Makassar : 17,8 % responden menjawab Kebersihan, 14,1 % Kemacetan,

Perbaikan Jalan 12,6 % , Banjir 6,4 % , air bersih 5 % . Rincian ini masih yang terpenting dari rentetan panjang yang mesti ditangani pemerintah kota.

Kita berharap setiap calon dapat memberi expectancy dan lompatan pemikiran jauh ke depan. Memperhatikan unsur-unsur penting Kota secara literatur dan empirik. Aspek wilayah dan penduduk tidak bisa diabaikan. Kota tidak bisa dirancang bersipat sementara, tata ruang menata secara sistematis dan terintegrasi serta konsisten. Aspek pluralitas masyarakat menjadi satu ciri kota. Sebuah kota tidak bisa terlepas dari daerah sekitarnya (hinterland) sebagai penyangga dan sebuah kota sebaliknya dapat melayani kebutuhan masyarakat yang bermukim di sekitarnya tanpa melihat batas-batas wilayah administratif. Kota adalah satu institusi yang mengatur kehidupan penduduknya, menjaga alam, lingkungan, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya serta memiliki komitmen, visi yang menjadi pegangan.

Pakar perkotaan mengingatkan, bahwa jika rasa memiliki Kota tidak dipunyai oleh masyarakat setempat, maka perasaan akan identitas diri sebagai satu kesatuan terhadap suatu tempat menjadi sedikit, sehingga dorongan untuk mengembangkan tempat bermukim permanen sesuai dengan perkembangan pun menjadi tidak begitu besar.

Ada yang menilai, bahwa dinamika perkembangan kota pada prinsipnya baik dan alamiah karena perkembangan itu merupakan ekspresi dari perkembangan masyarakat di dalam kota tersebut. Kota adalah ekspresi warganya. Hubungan warga dengan Kota layaknya terjelma sebagai hubungan budaya. Artinya, warga pembentuk budaya dan itu tercermin dari artifak Kota. Demikian Kota harus diletakkan sebagai satu dari keseluruhan yang terintegrasi, perhatian dan prioritas tidak bisa terpaku pada satu kawasan dan mengabaikan aspek atau kawasan lain.

Le Corbusier berpandangan bahwa kota berfungsi sebagai mesin yang keindahannya hanya berarti secara fungsional. Artinya setiap unit perkotaan hanya berarti dalam keseluruhannya. Kita mengenal adanya pendekatan ideologi dalam Kota. Teori ini dikenal sebagai 'the religious-symbolic thesis' yang dikembangkan Lewis Mumford. Menurutnya, faktor utama yang menyebabkan pemukiman pedesaan menjadi perkotaan adalah budaya yang diekspresikan secara religius-simbolik. Artinya tanpa budaya, kota kita hanyalah sekedar tempat tinggal sementara, perjalanan sirkus, perkemahan pramuka. Oh, alangkah indahnya bila kita sadari, bahwa Kota adalah alamat bagi warganya, maka kota

adalah identitas. Kota bukan sesuatu yang bersifat statis, sangat bergantung pada kita. Kota memiliki hubungan erat dengan pelakunya yang dilaksanakan dalam dimensi waktu.

Markus Zahnd mengingatkan, ada pihak yang berpendapat bahwa sektor publik (pemerintah) seharusnya mengambil peran utama karena mewakili masyarakat serta memiliki pandangan terhadap kota secara luas dan umum. Menurut pihak ini, sektor swasta hanya boleh mengambil peran aktor sekunder dalam perancangan kota. Akan tetapi, pandangan pihak lain justru sebaliknya karena mereka menganggap sektor swasta (developer) lebih mampu berfungsi sebagai aktor utama di dalam perancangan kota. Mereka menganggap keterlibatan sektor publik hanya bersifat sekunder karena kemampuannya secara teknis dan ekonomis terbatas.

Pendapat pendapat tersebut ingin memisahkan antara sektor publik dengan swasta dalam peran membangun Kota. Hal ini tentu berbeda dan naif diterapkan dalam pandangan peran pemimpin Kota, Kepala Daerah. Apalagi jika dikaitkan dengan regulasi tentang pemerintahan daerah.

Jika pigur swasta memimpin kota maka otomatis menjelma ke dalam unsur publik, tidak tepat lagi dalam kategori swasta. Seterusnya, jika terdapat pigur politisi menjadi pemimpin kota, maka artinya dia terjun masuk dalam dunia publik, pemerintahan. Adalah hal yang keliru jika pejabat publik berbisnis, berpolitik lalu mengabaikan fungsi pelayanan. Begitupun, jika ada unsur publik menjadi pemimpin Kota tentu dia sudah tahu, tentang apa yang harus dilakukan selama ini. Apa yang different, kita tunggu !

Pesan dari Yokohama untuk para Calon Walikota



M. Idris Patarai

Makassar menghadapi tantangan seperti yang dihadapi kota-kota pada umumnya di dunia, tantangan perkotaan. Kriteria dan perspektif kota sebagai tempat bermukim yang meliputi alam dan segala ekosistemnya menghadapi risiko-risiko yang tak dapat dihindarkan. Risiko-risiko itu memerlukan cara bermukim yang pas: beradaptasi, bersinergi dan saling menghidupi, manusia dan alam. Konsep inilah didaur dalam terjemahan bersama bagaimana membangun kota yang layak huni dan berkelanjutan.

Prasyarat Kota semisal sanitasi, air bersih, infra struktur, interaksi perdagangan, distribusi dan industri atau secara umum meliputi aspek ekologi dan ekonomi, kini dikenal dengan Eco2Cities. Pertemuan Yokohama mendeklarasikan Kota di satu sisi diklaim sebagai mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus berkontribusi dalam pengrusakan lingkungan dan penciptaan perubahan iklim.

Faktor ini berimplikasi pada urbanisasi yang dinilai atau dapat dikatakan sebagai kekuatan mendasar yang dapat mengurangi pertumbuhan kemiskinan. Sekalipun tentu urbanisasi menimbulkan masalah tersendiri. Urbanisasi menciptakan tantangan lingkungan dan sosial ekonomi kota. Kota sangat bergantung pada keanekaragaman lingkungan (biodiversity).

Pertemuan Yokohama, atau Konferensi Internasional Eco2Cities menilai hal ini sebagai tantangan sekaligus menjadi peluang untuk merencanakan, mengembangkan, membangun dan mengatur kota agar lebih teratur dalam hal penciptaan ekologi dan ekonomi, setara secara sosial dan terhindar dari berbagai risiko.

Maksud baik rekomendasi Yokohama, yaitu agar kita dapat mencapai keseimbangan lingkungan sambil mempromosikan pembangunan dan mengurangi kemiskinan. Langkah mengadopsi strategi yang membangun sinergi dan keterkaitan

ekologi, sosial dan ekonomi yang berkesinambungan, maka kota dapat menciptakan nilai-nilai ekonomi dan peluang-peluang untuk memperkuat aset-aset sosial yang mengendalikan manfaat sistem ekologi serta menjaganya untuk generasi mendatang.

Disarankan pula agar kita melakukan Intervensi dan rekayasa Kota, agar kota dapat tumbuh tidak sekedar alami tanpa konsep. Disarankan agar bersedia membangun sistem kolaborasi stakeholder; Integrasi fungsi dan sistem kota serta memaksimalkan sub sistemnya; juga mengadopsi suatu kerangka investasi yang berkesinambungan.

Strategi Yokohama ini mempromosikan perencanaan kota secara inovatif. Kota didesain dengan teknologi-teknologi yang baru; pembangunan kota yang solid, sistem transportasi publik yang terintegrasi, perencanaan pemanfaatan lahan kota, efisiensi energi bangunan dan infrastruktur, sistem jaringan yang canggih yang dapat menyatukan sentralisasi dan desentralisasi sumber energi, air serta sistem pembuangan limbah cair yang dikonversi dengan sistem daur ulang.

Untuk mengadopsi pendekatan strategi ini, pemerintah kota dianjurkan: Mengarahkan proses pembangunan yang didalamnya terdapat beberapa hal-hal penting seperti perekonomian lokal, masyarakat dan ekologi yang mampu bersinergi satu sama lain; Menyelesaikan sinergi secara berkesinambungan dalam perencanaan dan manajemen kota dengan mengkoordinasikan suatu kebijakan secara menyeluruh dari para stakeholder melalui kolaborasi yang diperluas; Merencanakan, mendesain dan mengurus seluruh sistem kota secara terintegrasi dan memaksimalkan subsistem yang ada termasuk sistem ekologi; Mengadopsi suatu kerangka investasi yang berkesinambungan; Berkolaborasi untuk mempromosikan pembangunan kota madani/berkesinambungan.

Sentuhan kebijakan terhadap sebuah kota yang meliputi berbagai intervensi kelak akan menjadi pembeda antara Kota yang tumbuh tak terarah dengan Kota yang didesain secara konperhensif. Tidak mengherankan jika perkembangan sebuah kota terkadang tidak fokus karena tersangkut pada area area kebijakan yang tidak konsisten.

Tantangan di Makassar terletak pada perbaikan teknostruktur dan fungsi kelembagaan, khususnya menyangkut perencanaan dan pengendalian ruang. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi penataan ruang yang berjangka panjang yang dapat menjadi rujukan pembangunan ke depan. Demikian halnya dengan sistem perizinan harus

menjadi bagian dari pengendalian yang berkonsekuensi pada peningkatan kapasitas kelembagaan sekaligus menunjukkan urgensi institusi strategis ini.

Di Kota Makassar yang luasnya 17.577 Ha atau 175,77 Km² terdapat Kanal sekitar 11 Km yang membelah pemukiman warga, melintasi setidaknya 3 (tiga) Kecamatan dalam kota. Kanal yang potensial menjadi sarana transportasi dan rekreasi warga sangat potensial diberdayakan melalui konsep yang sedang kita bicarakan. Demikian halnya dengan potensi kemaritiman serta sektor perdagangan sambil tidak melupakan kawasan kumuh yang terdapat pada berbagai titik dengan luas 398,49 ha menunggu dikelola secara slum-upgrading, yaitu penataan pemukiman kumuh secara holistik.

Kota-kota di negara yang sedang berkembang dapat mencapai keseimbangan lingkungan sambil mempromosikan pembangunan dan mengurangi kemiskinan dengan cara membangun konsep Eco2Cities. Kesemua itu membutuhkan komitmen yang tegas dari para pembuat kebijakan, dikembangkan berdasarkan analisis terkini, memperhatikan kondisi lokal dan keinginan yang kuat dari pemerintah.

Untuk menyimpulkan deklarasi Yokohama, para peserta mendesak bahwa kita harus Bertindak Sekarang, Bertindak Bersama, Bertindak Secara Berbeda demi pencapaian pembangunan kota secara berkelanjutan termasuk pembangunan iklim kota yang kondusif. Saya sengaja menyampaikan hal ini kepada Anda, karena mungkin Anda yang dipilih melaksanakannya. Konferensi Internasional Eco2Cities berlangsung tanggal 22 Oktober 2010, di Yokohama, Jepang. Untuk sekarang dan yang akan datang !

SIAPAPUN BISA MENJADI WALIKOTA



Oleh : M.Idris Patarai

Kiranya Anda tidak terkejut membaca judul tulisan ini. Lalu serta merta mencap Saya ingin meruntuhkan kewibawaan Walikota dengan mengentengkan: Siapapun Bisa Menjadi Walikota. Maksud saya itu bukannya tanpa syarat, tetapi dalam hal suku, agama dan etnis atau apapun basa basinya bagi hal hal yang tematik primordial tidak berlaku bagi jabatan ini. Saya pikir, prasyarat menjadi pemimpin di negeri kita ini, Indonesia, terletak pada kemampuan memahami Jati Diri sebagai Satu Bangsa, disamping kompetensi manajerial dan teknis lainnya.

Ketika putaran pertama Pilkada Gubernur DKI dimenangkan Jokowi dan pasangannya yang konon orang keturunan (Cina), tiba tiba ramai ramalan hal yang sama bisa terjadi di Pilkada Makassar. Bermunculanlah nama beberapa tokoh yang tidak asing bagi kita, yaitu dari kalangan keturunan Cina.

Maritza Montero, dalam Thung Ju Lan dan I Wibowo (2001) mengklssifikasi beberapa kelompok etnis yang bisa saja mengklaim dirinya sebaga cina, misalnya RRC dan Taiwan. Namun etnis cina yang ada di Indoensia dewasa ini adalah Cina Perantauan yaitu Cina yang kehilangan kemahiran berbahasa cina dan kehilangan pemahaman tentang tradisi dan kebiasaan Cina, yang dalam hal ini, bukan hanya lahir dan menjadi warga negara Indonesia semata, akan tetapi bahkan telah berkiprah, mengabdikan dalam berbagai bidang profesi, membela dan mempertahankan nama baik Indonesia. Bukan hanya itu, mereka di Indonesia sudah merupakan generasi kesekian, sehingga etnis Cina yang melekat pada dirinya adalah karena keturunan dan oleh karena itu sering pula disebut sebagai warga keturunan sebagaimana warga negara Indonesia lainnya memiliki keturunan yang bereda beda.

Dalam hal etnis keturunan Cina dikenal pula sebagai etnis transnasional, seperti yang dikemukakan Alexandar Irwan (2001). Istilah ini diberikan kepada etnis Cina yang menguasai jaringan perdagangan dari Desa hingga ke Kota Kota, secara regional dan Internasional.

Pada beberapa literatur dan pengalaman bergaul, terdapat beberapa kendala bagi warga keturunan (etnis Cina) dalam hal penemuan jatidiri sebagai Bangsa Indonesia, antara lain : Ragu pada keberadaannya; memiliki identitas yang samar, berada di antara dua identitas (ganda); mengingkari realitas dan, enggan disebut Cina. Mereka pada umumnya memiliki akar identitas yang dangkal, yaitu tidak memahami kebiasaan dan tradisi leluhur; dan yang paling merisaukan, mereka tumbuh di tengah masyarakat yang rentan. Padahal dalam berbicara tentang berbangsa, keturunan etnis Cina telah membuktikannya sejak zaman perjuangan hingga dewasa ini. Mereka masuk dalam kumpulan masyarakat yang membentuk negara.

Jika ciri berbangsa diletakkan pada tatanan rakyat yang telah mempunyai kesatuan tekad untuk membangun masa depan bersama, maka keturunan etnis Cina ada di dalamnya. Bukankah unsur berbangsa itu dimulai dari adanya hasrat hidup bersama, karena adanya unsur-unsur yang sama, dimana unsur-unsur yang sama itu melahirkan ikatan – ikatan emosional yang kemudian menimbulkan adanya persamaan kehendak, cita-cita atau ideologi yang diyakini

Bertolak dari kriteria berbangsa yang dikemukakan Ibnu Hadjar, Direktur Pembinaan Kesadaran Bela Negara, Dephan (2002), antara lain didasarkan pada persamaan kehendak untuk saling menyatu membentuk jati diri dari berbagai ragam dan latar belakang berbeda, bertekad mewujudkan makna baru yang cocok dengan karakter sosial, demografi dan struktur masyarakat yang lebih baik dengan segala konsekuensinya, keturunan etnis Cina telah melewati fase ini. Fase pembuktian diri dalam berbangsa.

Muochtar Buchori dalam Seminar “Kita Indonesia”, 24 Pebruari 2007 menyebutkan unsur kemampuan berbangsa yang pada hakekatnya signifikan dengan pembuktian diri dalam berbangsa yang telah ditunjukkan warga keturunan. Kemampuan kemampuan versi Muchtar Buchori itu meliputi kemampuan berbagi kehidupan (sharing life); kemampuan berbagi ingatan tentang masa lampau (sharing memory); dan kemampuan berbagi pengalaman sejarah (sharing history).

Patut disadari bahwa kemajemukan kita memberi kebinekaan, sejarah perjuangan bangsa melahirkan rasa kebangsaan, konsepsi persatuan dan kesatuan mewujudkan kita sebagai satu bangsa. Selanjutnya komulasi semua ini memunculkan satu rasa yang kita kenal dengan rasa kebangsaan. Rasa kebangsaan mempertebal nasionalisme yang diejawantahkan secara sistimatis, berupa pemikiran, tingkahlaku dan komitmen yang terjaga secara terus menerus dan berkesinambungan secara dinamis. Kiranya perlu ditanggapi bahwa siklus ini tidak bersifat vakum dan terjadi secara alamiah, melainkan perlu direalisasikan dalam peran-peran sosial kemasyarakatan, ekonomi, politik dan pertahanan keamanan yang bersifat semesta.

Suatu hal prinsip yang sering kita lupa ialah bahwa kebangsaan Indonesia merupakan konsep politik, tidak didasarkan atas ikatan etnis, rasial, keagamaan, kultural, bahasa, atau ikatan-ikatan sektarian atau "primordial" lainnya. Hal lain yang sering dilupakan adalah nasionalisme yang seringkali dimaknakan sebagai sesuatu yang diperlukan hanya dalam keadaan perang. Tanpa disadari bahwa nasionalisme merupakan sesuatu yang hidup yang setiap saat memaknai kehidupan, tidak terbatas pada keadaan berhadapan dengan bangsa lain. Nasionalisme dapat terimplementasi pada pengabdian sehari-hari sebagai bentuk kecintaan, termasuk implementasinya pada kemauan menjadi Walikota.

Tantangan yang kita hadapi dewasa ini di dalam membangun kekuatan sebagai satu bangsa adalah membangkitkan kesadaran berbangsa, kesadaran akan jati diri, yaitu suatu aspek kepribadian berupa penglihatan seseorang terhadap identitas dan ciri-ciri dirinya. (Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1997). Penglihatan terhadap identitas diri itu bukanlah sesuatu yang hampa melainkan perlu dimaknai dengan pengorbanan, penyerahan diri secara transsendental kepada negara dan kepada mereka yang membutuhkan negara. Kita butuh negara, negara yang dapat mengeluarkan masyarakat dari jerat kemiskinan, kebodohan dan kemelaratan. Kita butuh negara, negara yang mampu membuat kita setara. Kita butuh negara, negara yang mampu membuat kita saling mencintai. Kita butuh negara, negara yang menjamin masa depan anak-anak kita, ialah masa depan negara itu sendiri.

Dengan mengkalssifikasi diri dalam satu jati diri, akan membawa kita pada suatu pengelompokan yang berciri persamaan dengan sejumlah orang. Ciri persamaan itu sekaligus akan memberi pengetahuan tentang apa yang membedakan kita dengan yang lain. Persamaan-persamaan itu segera membawa kita kepada *sence of belonging*,

sekaligus memberi eksistensi sosial, memberi rasa aman dengan sekelompok orang yang sama (Maritza Montero,dalam Thung Ju Lan,I Wibowo,2001).Siklus ini perlu kita simulasikan dalam kehidupan nyata untuk membuatnya bermakna dan teruji.

Saya berpikir Anda sependapat dengan saya jika ruang berkompetisi dibuka dengan tanpa sekat primordial-sektarian, mengingat masalah krusial yang kita hadapi pada format kebangsaan kita adalah prosesnya bukan keberadaannya. Pada sisi keberadaan, kita sudah selesai, sejak tahun 1945, bahkan sebelumnya. Masalah kita sekarang adalah pada prosesnya, sebagaimana sering dikeluhkan sebagian dari kita, yaitu adanya porsi yang cukup kepada setiap manusia yang sudah dimasukkan ke dalam identitas berbangsa itu. Hal ini penting untuk menjadikan kebangsaan sebagai kekuatan yang efektif.

Sesungguhnya pemikiran seperti ini telah lama berkembang, bersumber dari paham kebangsaan Indonesia yang berintikan pandangan integralistik dimana bagian atau golongan yang terlibat berhubungan erat dan merupakan kesatuan organis. Begitu pula eksistensi setiap unsur hanya berarti dalam hubungannya secara keseluruhan sehingga tidak terjadi situasi yang memihak pada golongan yang kuat atau yang penting dimana tidak terjadi dominasi mayoritas dan tirani minoritas. (Suprpto, 1989).

Kiranya tidaklah muluk muluk jika tuntutan atas proses berbangsa itu dibuat menjadi fair agar hak setiap unsur bangsa dihormati dan diperlakukan secara sama. Bukankah manusia diciptakan sama di hadapan Tuhan. Ini berlaku pada kepentingan manusia dalam semua bidang kehidupan, termasuk warga keturunan etnis cina yang kita persilahkan uji nyali pada Pilkada Makassar. Mungkin ini saatnya.

Sebagai Walikota kelak, yang menjadi harga mati bagi Anda adalah mempertahankan eksistensi dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan ideologi Pancasila.

Pimpin pemerintahan secara sistemik, terbuka dan akuntabel, pemerintahan yang memiliki kriteria daya saing, Insyaallah Anda akan diterima. Siapapun bisa menjadi Walikota -sesuai syarat kompetensi- dan satu lagi : Anda mesti terpilih, kan ?

KOTA DUNIA DALAM PERSPEKTIF PERENCANAAN

M.Idris Patarai

Pengantar

Posisi strategis Makassar yang berada pada bentangan selat Makassar menjadikannya sebagai Kota yang diminati para saudagar dari berbagai belahan bumi. Makassar sejak dahulu menjadi ajang pertemuan pedagang internasional. Pada akhir abad ke-16 dan permulaan abad ke-17, Makassar telah menjadi pusat perniagaan pedagang Spanyol, Cina, Denmark, Inggris dan sebagainya. (L.Poelinggomang dalam Makassar Abad XIX , 2002). Pada awalnya hanya Perwakilan Dagang Portugis, selanjutnya Belanda pada tahun 1607, Inggris pada tahun 1613, Spanyol 1615, Denmark pada 1618 dan Cina pada pada 1618.

Gowa,Tallo adalah Makassar

Ketika arus perdagangan maritim semakin berkembang dari Melaka ke Maluku, Raja Gowa IX, Tumapa'risi Kalonna (1510-1546) giat mengembangkan Bandar Dagang Somba Opu. Lalu kemudian tatkala Kerajaan Gowa berperang dengan Kerajaan Tallo. Perang ini diakhiri dengan sumpah dua raja menyatukan kerajaan (1528). Isi sumpah itu adalah "barang siapa mengadu domba Gowa-Tallo akan dikutuk oleh dewata" (ia-iannamo tau ampasiewai Gowa-Tallo iamo nacalla rewata). Sejak saat itu, Raja Gowa tampil menjadi raja dari kerajaan kembar itu dan Raja Tallo menjadi mangkubumi kerajaan (tumabbicara butta). Dua kerajaan ini kemudian dikenal sebagai Makassar.(Sejarah Suawesi....)

Pada tanggal 9 Nopember 1607, diadakan sembahyang Jum'at pertama di Mesjid Tallo dan dinyatakan secara resmi penduduk Kerajaan Gowa-Tallo telah memeluk Agama Islam. Pada waktu bersamaan pula, diadakan sembahyang Jum'at di Mesjid Mangallekana di Somba Opu. Tanggal inilah yang selanjutnya diperingati sebagai hari jadi kota Makassar.

Pada awal Abad ke 20, Belanda menaklukkan daerah-daerah independen di Sulawesi, Makassar dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Indonesia Timur. Penduduk Makassar dalam kurun waktu itu meningkat sebanyak tiga kali lipat, dan wilayah kota diperluas ke semua penjuru.

Makassar dideklarasikan sebagai Kota Madya pada tahun 1906 dan sejak tahun 1920-an ketika itu Makassar kota dikenal sebagai kota besar kedua di luar Jawa yang membanggakan dirinya dengan sembilan perwakilan asing, sederetan panjang toko di tengah kota yang menjual barang-barang mutakhir dari seluruh dunia dan kehidupan sosial-budaya yang dinamis dan kosmopolitan.

Visi Kota Dunia 2014

Kota Dunia Makassar merupakan satu konsep kota tersendiri menembus dan menciptakan peradabannya, berkembang sesuai potensi dan jaya jangkauan pemikiran masyarakatnya, karena kota adalah ekspresi warga. Kota Dunia Makassar adalah semangat mewarisi kejayaan Makassar di abad 16 dan 17 lampau, dimana pada saat itu Kota Makassar menjadi salah satu Bandar Besar yang banyak disinggahi oleh kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia dan menjadi salah satu daerah tujuan untuk berinvestasi. Kota Dunia Makassar adalah kota yang mampu mengefektifkan potensi sumberdaya manusia dan sumberdaya alamnya pada satu karakter budaya masyarakatnya yang spesifik dan mendunia. (Idris Patarai, Kota Dunia Makassar sebagai satu Persepsi, 2010).

Perspektif Pembangunan

Terobsesi oleh kejayaan Makassar, kondisi masyarakat dan potensi sumberdaya alam Makassar, maka untuk membangun Makassar diperlukan pendekatan tersendiri, yakni pendekatan "pembangunan berkarakter".

Pembangunan berkarakter, artinya pembangunan mesti bisa dipahami, punya bahasa publik, dapat dibaca, dapat dilakukan dan adalah sesuatu yang berbeda antara satu dengan yang pada umumnya. Pembangunan mesti berkarakter karena suatu daerah tidak akan mampu tumbuh dan berkembang tanpa melakukan interkoneksi dengan daerah sekitar atau wilayah sekitar, dan satu daerah akan dibutuhkan atau dapat menjalin koneksi itu jika memiliki daya tanggap memosisikan diri secara tepat dan mutual.

Konsep pembangunan berkarakter tidak akan menciptakan satu daerah yang tumbuh secara eksklusif karena itu tidak mungkin terjadi pada tatanan penerapan pembangunan berkarakter. Konsep pembangunan berkarakter sebaliknya akan membangun suatu daerah secara harmoni dan dinamis dengan daerah sekitar dan pada saat bersamaan konsep ini akan memajukan satu wilayah yang tumbuh dari kekuatan subordinat yang menyanggah, seperti "cakar ayam".

Djoko Sujarto, dalam Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21 (2005) mengungkapkan bahwa suatu kota tidak terlepas dari satu wilayah yang lebih luas. Hal ini kemudian menginspirasi kebijakan dasar pengembangan kota, dimana secara makro pengembangan kota harus dikaitkan dengan peranan dan fungsinya di dalam pengembangan wilayah; dan secara mikro kebijakan dasar pengembangan kota diarahkan kepada pemerataan kesejahteraan bagi penduduknya dan bagi penduduk di sekelilingnya.

Keyfitz, Nitisastro (1960) menandakan bahwa satu kota seharusnya berperan penting sebagai 'front terdepan' dari kemajuan wilayah di belakangnya. Hal ini berbeda dengan motivasi dan titik tolak berpikir pembangunan kota di jaman kolonial, kota dikembangkan semata mata untuk kepentingan masyarakat kota saja, tentunya bagi orang Eropa yang tinggal di kota, yaitu kota-kota dengan status stadsgemeente yang pada umumnya memperoleh keistimewaan (privileges), yakni penyediaan kemudahan memperoleh sarana dan prasarananya (Djoko Sujarto, 2005).

Akhirnya patut dikemukakan bahwa konsep pembangunan berkarakter patut diadopsi untuk pembangunan wilayah yang merupakan pendukung pembangunan nasional secara menyeluruh. Konsep pembangunan berkarakter relevan pula diterapkan di era otonomi dalam hal pembangunan kota.

Perserikatan Bangsa-Bangsa serta lembaga-lembaga internasional lainnya mengidentifikasi apa yang disebut the new internationalist urban policy approach yang terdiri atas 7 (tujuh) pilar pembangunan kota yang pada intinya menekankan pada azas otonomi, yaitu :

1. Kekuatan pengambilan keputusan, kekuatan finansial, pengembangan pendapatan daerah serta kemampuan teknis didesentralisasikan kepada pemerintahan kota
2. Pembangunan kota didasari oleh rencana tata ruang dan mekanisme pengendalian pembangunan kota
3. Sampai batas-batas tertentu, pengadaan pra-sarana dan pelayanan kota diselenggarakan oleh swasta
4. Perencanaan kota dan otoritas pengelolaan kota seyogyanya meliputi pula wilayah yang lebih luas dalam koordinasi dengan pemerintah daerah lainnya

5. Pembangunan dan perbaikan kota yang bertumbuh kepada komunitas masyarakat
6. Penguatan pembangunan kota oleh masyarakat dan sektor swasta dengan pemerintah kota sebagai fasilitator
7. Pembangunan kota berdasarkan azas keberlanjutan dengan memperhatikan keseimbangan, keselarasan dan keserasian lingkungan .

Kalau kita cermati ketujuh pilar pembangunan kota yang direkomendir PBB tersebut, pada dasarnya mendorong kota-kota berkembang dan maju dengan kemampuan atau potensi lokal, dilakukan secara bersama sama antara pemerintah dan civil society, termasuk di dalamnya sektor dengan meningkatkan kemampuan financial dan menjaga keseimbangan lingkungan, sesungguhnya memberi peluang kepada masing masing kota untuk mengembangkan diri secara berkarakter.

Ananto Yudono dalam laporan World City Summit, Singapore, 28~30 Juni 2010, mengemukakan bahwa saat ini sudah separo penduduk dunia tinggal di kota-kota, dan akan terus bertambah. Sudah barang tentu hal ini menyisahkan persoalan tersendiri. Menurutnya, pertambahan jumlah maupun besaran kota-kota terutama di Asia, Afrika dan Amerika Latin terus berlanjut pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertumbuhan kota-kota ini paralel dengan tumbuh berkembangnya problema perkotaan yang perlu segera diselesaikan secara tepat dan cepat.

Belajar dari World City Summit 2010, maka terdapat 5 (lima) pertanyaan yang patut dijabarkan dalam visi-Misi Calon Walikota ke depan (2014-2019)

1. Bagaimana pengembangan kota yang liveable dan sustainable?
2. Bagaimana pertumbuhan kota yang seimbang dengan daya dukung dan daya lindung lingkungan (mikro & makro)?
3. Bagaimana mengelola keseimbangan antar pertumbuhan penduduk kota dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar seperti kebersihan dan kesehatan udara dan air, serta antara tekanan intensitas kegiatan dan kebutuhan ruang fisik kota dengan keterbatasan lahannya ?
4. Bagaimana kota dapat membangun infrastruktur kota, kecukupan hunian dan sistem transportasi terpadu dalam tingkat kualitas kelas dunia?

5. Bagaimana mengelola berbagai ragam karakter penduduknya agar terwujud suasana yang kondusif untuk terwujud dan terpeliharanya keharmonisan hubungan sosialnya?

Optimisme kita ke depan, Makassar dapat menjadi Kota Dunia pada berbagai aspek, antara lain :

Aspek ekonomi

Makassar merupakan tempat yang kondusif untuk penempatan kantor-kantor pusat perusahaan multinasional, lembaga-lembaga keuangan internasional, kantor hukum internasional, pasar bursa yang mempengaruhi ekonomi dunia. Demikian halnya Makassar telah memiliki Pelayanan Perizinan Satu Atap untuk memberikan kemudahan berusaha. Makassar memiliki Kapasitas finansial besar dengan Jumlah ABBD relatif tinggi telah mencapai Rp. 1,5 Trilyun lebih untuk tahun 2012 dengan PDRB 33,38 Triliun. Bank-Bank nasional yang memiliki jaringan internasional memiliki kantor wilayah di Kota Makassar;

Aspek Politik

Makassar merupakan salah satu kota yang dijadikan tempat pertemuan baik organisasi politik maupun organisasi massa. Jumlah penduduk yang besar, diatas satu juta orang (1.... orang, sensus 2010).

Jumlah penduduk yang demikian besar dan plural namun masyarakat menerima dan menghargai kehidupan beragam etnis, seperti berhuninya warga negara asing. Penduduk makassar terdiri dari masyarakat multi etnis dan agama dengan kualitas standar hidup tinggi dari segi keamanan.

Aspek Infrastruktur

Makassar telah memiliki Bandara internasional yang dapat digunakan oleh perusahaan penerbangan internasional. Makassar juga memiliki Pelabuhan laut internasional dan telah dikembangkan sistem transportasi massal secara bertahap. Demikian halnya dengan kualitas Jaringan telekomunikasi yang canggih.

Di samping itu di Makassar tersedia fasilitas RS berstandar internasional yang lengkap. Makassar sangat potensial dikembangkan dalam konsep "Makassar Cyber City". Begitu pula pembangunan Kota Makassar dapat dilakukan dengan konsep kota tepian air kelas dunia yang didasari atas keunggulan dan keunikan lokal yang mencirikan jati diri

Makassar, dapat dibangun secara berkelanjutan sehingga Makassar benar benar sustainable dan liveable.

Aspek Pariwisata

Di Makassar saat ini telah dilengkapi dengan tempat hiburan berskala dunia (Trans Studio). Sangat kondusif untuk event budaya skala dunia, festival film, festival musik, karnaval juga layak menjadi tempat event olah raga dunia. Hal ini menjadi magnet tersendiri bagi Makassar sebagai tujuan wisata dunia.

Perguruan Tinggi berkelas International dengan mahasiswa asing dan jaringan riset dunia ada di Makassar. Keindahan laut dan terumbu karang memberi pesona tersendiri. Potensi relevan dikembangkan melalui program Visit Makassar Year 2011 and Beyond 2014.

Era Perdagangan Bebas

Kesiapan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, jalan dan kualitas layanan teknologi informasi. Kepastian hukum dalam berusaha dengan tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas didukung oleh lembaga pendidikan berstandar global.

Analisis Simetris Musrenbang dengan Apbd

Oleh : M. Idris Patarai



Musrenbang, siapa yang tidak kenal? Hanya saja mungkin tidak sebanding dengan siapa yang butuh. Atau bahkan mungkin pertanyaannya melebar: Siapa percaya? Sederet pertanyaan ini cukup mensugesti bahwa Musrenbang yang ideal belumlah kita temukan dan stigma ini dapat serta merta menjadi tantangan bagi Musrenbang. Artinya jika kita masih mau menggunakan forum Musrenbang sebagai forum perencanaan dan pelibatan masyarakat, maka banyak hal yang mesti dibenahi.

Sering dipromosikan dalam konstalasi ideal, Musrenbang sebagai mekanisme perencanaan, institusi perencanaan dan koridor perencanaan. Sebagai mekanisme, Musrenbang mempertemukan keinginan masyarakat (botten up) dengan apa yang dipikirkan pemerintah (top down). Sebagai institusi, tidak ada media perencanaan yang lain yang patut digunakan dalam pembangunan selain Musrenbang; lalu sebagai koridor, Musrenbanglah jalan satu satunya merumuskan dan menetapkan perencanaan pembangunan.

Secara teori, disebutkan bahwa dalam siklus penyerapan aspirasi, jika kapasitas stakeholders lemah maka tidak dapat dihindari terjadinya intrepretasi dan pengambilan keputusan secara satu arah. Clayton dan Dent (2001) menyimpulkan akan terjadi kegagalan bagi perencanaan satu arah, antara lain kegagalan menangkap isu, kegagalan informasi, kegagalan menyatukan persepsi yang kemudian menyebabkan kegagalan institusi. Kegagalan institusi

dalam konteks ini tidak lain adalah kegagalan institusi perencanaan yang berujung pada stikma: Musrenbang sebagai hal yang terkesan diada-adakan (formalisme). Apalagi dengan model Musrenbang yang masih diliputi pendekatan inkremental, hanya fokus pada isu isu saat ini atau jangka pendek dan kurang mempertimbangkan tujuan tujuan jangka panjang, lebih pro-inertia dan anti inovasi (Ernan Rustiadi dkk, 2009).

Belum lagi jika terdapat hal hal yang bersifat opportunity-driven, Musrenbang sebagai koridor perencanaan dapat dilucuti oleh perubahan perubahan parsial di tengah tahun anggaran, oleh program yang sebelumnya tidak dibicarakan, bahkan mungkin tidak direkrut dalam KUA. Opportunity biasanya atas kebijakan Kepala Daerah dan sering membuat DPRD berang.

Berbagai tudingan yang diarahkan kepada Musrenbang yang intinya menyatakan kelembagaan itu hampir tidak ada gunanya bila ditinjau dari penyerapan aspirasi. Tidaklah mengherankan jika terdapat anggota masyarakat yang berpandangan skeptis dan pesimis terhadap Musrenbang. Pertanyaan besarnya, apakah memang pemerintah butuh masyarakat dalam perencanaan? Sekalipun tentu disadari bahwa Musrenbang itu adalah satu metode perencanaan partisipatif yang dibutuhkan dalam rangka memecahkan kebuntuan perencanaan secara konperhensif akibat terbatasnya pengetahuan stakeholder dan terbatasnya atau beragamnya informasi dan kepentingan. Musrenbang sebagai model perencanaan partisipatif adalah suatu metode yang tidak hanya diperlukan di negara negara sedang berkembang, namun bahkan pada lingkup perencanaan perkotaan di negara negara industri maju (Ernan Rustiadi dkk, 2009)..

Sesungguhnya bagi negara negara yang menganut sistim demokrasi, keterlibatan masyarakat menjadi aksioma bagi keperluan assesment politik. Namun yang dikeluhkan banyak pihak bahwa Musrenbang selama ini, hanya memenuhi target minimal, yakni aspek legitimasi politik.

Seperti diketahui, regulasi perencanaan ditingkat implementatif mengharuskan pemerintah merumuskan rencana kerja tahunan (RKP-RKPD) sebagai embrio APBN-APBD sekaligus pedoman penyusunannya. Rencana ini ditetapkan secara bersama antara eksekutif-legislatif sebagai jaminan kepastian kebijakan, wujud nyata komitmen pemerintah melaksanakan pembangunan yang juga merujuk pada satu skala pembangunan jangka panjang dan menengah. Musrenbanglah wadah satu satunya merumuskan hal hal regulatif ini dalam skala botten up-top down.

Tidak kalah menariknya, Musrenbang diharapkan mensinkronisasi berbagai aspek pelaksanaan pembangunan secara implementatif. Disusun untuk mengukur tingkat urgensi sebuah program: tingkat kepentingannya, prioritas dan dampaknya. Musrenbang pada akhirnya dilakukan untuk memperkuat mekanisme pengendalian dan pengawasan (*safe guarding*) terhadap rencana kerja tahunan.

Musrenbang yang baik akan melahirkan dokumen rencana kerja pembangunan yang baik: meliputi penetapan arah kebijakan, prioritas dan anggaran, sekaligus menjamin penerimaan (*acceptability*) pemerintah bagi masyarakat. Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang sesuai susunan pemerintahan, diskenario sedemikian rupa untuk mendapatkan informasi seluas luasnya agar dapat ditemukan permasalahan inti yang substansial.

Kelak hasil Musrenbang itu dinobatkan sebagai APBD-APBN setelah melalui fase fase melelahkan, baik fisik maupun mental. Pertanyaan mendasarnya, apakah semua dinamika Musrenbang itu diakomodasi ? Jawabannya tentu menyatakan, tidak semua. Alasannya klasik: faktor keuangan, kemampuan pembiayaan, faktor prioritas dan lain lain.

Dalam hal aspek klasik ini, dapat diatasi dengan melakukan diagnosa secara terbuka dan intens, baik oleh tim penyusun anggaran eksekutif, maupun oleh Banggar legislatif. Mulai dari menemukenali proporsi anggran

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, sekalipun diakui, untuk hal ini cukup rumit dan membuat para pihak tak berdaya, eksekuti-legislatif, jika tiba pada perdebatan ini menjadi sangat serbasalah. Artinya pula begitu susah kita keluar dari stikma yang terbangun: pemerintahan untuk pemerintah itu sendiri.

Namun jika Anda ingin mencoba, silahkan komparasikan kemana alokasi belanja disalurkan dalam jumlah paling besar dan paling kecil. Kesenjangan itu pasti menunjukkan adanya faktor tertentu. Demikian halnya dengan belanja antar tahun, antar pos belanja, antara pos penerimaan dengan pos belanja, antara sektor satu dengan sektor lainnya bahkan antar wilayah.

Jika Anda bermaksud mengaudit maka Anda dapat meneliti hal itu pada alokasi yang lebih besar dari standarisasi indeks dan harga yang ditentukan. Kesenjangannya akan memberi informasi akan adanya indikasi mark up. Selain itu alokasi ganda bukan hal yang tidak mungkin terjadi yang indikasi dan akibatnya pada duplikasi anggaran. Ada Pula alokasi yang berulang setiap tahun bagi item yang seharusnya bertahan lama.

Kesimpulannya, menurut para ahli, analisis APBN-APBD dapat dilakukan melalui analisa aspek kebijakan, aspek keuangan, aspek administratif, aspek sosial : keadilan dan kepastian guna menemukan APBN-APBD yang efektif dan akuntabel, pro rakyat, pro poor and pro growth.

Kita patut mempelajari kebijakan-kebijakan yang terkait, terutama RPJP, RPJM dan KUA. Hal ini penting, terutama untuk mengetahui, apakah program/kegiatan merupakan terjemahan dari skala prioritas.

Dari Musrenbang yang mandul, kapasitas perencana dan informasi stakeholder yang terbatas serta komitmen yang rendah, ditemukan hubungan simetris: Umumnya APBD belumlah untuk rakyat !

DESENTRALISASI, STRUKTURAL ATAU CULTURAL

Oleh : M. Idris Patarai

Pada satu kesempatan saya menjadi pembicara dalam seminar yang diselenggarakan Majalah Forum, dimana salah satu pembicaranya juga adalah Saudara Muhammad Idris, editor buku ini. Saya ingat waktu itu Saudara Idris menceritakan pengalamannya menghadapi keresahan pengusaha kecil menengah yang menjadi "suplayer". Persoalan yang dikeluhkan adalah sistem pembayaran yang menggunakan waktu cukup lama -satu hingga dua minggu- karena kebijakan pembayaran ada di kantor pusat yang berkedudukan di Jakarta bahkan ada di luar negeri. Kondisi ini pengusaha kecil-menengah itu tidak memproduksi selama tenggang waktu pembayaran, karena modal tidak cukup.

Waktu itu Saudara Idris juga menceritakan pengalamannya ketika ditugaskan mengakomodasi dan mensinergikan program pemerintah daerah dengan para privat sektor yang memiliki dana CSR (Corporate Social Responsibility) dan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan - CSR bagi BUMN), menurut pengalaman Saudara Idris yang diungkapkan dalam seminar itu, ternyata kebijakan pengalokasian, pemanfaatan serta distribusi CSR/PKBL ditentukan kantor pusat.

Ketika itu saya berbisik kepada Saudara Idris, yang kemudian menjadi penulis buku ini : "Itu artinya Pak Idris yang berdesentralisasi saat ini barulah pemerintah daerah belum daerah".

Pertanyaannya kemudian adalah apakah cukup bila pemerintah daerah saja yang berotonomi, yang berakibat tidak terjadi keseimbangan antara berbagai segmen dan komponen pembangunan di daerah, tidak ada balancing, tidak ada gerakan simultan, lemahnya konsep pemberdayaan yang sifatnya mengakomodasi keinginan masyarakat di daerah. Tidaklah sedikit forum seminar dan perkuliahan yang menyuarakan "model desentralisasi yang cocok" yang dapat mensimulasikan keleluasaan daerah (discretion); kerinduan orang daerah akan adanya pemahaman pusat secara konperhensif terhadap daerah (Equity), penghargaan

terhadap keanekaragaman (diversity); keseimbangan kekuatan dan kesejahteraan (Equality).

Bergema suara suara nyaring tentang ini hampir memekakkan (dan bisa memuakkan), sementara kita lupa bahwa semua itu sudah masuk dalam tataran konsep, regulasi. Hanya saja tidak terjadi. Sesungguhnya juga yang cocok itu yang dapat menyelesaikan masalah di daerah persegera, bukan konsep, keputusan atau perintah tetapi dalam hal yang bersifat tangible.

Saat ini dinamika berdesentralisasi seperti tak tersahuti, sementara itu desentralisasi tidak hanya memuat aspek kesejahteraan- ekonomi keuangan, tetapi juga dominan politik- demokrasi kekuasaan, juga keamanan – bagaimana menjaga NKRI.

Dalam hal kebijakan tingkat lokal, setelah adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah, penelitian Prakarsa (2010) menunjukkan adanya inovasi kebijakan di tingkat lokal. Pengalaman di Meksiko menunjukkan adanya Sistem Politik Lokal Kompetitif ke lokal responsif; munculnya birokrasi moderen dan efisien; serta adanya masyarakat sipil yang aktif.

Lain halnya di Afrika, penelitian Parakarsa juga menunjukkan adanya konsistensi pusat mendukung pemerintah daerahnya; adanya kemampuan birokrasi pusat mentransfer kapasitas ke tingkat lokal dan didukung kesiapan masyarakat sipil lokal memanfaatkan peluang politik desentralisasi.

Khusus di Asia Tenggara , China dan Amerika Latin, terdapat tata kerja kelembagaan lintas unit yang koheren, mekanisme transfer fiskal yang jelas; dan meknisme akuntabilitas yang efektif mengontrol kebijakan pemerintah lokal. Inovasi di Indonesia, semangat desentralisasi telah memunculkan pemimpin lokal (personal leader driven) dari Pilkada Langsung, yang membuka peluang kepemimpinan responsiv.

Kepemimpinan responsive yang didapat dari Pilkada Langsung, pasti hanya dapat berkuat pada keinginan besar, karena pada akhirnya adalah bagaimana mensinergikan keinginan itu secara “vertical” dan “horizontal”. Leadership is reduced to a combination of grand knowing and salesmanship (Ron Heifetz’s).

Kepemimpinan responsive dapat menciptakan desentralisasi yang responsive karena juga membutuhkan itu. Desentralisasi responsive dapat mewujudkan dicresi bagi daerah –keleluasaan- mendapatkan sinergi –mitra-partnership, mendapat jaringan, trust, garansi, lepas dari tekanan politik “siklus lima tahunan”; mampu mensimulasikan manajemen pembangunan berbasis masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola dan mendorong peningkatan pembangunan yang sekaligus mendorong pembangunan tingkat lokal yang responsive, agar juga kita bias mencatat, ada hal yang kita dari berdesentralisasi.

***) Penulis adalah doctor bidang administrasi public, Staf Pengajar dan Pneliti STIE NITRO Makassar.**

PERSPEKTIF DEMOKRASI DALAM OTONOMI DAERAH

OLEH : M.Idris Patarai

Tidak ada perubahan yang substansial, itu yang kita hafal betul, ketika acana revisi UU No 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah mencuat ke permukaan. Lalu tenang tenang saja kita menunggu datangnya rencana tersebut. Namun apa yang terjadi, ketika pertamakali rencana itu dimediasi oleh Departemen Dalam Negeri, tak luput Hari Sabarno bicara panjang mengenai hal ini dan menimbulkan tanggapan luas bernada berang, khususnya bagi yang membidani lahirnya Undang Undang tersebut. Bagaimana tidak sekusut itu, undang undang yang sebelumnya terdiri dari 16 bab akan menjadi 18 bab, 134 pasal akan berubah menjadi 152 pasal. Lebih banyak dari yang direvisi, sehingga terkesan terjadi perubahan total.

Bukan hanya itu, setidaknya ada empat poin menonjol yang akan mengalami perubahan mengacu pada konsep Mendagri. Ke empat poin itu, yakni: Seleksi untuk menjadi perwira, bintara dan tantama Polri dilakukan di propinsi dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat dan kebijakan Gubernur. Poin selanjutnya adalah, Ketua Dewan Pertimbangan Badan Otonomi Daerah dirubah menjadi Dewan Otonomi Daerah, kalau sebelumnya diketuai oleh Mendagri, maka konsep revisinya diketuai Wakil Presiden dan Mendagri Pelaksana Harian Seterusnya draf revisi tersebut mengutip

konsep kelautan, bahwa laut adalah wilayah negara yang dikuasai pemerintah, yang pengaturannya tidak mungkin didesentralisasikan karena dua hal: pertama aspek keamanan nasional, keadilan antar daerah dan hajat hidup orang banyak; kedua bertentangan dengan undang undang pembentukan daerah yang menyebutkan laut sebagai batas wilayah, bukan bagian wilayah. (Kompas, 30 Januari 2000)

Namun demikian, bukan itu yang membuat "wah" orang daerah, akan tetapi ada pasal yang mengejutkan, yaitu pasal yang menyangkut DPRD dapat dibubarkan oleh Presiden. "Tidak heran jika hal ini dinilai sangat ekstrim mengingat keberadaan DPRD mengindikasikan bahwa di daerahpun pemerintahan dilakukan atas dasar permusyawaratan. Bhenyamin Hossein, 1995 menyebutkan bahwa setidaknya-tidaknya ada dua pasal dalam konstitusi perlu dipahami sungguh sungguh bila kita ingin memahami betapa

perlunya desentralisasi dan otonomi itu. Pasal itu ialah pasal 1 ayat (1) mengenai bentuk kesatuan negara Indonesia dan pasal 2 ayat (1) mengenai utusan dari daerah-daerah dalam keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (hal ini masih relevan dengan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, sekalipun istilah utusan dari daerah-daerah dalam keanggotaan majelis itu dikenal dewasa ini dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah). Pasal pertama menentukan bobot dan kadar otonomi daerah, sedangkan pasal kedua bertalian dengan posisi dan peranan daerah otonom dalam skala politik nasional.

Selama masa penjajahan Belanda hingga tahun 1903, Hindia Belanda merupakan "gecentraliseerd geregeerd land", dekonsentrasi yang sangat hirarkis untuk keperluan penetrasi politik. Pada 1903 barulah lahir undang-undang desentralisasi yang membuka kemungkinan untuk mewujudkan daerah otonom yang meliputi kresidenan (gewest) atau bagian dari kresidenan (geedelte van een gewest). Hal demikian mengandung strategi kolonial untuk mencapai tujuan "efisiensi administrasi", (A.D.A. Dekat Angelino: 1931. J.S. Furnuval: 1944. Hary J. Benda: 1979, Bhenyamin Hoessein: 1995)

.Desentralisasi model Pemerintahan Belanda tersebut adalah desentralisasi yang lebih diarahkan untuk mencapai efisiensi administrasi dengan mengorbankan nilai demokrasi.

Hal tersebut dapat dipahami bila kita mengamati karakteristik penyelenggaraan desentralisasi di Hindia Belanda, dimana pembentukan daerah otonom dimulai di kota-kota administrasi, peran ganda pimpinan eksekutif, komposisi keanggotaan dewan yang direkayasa dan dewan berfungsi sebagai lembaga penasehat. Nanti dalam periode Wet op de Bestuurshervorming 1922, strategi itu mengalami sedikit perubahan.

Tujuan desentralisasi untuk mencapai efisiensi administrasi dan partisipasi melalui pembentukan propinsi otonom, kotapraja otonom dan kabupaten otonom. Nilai demokrasi sedikit diakomodasi dalam desentralisasi dengan cara memberi kesempatan kepada penduduk pribumi untuk terlibat dalam pemilihan anggota dewan. Fungsi dewan tidak lagi sebagai lembaga penasehat melainkan dalam bidang legislative, demikian Bhenyamin Hoessein. Hingga masa kemerdekaan semua aturan menyangkut otonomi daerah dengan mengacu pada konstitusi yang berlaku, senantiasa memperhatikan aspek-aspek demokrasi, sekalipun desentralisasi yang dianutnya masih sangat variatif dalam pelaksanaannya

dan sekalipun undang undang itu tidak semua diberi nama undang undang tentang desentralisasi,tetapi kita cukup pahami bahwa itulah hakekat yang dianutnya.Undang Undang yang pernah ada tersebut ,yaitu : Undang Undang No. 1 Tahun 1945;Undang Undang No 2 Tahun 1948;Undang Undang No. 1 Tahun 1957 ; Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959;Undang Undang No 18 Tahun 1965 ;Undang Undang No 5 1974 dan terakhir yang berlaku saat ini dan disebut sebut akan direvisi itu adalah Undang Undang No.22 Tahun 1999. Kalau kita cermati UU Nomor 22 Tahun 1999 azas desentralisasi itu bersifat devolusi,yaitu desentralisasi dalam arti yang sebenarnya yang populer disebut dengan "pemberian otonomi" yang oleh Bintoro Tjokroamdjoko menyebutnya sebagai suatu delegasi kewenangan secara hukum,yang berarti penyerahan tugas tugas pemerintahan kepada tingkat daerah yang tidak saja bersifat administrative ,tetapi dengan demikian juga bersifat politik ,yaitu pengambilan keputusan terakhir pada bidang bidang tertentu diserahkan kepada pemerintah daerah Desentralisasi di bawah Undang Undang No . 22 Tahun 1999,Kepala Daerah tidak lagi merangkap sebagai kepala wilayah,demikian halnya daerah kabupaten dan kota tidak merangkap sebagai daerah administrasi .

Terdapat penguatan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawas terhadap eksekutif sebagai konsekuensi pemilihan dan penetapan kepala daerah oleh DPRD dan prinsip "accountability" kepada rakyat dari otonomi yang menekankan prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat. Namun demikian pengendalian Pemerintah Pusat masih mendominasi kebebasan daerah yang jauh dari sekedar menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Pernyataan ini dikemukakan oleh Syamsul Bachri dengan mengambil contoh pada pasal 32 ayat (3) ,bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah ,Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada DPRD.Namundemikian ketentuan ini dibatasi kemudian oleh ayat (4) .dimana Peraturan Tata Tertib DPRD yang mengatur tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah masih harus disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Demikian halnya dengan tatacara pertanggungjawaban Kepala Daerah yang ditolak untuk kedua kalinya oleh DPRD ditetapkan oleh Pemerintah .

DPRD tidak berwenang membuat peraturan tata tertib yang isinya tentang pengusulan pemberhentian Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya Posisi lemah DPRD seperti itu yang menurut konstitusi keberadaannya untuk

memberi sugesti sekaligus legitimasi bahwa di daerahpun pemerintahan dilaksanakan musyawarah akan semakin tersudut dengan adanya keinginan dari konsep revisi bahwa DPRD dapat dibubarkan oleh Presiden. Kalau demikian bagaimana tinjauan kita terhadap demokrasi pemerintahan daerah.***

Masyarakat primitif ancumannya adalah binatang buas.
Masyarakat modern ancumannya adalah sesama manusia

MENGATASI KLEPTOKRASI



M. Idris Patarai

Dalam terminologi korupsi, dikenal istilah kleptokrasi : suatu pemerintahan yang dipimpin oleh para pencuri. Ada dua ciri pemerintahan yang demikian, pertama jika pemerintah tidak lagi malu malu mencuri; dan kedua, jika pencurian itu telah direncanakan.

Tidak malu malu mencuri, ditandai gaya hidup aparat yang hedonis, pola hidup "bermerek", alias semua yang melekat di badan, kasat mata dan tidak kasat mata, seluruhnya berasal dari produk berlabel alias dunia mengetahuinya. Jika kita sempatkan untuk menghitung hitung ongkos seluruh gaya hidup ini sangat tidak sepadan dengan pendapatan sebagai layaknya pegawai negeri. Mudah ditebak, aparat seperti inilah yang dimaksud tidak malu malu mencuri. Melalui gaya hidupnya itu, sesungguhnya ia mempertontonkan, dengan tanpa malu malu, bahwa ia sesungguhnya pencuri , lihai memainkan administrasi (*Administrative Corruption*) .

Jika kita menyaksikan kegemerlapan yang berlimpah dari *streettips* pejabat sipil atau kaum birokrat *hedonis* ini, hidup tanpa kepekaan berdampingan dengan kemiskinan maka ketidakmaluan mencuri itu sesungguhnya dimulai dari mengikisnya kepekaan sosial (*responsivenees*). Sama sekali tidak merasa gagal dengan peristiwa busung lapar, sama sekali tidak tersentuh dengan berita anak kurang gizi. Tidak tertantang dengan kemiskinan dan ketidak berdayaan masyarakat menghadapi tekanan hidup yang begitu menghimpit. Seakan semua itu alami adanya. Paling tidak mereka berpledoi "itu bukan dibawah kordinasi saya ", atau "bukan tupoksi saya ". Malapetaka ! Mereka seakan tak terintegrasi sebagai satu kesatuan kinerja, menyeluruh, *team work*. Nampaknya *responsivenees* sebagai hipotetis berkinerja baik perlu dirumuskan ulang.

Lain halnya dengan ciri kedua *kleptokrasi*, pencurian yang direncanakan. Ciri ini ditandai dengan korupsi yang dilakukan bukan lagi karena faktor kebetulan, semacam gratifikasi, penyuapan, pemerasan. Pencurian dengan gaya direncanakan lebih sistimatis, jejaring, baik internal eksekutif maupun dengan lembaga legislatif, institusi yang memiliki kebijakan *budgeting*. Biasanya pencurian gaya ini dilakukan pada saat penyusunan anggaran, baik pokok, maupun perubahan.

Sesungguhnya tipe ini sepintas lalu sangatlah legal, yaitu ketika unsur legislatif meminta porsi anggaran bagi konstituen yang diwakilinya, atau ngotot memperjuangkan hasil *research* untuk masuk dalam skema penganggaran, semua itu wajar dan perlu. Namun sayangnya fenomena seperti itu sering sekali dihindari kepentingan pribadi atau partai. Hal terakhir mencuat pada berbagai kasus yang menjerat oknum Kepala Daerah, Sekda maupun oknum Anggota DPRD ataupun DPR kita.

Kiranya pembenahan sistim perencanaan pembangunan yang *top down and buten up* perlu dievaluasi. Musrenbang sudah tidak efektif, tidak tepat lagi diandalkan sebagai satu satunya mekanisme perencanaan, institusi perencanaan maupun sebagai koridor perencanaan. *Research* DPRD menawarkan metode tersendiri bagi penyarapan aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Begitu juga dengan sistim proporsional terbuka. Sistim ini berkonsekwensi pada terbentuknya sistim pembinaan wilayah bagi konstituen anggota legislatif. Hal ini selanjutnya memungkinkan seorang anggota legislatif memiliki akuntabilitas parlemen ditopang kemampuan merealisasi aspirasi masyarakat pemilihnya.

Kiranya mekanisme *research* dan sistim proporsional terbuka saatnya didorong untuk menjadi mekanisme perencanaan dan penganggaran. Hanya saja faktor manusia sering membawa hal ini larut dalam gaya kleptokrasi bila sudah masuk pada ranah kepentingan partai (model predatory) dan atau kepentingan pribadi dengan apa yang disebut dengan *state capture*. Patut direnungkan. **(M.Idris Patarai, penasehat spiritual Komite Pemantau Legislatif Indonesia (Kopel), Jl. Batuaraya Makassar.**

KITA DAN KPK

Oleh : M.Idris Patarai

Setahu saya, KPK itu tersendiri, bukan siapa siapa bagi kita, kita tidak memiliki kekerabatan dengannya. KPK juga tentu berpandangan demikian terhadap kita. KPK itu memiliki doktrin "setiap orang berpotensi korupsi", *under estimate* selalu. Setidaknya inilah kesan tersimpn pada saya selama bergaul dengannya. Kantornya dulu tidak semega sekarang, memang dia selalu *make barang bekas, numpang*. Banyak yang prihatin pada dia kini, lawannya *gede*.

Setidaknya saya punya waktu 5 (lima) tahun bersentuhan KPK , tetapi itu tidak berarti bergumul, bersama selalu. ketemu terus atau nongkron, semacam bekerja di situ, tidak. Saya hanya punya hubungan program, dan program ini membuat saya berkenalan dengan beberapa tokoh anti korupsi: TII (transarany international Indonesia), ICW (Indonesia Corruption Watch), Kopel (Komite Pemantau Legislatif), termasuk ketua KPK sekarang, Abraham Samad.

Pengalaman bergaul KPK membuat saya sedikit mengenal tabiatnya, selalu sigap terhadap gejala dan kemungkinan korup, kembali pada yang tadi: setiap individu dan institusi berpotensi korup, termasuk dirinya,KPK. Hal ini kemudian saya kenang-kenang selalu tatkala mencuat kasus pengadaan Al Quran di Kementerian Agama – invisible menurut awam.

Saya kenal tabiatnya, sekalipun saya tidak mengerti dan *ngah*. Dulu jika ada yang menelpon : "Saya dari KPK", maka maaf, saya langsung menduga , dia bukan KPK. Belum lagi jika dia minta dijemput, ditemui di hotelnya atau nada bicaranya keras menekan, pastilah dia bukan KPK, tutup saja telepon. Menurut teman saya: introgasinya mengelus elus, materinya seperti tidak ada hubungannya dengan kasus. Itu pada awalnya mungkin. Dia juga mengetahui sesuatu, bukan dari apa yang disampaikan padanya.

Saya punya pengalaman amat menggoda, seseorang pada satu acara bertanya : "Apakah setelah tidak ada koruptor KPK juga bubar ?", lugu, segenap hadirin terhenyak .

Jawabannya ketika itu : Perbuatan korupsi itu laten. Mungkin saja KPK bubar sebelum Koruptor tuntas.

Koruptor itu tidak hanya merasa sedang dicari, dibuntuti lalu vakum, tidak. Dia sibuk menyusun strategi, melakukan perlawanan. Koruptor itu tidak diam dan tidak kesepian, karena dia tidak sendiri, dia banyak kawan, dia punya gerakan bawah tanah, sistimatis dan punya mekanisme mengendap endap. Dia punya keanggotaan luarbiasa, *stelsel passif*. Bahkan mungkin dia "meminjam" atribut penegak hukum.

Di masa Orde Lama, khususnya Kabinet Juanda tercatat dua kali dibentuk badan pemberantasan korupsi. Pertama, melalui Undang-Undang Keadaan Bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (*Paran*). Dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Kepada *Paran* inilah semua pejabat harus menyampaikan data mengenai pejabat tersebut dalam bentuk isian formulir yang disediakan, mungkin semacam LHKPN sekarang. Mudah ditebak, model perlawanan para pejabat yang korup pada saat itu adalah bereaksi keras dengan dalih yuridis : doktrin pertanggungjawaban secara langsung kepada Presiden, Formulir itupun tidak diserahkan kepada Paran, tapi langsung kepada Presiden. Diimbuhi dengan kekacauan politik, Paran berakhir tragis, *deadlock*, dan akhirnya menyerahkan kembali pelaksanaan tugasnya kepada Kabinet Djuanda.

Setelah Paran, disusul Operasi Budhi , pemerintah menunjuk A.H. Nasution, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan/Kasab, dibantu oleh Wiryo Prodjodikusumo untuk menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi. Alasan politis menjadi penghalang efektivitas lembaga ini, sebelum akhirnya berakhir.

Pada masa awal Orde Baru, dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), yang diketuai Jaksa Agung. Namun, ternyata ketidakseriusan TPK mulai dipertanyakan dan berujung pada kebijakan Soeharto untuk menunjuk Komite Empat beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Empat tokoh bersih ini jadi tanpa taji ketika hasil temuan

atas kasus korupsi di Pertamina, sama sekali tidak digubris oleh pemerintah. Lemahnya posisi komite ini pun menjadi alasan utama berakhir.

Lain lagi ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, Dibentuklah Operasi Tertib (Opstib) dengan tugas antara lain juga memberantas korupsi. Perselisihan pendapat mengenai metode pemberantasan korupsi yang *bottom up* atau *top down* di kalangan pemberantas korupsi itu sendiri cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Opstib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru.

Tibalah kita di era kita ini, reformasi. Usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman.

Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, melalui suatu *judicial review* Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan nasibnya sama dengan KPKPN, dan terakhir KPK. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis yang kita punyai sekarang.

Tidak kurang dari 6 (enam) undang undang yang ada di belakang KPK, selain undang-undangnya sendiri, UU No. 30 Tahun 2002. Terdapat 2 (dua) PP (Peraturan Pemerintah). Semua itu akan semu bila tanpa komitmen secara massif, tanpa perubahan sikap masih permisif terhadap korupsi: dibayar bayar untuk memilih, mau bayar asalkan menang tender, masuk sekolah, masuk bekeja serta sikap tanpa keberanian "melawan" pimpinan yang korup, maka KPK akan senasib rekannya terdahulu. Sesungguhnya pemberantasan korupsi tidak mempan hanya melalui institusi, harus melalui sistim dan mekanisme. Menurut teman saya ini terapi merawat KPK.

Menjaga KPK secara ekspressif dan empirik, bukan berarti kita harus peduli melalui "saweran gedung baru". Jikapun itu terjadi, maka KPK akan berkantor di kantor yang mungkin saja dari uang korup. Ironi. Itulah sebabnya saya tidak percaya, anda juga tentu: KPK mau menerima hasil "saweran gedung baru". Jika dia menerima , itulah awal kita

kehilangan KPK. Namun kita patut menduga, saweran itu hanya simbolis. Jika, dibaliknya kita cinta KPK. ***

KONG X KONG = KONG KONG

Oleh : M. Idris Patarai



Presiden pada Rapat Kabinet Indonesia Bersatu, 24 Juli 2012, memberi statemen yang sebenarnya bukan hal baru, namun menjadi menarik karena diungkap secara fulgar dan oleh presiden. Sekalipun demikian tidak sedikit pengamat, akademisi, termasuk dari kalangan Non Government Organization (NGO) anti korupsi tetap skeptis dan akhirnya kembali pada stikma: mengaduh ke rakyat atau *ngeluh*.

Entah apa motifnya presiden mengeluarkan pernyataan demikian, namun itu cukup membuat kalangan DPR kegerahan dan anggota kabinet berjaga jaga, kalau kalau...! Menurut presiden sudah 8 (delapan) tahun pmmberantasan korupsi menjadi agenda pemerintahannya. Upaya 8 (delapan) tahun itu sangat memungkinkan kita berharap terdapat perubahan, namun apa yang terjadi korupsi makin marak, tetap saja ada yang bermain main dan melihat upaya upaya itu sekedar dangelan.

Daya tarik korupsi sangat luar biasa, sehingga dapat menjadi prilaku yang disenangi dan disukai, sekalipun dalam bahasa aslinya (Latin) : *corruptio – corrumpere* berarti busuk, rusak. Dalam The Lexicob Webster Dictionary (1978) diartikan: kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral atau penyimpangan dari kesucian. Terakhir, presiden kita menyebutnya “kongkalikong”.

Kongkalikong sesungguhnya kita kenal sebagai persekongkolan antara beberapa pihak dan -selama ini- diasumsikan pada persekongkolan melakukan hal hal negatif. Artinya, kongkalikong berkonotasi buruk, tepat seperti *corrumpere* itu.

Kongkalikong khususnya dilakukan atau sesuai dugaan presiden berlangsung pada saat saat pembahasan, perumusan anggaran, antara eksekutif dengan legislatif. Jika demikian halnya kejadian seperti ini tidak hanya di tingkat APBN tetapi juga di tingkat APBD,

bukan hanya di tingkat kementerian, akan tetapi juga di tingkat SKPD. Malangnya lagi hal ini bisa terjadi atas sepengetahuan atau diketahui atasan. Katakanlah seperti kasus suap pembahasan anggaran yang melibatkan Sekretaris Daerah Semarang dengan kalangan Anggota DPRD setempat. "Wali Kota Semarang Tahu Suap DPRD" (Kompas, 24 Juli 2012).

Pertanyaan besarnya : Seperti apa proses perencanaan dan penganggaran di kelola ? Apakah memang sistim kita memungkinkan kongkalikong itu ? Kita tentu tidak boleh serta merta menyalahkan sistim perencanaan dan penganggaran semata, mengingat korupsi itu merambah di mana mana, bukan hanya pada hal hal yang berkait dengan apa yang sedang kita bicarakan. Kongkalikong nampaknya hanyalah salah satu modus yang bersumber dari sebuah sebab yang *simplikatit*.

Sesungguhnya korupsi model kongkalikong dikenal juga dalam terminologie korupsi dengan istilah "kleptokrasi". Kleptokrasi biasanya diterjemahkan secara terbuka sebagai suatu kondisi dimana negara dipimpin oleh para pencuri. Ada dua ciri negara kleptokrasi, yakni ketika pemerintah tidak lagi malu malu mencuri; dan yang kedua ketika pemerintah berperilaku merencanakan pencurian.

Pencurian yang direncanakan itulah yang bermotif kongkalikong antara pihak legislatif dengan eksekutif. Di tingkat daerah misalnya, modus operandinya berlangsung pada saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dimana kedua hal ini diputuskan dan ditandatangani bersama sebagai kesepakatan eksekutif – legislatif. Dilemanya adalah, jika tidak ditemukan kesepakatan, risikonya dapat berupa alotnya pembahasan. Sementara penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu merupakan target prestasi kepemimpinan daerah, bahkan tidak jarang daerah mendapat reward pemerintah pusat atas prestasi ini. Artinya kepala daerah berkepentingan dengan pembahasan APBD tepat waktu, sesuai kalender anggaran dan langka kita temukan Kepala Daerah menggunakan anggaran tahun lalu, jika anggaran tahun berjalan tidak mendapat restu DPRD. Akibatnya kongkalikong tidak dapat dihindari. Serunya lagi, jika pihak eksekutif juga memiliki rencana kleptokrasi tersendiri.

Di tingkat kementerian dan lembaga modus yang sama lebih gila lagi. Hal ini bisa terjadi karena volume atau jumlah anggaran yang diurus jauh lebih besar, ratusan triliun

rupiah anggaran negara. Penemuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) menyebutkan dari sekitar 1000 LTKM yang dianalisis, terdapat 10 Anggota Banggar terindikasi korupsi berdasarkan frekwensi transaksi keuangan mereka yang dapat mencapai puluhan milyar rupiah tiap transaksi. Hal ini tidak sesuai dengan profilnya sebagai anggota DPR (Kompas, 27 Juli 2012).

Jika kondisi ini sudah terkooptasi sedemikian rupa menerpa pejabat publik, sementara masyarakat yang diharap menjadi institusi terluas pengawas penyelenggaraan pemerintahan vakum, bahkan mungkin sudah ada tokoh tokohnya terkolaborasi dalam sistim yang terbangun secara mutual-resfek. Secara majemuk mereka berjamaah, mungkin terjebak dalam kegetiran kesepian secara eksklusif di tengah sorak sorai kehidupan hedonis materialis di tengah kondisi politik mumpuni sekarang ini. Atau masyarakat kita yang telah lama malang melintang terjebak dalam tekanan "kehidupan hari hari" menjadi permisif terhadap perilaku korup yang memberi keuntungan pada mereka secara instan.

Saya jadi khawatir, jika apa yang menjadi sinyalemen sahabat saya yang ia kemukakan dalam satu seminar, bahwa para pejabat publik yang lahir dari pilihan kita, diantaranya sudah ada yang kehilangan nurani, kehilangan ketulusan dan kehilangan nilai moral. Mungkin kita salah pilih, tetapi itu tidak bisa kita sesali, karena KPU telah merumuskan angka angka itu secara kualitatif menjadi seorang pemimpin. Kalaupun ada yang patut kita sesali, jika seandainya tempohari ketika kita memilih, kita diberi imbalan berupa natura, uang dan muka manis, tertipu. Itu yang mesti kita tinjau kembali.

Di negeri kita ini, ada yang segera harus dibenahi dan ditemukan kembali. Ada yang hilang, yaitu apa yang disebutkan oleh pendiri negeri ini sebagai keinginan luhur. Dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, keinginan luhur terdapat dalam satu alenia: Berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur....". Keinginan luhur ini yang luntur, keinginan yang menjadi inti dari cita cita merdeka, keinginan yang kemudian mendapat rahmat yang membuahkan negara.

Saran terbesarnya untuk republik yang akan kita lanjutkan pemeliharaannya ini, dapatkah diberi gelar kepada mereka yang kehilangan keinginan luhur itu sebagai Kong Kong? Mumpung kita mendapat tambahan perbendaharaan kata tentang korupsi:

kongkalikong. Untuk sempurnanya kita tambahkan hal ini dan menjadi: Kong x Kong = Kongkong. Sekedar diketahui kongkong dalam bahasa Bugis Makassar artinya Anjing!

CALON SEKKOT MAKASSAR, KENAPA BERSOAL ?

(Sepenggal Pelajaran Pilkada)



M. Idris Patarai

Anda tentu tidak terperangah membaca judul tulisan ini, namun Anda akan tertarik jika melihat penulisnya. Saya yakin itu, karena saya bisa menjadi bahagian dari soal itu. Sepintas sesungguhnya soal ini biasa saja, namun sebenarnya kompleks, tidak sederhana. Oleh karena itu kita batasi diri membicarakannya, kita ungkap sisi sisi tertentu yang bisa memberi pelajaran bermakna bagi manajemen pemerintahan ke depan.

Sekkot (Sekda) adalah jabatan karir, yaitu hanya diperuntukkan bagi pegawai negeri yang berkarir, atau telah melewati jenjang karir secara alang melintang tentunya. Selain itu kiranya perlu ditegaskan, bahwa Sekkot sebagai jabatan karir ialah karena tidak untuk diperebutkan dalam mekanisme politik, sekalipun dulu seseorang tidak dapat menjadi Sekda (sekkot) jika tidak mendapat rekomendasi DPRD. Itulah sebabnya tempohari disebutkan pejabat sekda dipilih dari pejabat karir dan mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari DPRD.

Tidak hanya itu, jabatan Sekkot tegas sebagai jabatan karir, yaitu untuk memahami betapa strategisnya jabatan ini dan adalah jabatan puncak karir PNS di daerah. Begitu strategisnya sehingga pejabatnya berdimensi struktural, melalui proses seleksi berjenjang. Sudah jelas pada mekanisme itu terselip aspek capacity building, wawasan ke-Indonesiaan, integritas kebangsaan, dan yang pasti jejak karir dan asal muasal calon pejabatnya adalah “orang pemerintahan” (maaf), kapasitas dan kompetensinya tidak diragukan.

Saya masih ingat, ketika masih berkarir di pemerintah Kota Makassar, Supomo Guntur (Wawali Makassar-) menyampaikan secara gamblang ke saya bahwa pejabat Sekda itu mesti “orang clear”. Saya tidak bisa menduga secara pasti apa yang beliau maksud

sebagai orang clear, yang saya ingat ketika itu beliau juga menyebut kata moral. Akhirnya saya hanya meraba raba bahwa mungkin yang dimaksud adalah calon Sekkot itu adalah orang “diterima” di masyarakat, di terima secara internal, di terima secara eksternal–berjenjang. Apakah kita akan memperluas ini, tidak, kita sudah hal ini di sini.

Kita alihkan ke hal hal yang lebih konstruktif bagi publik, yang bisa mmberi pelajaran bermakna bagi manajemen pemerintahan ke depan. Untuk itu mari kita analisis beberapa kejanggalaan kejanggalaan dalam proses Sekkot Makassar. Hal hal tersebut dapat diurai sebagai berikut : Pertama, tidak bisa dinapikan bahwa pengusulan penggantian Sekkot Makassar sesuatu yang amat terlambat. Disamping terlambat karena prosesnya harus dilakukan jauh sebelum pejabat Sekkot yang ada berakhir, minimal 6 bulan, juga terlambat karena tidak diantisipasi jauh hari sebelumnya, termasuk siapa-siapa yang akan menduduki jabatan itu. Mestinya sudah tersosialisasi, terkomunikasi, terkodifikasi, sehingga tercegah masuk dalam mekanisme kompetitif destruktif Kedua, kejanggalaan berikutnya adalah bahwa proses pengusulan jabatan Sekkot itu dilakukan setelah penyelenggaraan mutasi SKPD di jajaran Pemerintah Kota secara massif. Semestinya yang didahulukan itu adalah pengisian Jabatan Sekkot, mengingat Sekkot adalah Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) yang mengelola mutasi pegawai. Ketiga, Kejanggalaan yang lain adalah kenapa mesti mengajukan calon Sekkot dari pejabat yang masa karir kepegawaian telah mengalami perpanjangan, apakah tidak ada upaya upaya konsultatif konstruktif yang mendahului bahwa yang demikian itu apakah efektif atau apakah memenuhi kriteria umur. Keempat, Seterusnya kenapa urusan Sekkot ini berlarut larut, mulai sejak penolakan Mendagri yang suratnya tertanggal 24 April dan nanti muncul polemiknya di awal Juni, ada apa? Kelima, Akibatnya tidak bisa dielakkan timbulnya ketegangan antara pengelola kepegawaian propinsi dengan Walikota Makassar, karena adanya kalimat samar samar yang berdimensi manipulative, samar samar Walikota mendiskreditkan pejabat tingkat atasnya dalam menanggapi surat Mendagri yang dikirim kepada Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

Mengapa begitu rumit ? Patut diduga hal hal sebagai berikut : Di dalam pengelolaan Sekkot itu terdapat conflict interest, yaitu karena pengelola kepegawaian juga mengincar jabatan Sekkot tersebut. Seterusnya Ketidakadaan transparency – keterlibatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) patut diduga tidak efektif. Terkesan pengelola kepegawaian “memaini” Walikota dengan menyembunyikan dan tidak menjelaskan atau mendiskusikan syarat umur efektif Calon Sekkot sesuai ketentuan.

Kalaupun semua itu atas sepengetahuan Walikota , maka berarti semuanya adalah “permainan” bersama, hanya saja patut disesali bahwa permainan itu tidak cerdas, karena pada akhirnya ada pihak yang tercederai, diperdaya, terkesan sekedar back vocal. Justru yang menjadi back itu, bagi masyarakat, menilai lebih senior daripada yang diunggulkan sebagai putera mahkota.

Hal menarik selanjutnya, yaitu seputar terbitnya rekomendasi Kemendagri menetapkan Agar Jaya sebagai Sekkot definitif setelah sekian bulan dan sebelumnya ditolak. Seperti diketahui, kisah penolakan sebelumnya itu meminta Pemerintah Kota Makassar mengusulkan nama baru, namun hal itu tidak dilakukan Pemerintah Kota Makassar, “Pemkot bersikukuh tidak mengirimkan tiga nama calon baru” (Fajar,28 Juli 2012), luar biasa ! Namun siapapun yang “kejatuhan bintang” (mendapatkan rahmat) saat ini, dia telah mengakhiri polemik Calon Sekkot Makassar yang berlarut larut sejak 1 Maret (Tribun Timur,3 Agustus 2012).

Hal yang pasti dan patut kita keluhkan ialah bahwa dalam persoalan Sekkot ini Wakil Walikota (Wawali) tidak dilibatkan. Kalaupun dilibatkan, paling tidak hanya di “say hello” saja.

Sesungguhnya umum memahami jika Walikota Makassar, bisa saja, tidak tahu persis hal hal teknis kepegawaian, mengingat beliau bukan pegawai karir (PNS), tetapi bukankah beliau harus di backup satu badan yang legitiimate untuk urusan itu.

Sesungguhnya pula trick yang digunakan dalam Pilkada, khususnya dalam hal pemaketan calon. Berbagai proses pemaketan Kepala Daerah (01 dan 02) selalu direkayasa antara pejabat karir dengan politisi atau privat sector (pengusaha). Strategi ini dimaksudkan agar keduanya saling mengisi dan untuk memberi expectancy kepada masyarakat (voter) bahwa pasangan calon dimaksud sudah paripurna. Namun konvensi ini tidaklah efektif jika kedua pigur setelah terpilih mengalami disharmoni, tidak berkonsultasi lagi dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam soal Sekkot Makassar, berani saya bertaruh, bahwa Wawali tidak dilibatkan, karena kalau dilibatkan masalahnya tidak serumit tempohari. Satu masalah heboh yang spesifik kasuistis, yang tidak pernah terjadi dalam sejarah pengajuan Sekkot, bahkan di era Orde Baru sekalipun. Suatu tragedy yang bisa memberi pelajaran bermakna bagi manajemen pemerintahan ke depan.

Sangat disayangkan (maaf,saya memakai kata sayang, satu kata yang diharapkan dimiliki segenap insani) jika dugaan saya benar, Wawali tidak dimintai pendapat, mengingat Wawali Makassar saat ini Drs. H.Supomo Guntur,MM adalah mantan Sekkot Makassar. Lebih mendasar lagi, mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan. Tentu memahami dan berpengalaman dalam konteks ini.

Atas semua itu, patut dibenarkan jika ada yang mengatakan bahwa masalah Sekkot Makassar adalah masalah yang bertumpuk, yaitu masalah yang timbul karena adanya masalah sebelumnya. Masalah sebelumnya yakni disharmoni itu tadi. Mari jadikan hal ini sebagai Pelajaran Pilkada, terkhusus untuk para calon wakil.

Daerah dan Negara

Oleh : M.Idris Patarai

Istilah daerah bukan hal yang asing bagi kita, itu pasti. Lasim disebut, terutama di era hangat hangatnya orang bicara otonomi: otonomi daerah. Hal merisaukan mengenai istilah ini sekarang adalah adanya aroma diskriminatif: putera daerah. Bagaimana kita melihat hal ini dalam kacamata pembangunan daerah dan perilaku politik menjelang Pilpres. Tulisan ini akan mengulasnya dalam penggalan: putera daerah, pembangunan daerah dan capres daerah.

Putera Daerah

Pertanyaan mendasar yang pertama patut kita ajukan kepada putera-puteri Indonesia adalah: Seperti apa legitimasinya sehingga putera daerah dijadikan klausul politik ? Saya khawatir jika putera daerah yang samar samar kita pahami kerangka berpikirnya dalam konstalasi berbangsa, berhembus kencang, maka keluarga yang tersebar di penjuru tanah air sebagai pejabat penting tergusur pula. Lalu apakah daerah kelahiran siap menampung seluruhnya ? Oh, saya jadi ingat pemilik toko yang melarang saya parkir kendaraan depan tokonya karena belanja saya di toko sebelah. Tempat parkir itu ruang publik bung ! Daerah, adalah wilayah milik publik. Tentang ini, kita pinjam analisa Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1795): otonomie des willens adalah sumber universalitas, kepublikan dari heteronomi. Berbagi !

Tentu kita masih ingat tempohari di awal Juni lalu, terjadi peristiwa pengerahan massa menolak hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Semen Tonasa. Pasalnya hasil RUPS yang menetapkan Komisaris BUMN itu tidak mengakomodasi putera daerah yang dimakud para pegunjuk rasa. Apa gerangan? Hipotesis tulisan ini tidak akan masuk ke masalah seruh di daerah tempat pabrik semen itu berdiri, Tonasa. Tidak masuk pada ranah kasusnya atas kesadaran bahwa gejolak itu hanyalah eksekusi dari kegagalan kita membangun capacity building selama ini dalam perjuangan mewujudkan nation state, negara bangsa.

Moeljarto Tjokrowinoto (1996) menasehatkan agar kita memantapkan wawasan kebangsaan sebagai nilai bersama (shared value), sebagai symbol politik bersama

(Common political symbol) dan yang menghubungkan kita menghadapi tantangan bersama (Inter subjective awareness), sebagai kekuatan generasi sekarang meneruskan cita-cita pendahulu (Solidarity generating force). Wawasan Kebangsaan, tidak lain adalah cara pandang kita terhadap Bangsa ini dalam bernegara.

Pertanyaan besarnya : apakah putera daerah mengandung nilai yang ditaati (value judgment) dan apakah memiliki favourable value orientation, sesuatu yang menguntungkan dalam pembangunan yang meliputi perubahan sosial sebagai special case dari pembangunan.

Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah yang variatif dalam skala desentralisasi, idealnya tetap dapat terkontrol dalam satu tatanan koordinasi dan integrasi secara nasional, baik dari segi perencanaan maupun regulasi dan pembiayaan. Pembangunan daerah sesungguhnya adalah pembangunan nasional yang diletakkan di daerah; atau sebaliknya pembangunan daerah adalah bagian integral dari pembangunan nasional. Pembangunan daerah tidak identik dengan putera daerah. Adalah satu kekeliruan yang amat sangat jika kita menilai daerah hanya bisa dibangun oleh putera daerah.

Kita memang mengenal dimensi ruang, wilayah pembangunan yang memandang daerah sebagai entity tunggal (Heaphy,1971). Namun hal ini tidak dikenal dalam skala pembangunan nasional. Sistem perencanaan kita menganut pendekatan daerah, bottom up, dan pendekatan top down- kewilayahan. Pendekatan ini untuk mencegah terjadinya kesenjangan antar daerah dan mendorong terciptanya pemerataan dalam bernegara.

Azas pemerataan pembangunan daerah menandakan : Rakyat memiliki kemampuan, kesempatan dan kebebasan dalam banyak hal, salah satunya berperan dalam pembangunan daerah, sektor, dan nasional sesuai dengan kemampuan. Perwujudan azas pemerataan itu diejawantahkan dalam berbagai esensi kehidupan yang merefleksikan bahwa pembangunan daerah memberi ruang bagi rakyat Indonesia memperoleh keadilan dan kebebasan sesuai dengan hak azasi manusia. Azas Pemerataan Pembangunan ini jelas tidak mengakomodasi perilaku diskriminatif – primordial yang disebut: putera daerah.

Capres Daerah

Di Jakarta, pertengahan Juni lalu, dalam Rapimnas Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), saya berkesempatan bertemu Abu Rizal Bakri (ARB). Beliau membawakan materi mewakili pengusaha. Di kesempatan itu saya menyampaikan kritik terhadap iklan beliau yang saya duga jualan calon presiden. Iklan yang ditayangkan di TV-one itu tidak dapat menyembunyikan keinginan ARB untuk disebut sudah menjawa. Episode itu berusaha menggambarkan ARB peduli budaya Jawa, mengenalkan isterinya sebagai puteri Jawa. Saya menilai iklan itu sarat target namun akhirnya sangat primordial. Iklan yang berdurasi beberapa menit itu jelas tidak memperlihatkan sosok ARB secara eksistensial, begitu kata saya .

Ketika itu saya ingat menyampaikan bahwa Soekarno menjadi Presiden bukan karena dia “orang Jawa”, tetapi karena dia memiliki identitas ke-Indonesia-an, pengungkit rasa bernegara. Saya mengkritik ARB karena iklan itu sangat menyentuh rasa ke-Indonesia-an saya. Iklan itu terjebak dalam pemikiran pragmatis, kedaerahan. Ketakutan pada pameo : Hanya Orang Jawa yang bisa jadi Presiden. Mari buktikan, ini Indonesia.

Nampaknya kita tak henti hentinya berselisih paham terhadap hal yang sesungguhnya sudah selesai sejak pendahulu kita mendeklarasikan diri sebagai bangsa Indonesia, bahkan sebelum lahirnya negara. Saya khawatir pembangunan yang berproses dengan berbagai dimensinya telah memberangus nilai-nilai yang dianut. Pembangunan tidak patut mengorbankan nilai, dan jika itu terjadi, maka pembangunan yang dilaksanakan dapat diklasifikasi sebagai sesat.

Nampaknya juga kita masih harus berlatih untuk siap menerima perubahan sosial, modernisasi dan industrialisasi yang merupakan a single facet pembangunan (Gouled,1977).

Masih hangat dalam benak, di Makassar tempohari, menjelang Pilpres 2009, seorang tokoh nasional berpidato dalam satu orasi politik – kampanye : “...belum saatnya orang Sulawesi Selatan menjadi Presiden”. Waktu itu Jusuf Kalla (JK) berpasangan Wiranto (JK-Win). Ungkapan tokoh nasional yang kelak jadi menteri itu bergemuruh sama gemuruhnya orang mencerca ungkapan yang berpandangan kedaerahan yang melukai itu. Banyak yang sedih, bahkan menimbulkan huru-hara dan kegalauan setelahnya. Luka yang ditimbulkan akan lama sembuh, bahkan bisa kronis.

Kini di tingkat lokal, terbaca satu kepentingan praktis menggulirkan Jusuf Kalla (JK) untuk men-capres lagi di 2014. Saya mulai merinding, mengingat JK itu sudah menjadi asset nasional, milik anak bangsa. Teman saya menilai, bola yang digulirkan itu sama dengan mengkerdilkan JK, memasukan JK dalam ranah pro-kontra untuk kepentingan politik lokal. Andai JK digulirkan dari daerah lain, menurut saya: itu baru Indonesia. Mungkin juga perlu kita bertanya kembali pada tokoh nasional kita tempo hari: Apakah sudah waktunya Pak ...?

KAMPANYE HITAM DAN MOTIF DIBALIKNYA

Oleh M. Idris Patarai

Membicarakan judul tulisan ini, saya jadi ingat ketika belajar di Lee Kuan Yew School of Public Policy tentang Leadership in Local Government. Manuel E. Contreras dari Inter-American Development Bank (IADB) menyampaikan dalam kelas, bahwa janganlah pernah berharap, lawan politik Anda akan berbuat baik pada Anda, imposible ! Kecuali jika lawan Anda itu sudah mendengar bahwa peti mati Anda sudah dipesan. Itupun kalau dia sudah pastikan bahwa peti mati itu telah lunas dan benar benar di antar ke alamat Anda. Kejam kan ?

Jika akhir akhir ini kita sudah mendengar dan mendapati adanya kampanye hitam (black camping), terkhusus untuk Pilgub yang akan di gelar tahun depan. Itu adalah sebuah aksioma politik. Bagi seorang pigur yang kuat seyogysnys menilai yang demikian itu sebagai pertanda: Ia benar benar susah dilumpuhkan, sehingga lawan politik bersusah susah mencari cara cara kelim karena tidak lagi mampu melakukan fair play di tempat terang. Akan semakin melegakan kalau kita sadari bahwa masyarakat kita dewasa ini sudah melek politik, sejak adanya pola pola pemilihan yang melibatkan mereka secara empirik, dan mereka akhirnya bisa mengklassifikasi informasi.

Imam Mujahidin Fahmid, Tim dari Pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang ketika melakukan back counter, melakukan survei menanyakan kepada masyarakat pengaruh kampanye hitam yang diarahkan kepada calonnya menyebutkan hasil polingnya bahwa 87 % tidak percaya, 12% tidak menjawab dan selebihnya ragu-ragu.

Sebuah brosur, tabloid atau apapun namanya yang tidak mencantumkan alamat dan identitas serta inisial keberadaan pembuatnya patut dinilai sebagai tindakan tidak bertanggungjawab. Tindakan seperti itu akan menuai antipati masyarakat. Secara tak terduga trend ini menumbuhkan kebencian terhadap kesadisan; sebaliknya masyarakat akan memberi rasa hormat, simpati, keprihatinan, bahkan keberpihakan bagi yang dicerca kampanye hitam. Dari sini, kampanye hitam itu sudah tidak efektif di era masyarakat berpikir dan bernurani.

Sekalipun begitu, model kampanye hitam itu cukup mengganggu, apalagi jika serangannya menyangkut privasi, hantamannya cukup menyakitkan. Itulah sebabnya negara harus terlibat dalam hal hal seperti ini sebagai salah satu bentuk perlindungan negara terhadap warganya dari tindakan yang tidak melindungi kemanusiaan seseorang. Diperlukan jaminan hukum terhadap kemanusiaan (Constitutional guarantee of human rights).

Sementara memang sebuah even politik, semisal Pilkada Langsung, masing masing pihak dapat menahan diri untuk tidak masuk area area tidak proporsional. Idealnya pertarungan politik menerapkan serangan rasional, berupa penerapan kebijakan yang dinilai keliru; atau konsep konsep yang diterapkan dan dianut lawan politik tidak relevan lagi, katakanlah demikian; atau informasi serta tekanan apa saja yang dapat memberi pembelajaran politik.

Jika kita tidak mampu mengarahkan segala kekeliruan berpolitik ke hal hal yang memberi pembelajaran politik, maka asumsi masyarakat kita terhadap politik menjadi keliru dan akhirnya mereka akan mempersepsi politik sebagai hal yang buruk, bertentangan dengan rasa kemanusiaan yang akhirnya mendorongnya menjadi a-politic.

Sangat mungkin kita keliru jika kita mengidentikkan Pilkada sebagai pertarungan bebas, padahal even ini hanyalah siklus 5-tahunan sebagai mekanisme menemukan sosok pemimpin yang dapat membangun daerah. Even politik Pilkada sebaiknya kita ramu sedemikian rupa, sebab disadari, bahkan masyarakat mengetahui persis bahwa yang terlibat dalam perhelatan 5-tahunan ini adalah mereka para tokoh, cendekia yang patut dicontoh agar masyarakat kita bisa menerima politik sebagai sesuatu yang dapat membawa kemaslahatan. Pilkada atau even politik apapun, sangat didambakan dapat memberi sumbangsi kepada masyarakat tentang cara cara bernegara (civil education).

Hanna Arendt (1906-1975), seorang pemikir besar abad ke 20, mengkritik perilaku mencampuradukkan perhatian terhadap masalah masalah sosial dengan kebebasan politik. Konon di abad ini kesalahan kesalahan seperti ini menjadi perilaku atas nama kebebasan berekspresi, kebebasan politik dan demokrasi. Akibatnya tatanan sosial kemasyarakatan kita terberangus dengan menempatkan politik sebagai yang dominan.

Berbagai penelitian menunjukkan, faktor faktor yang mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pemungutan suara, semacam Pemilu ataupun Pilkada, antara lain kemampuan figur dan program yang ditawarkan. Figur bahkan dapat merubah orang yang sebelumnya a-politik menjadi terbuka dan berinisiatif memberikan suara. Demikian halnya dengan program yang memberi nilai tawar. Akan sangat berbeda jika kampanye dan proses sosialisasi politik tidak bernilai edukasi, melainkan mencerca, menaburkan kebencian secara bolak balik, hanya akan menimbulkan trauma politik yang membuat masyarakat enggan menampakkan diri dan akhirnya menempatkan mekanisme pemilihan pemimpin itu sebagai bukan urusan publik, bukan urusan kewargaan, melainkan urusan mereka para politisi dengan kalkulasi politiknya. Pesimisme masyarakat sebagai implikasi trauma politik menurunkan sikap skeptis terhadap mekanisme politik yang kemudian memunculkan resiko resiko lain yang tidak dapat dihindari lalu berujung pada perilaku passive agressive yang kemudian menularkan virus baru dengan cara mempengaruhi orang orang bertindak defensive passive, tidak percaya, bahkan mungkin berang !

Apakah sebuah kampanye menyesatkan selalu berasal dari kompetitor ? Tidak selalu. Atau apakah dia bersimpati pada kompetitor tertentu ? Secara signifikan, tidak ! Motivnya terselubung, merasa aman, karena menurutnya tuduhan pasti diarahkan kepada kompetitor lain.

Siklus dari kemelut kampanye menyesatkan pada akhirnya tidak menguntungkan siapa siapa di antara kompetitor, resiko itu bisa menimpah pihak yang menyerang atau diserang. Hanya saja jangan serta merta kita berpikir bahwa kampanye menyesatkan itu sebuah rakayasa untuk kepentingan meraih simpati. Jangan, karena itu sulit dipercaya, sebab tindakan itu bernar benar konyol.

Patut dipertimbangkan bahwa dalam perhelatan politik, lawan tidak hanya satu, dua atau sesuai jumlah kontestan. Seorang kompetitor tidak hanya menghadapir kompetitor yang lain, terutama bagi patahana (in-camben). In-camben bahkan diprediksi menghadapi konspirasi, bukan hanya konpetitor. Sebuah konspirasi bukan saja dari elit politik bahkan mungkin saja dari mereka yang non politik (bukan unsur, bukan partisipan), namun tindakannya mencetuskan effect politik.

Apa gerangan motinya ? Jika seorang patahana selama ini menerapkan kebijakan anti korupsi, menyelenggarakan proses proses pengadaan barang-jasa secara terbuka, transparan dan menganut pakta integritas, lalu kemudian menjadikan hal ini sebagai tema kampanye yang akan diterapkan, tidaklah selalu benar dan menguntungkan. Seorang teman saya dari Non Government Organization (NGO) anti korupsi bahkan mengatakan, tema itu tidak menarik. Kenapa? Masyarakat kita masih permisif terhadap korupsi.

Kalau selama ini terbangun satu kondisi pemerintahan yang berintegritas, kuat dan rapi, maka akan ada pihak yang merasa terancam untuk tidak memiliki kesempatan untuk beringinsut masuk pada kondisi yang mapan itu. Apalagi jika selama ini kalangan mereka tidak diberi ruang. Biasanya yang seperti ini, akan memberi keuntungan pada kompetitor lain dan memamfaatkannya sebagai penyedah, pencapaian sementara. Hal ini bisa disebut sebagai kepentingan salah.

Disinilah letaknya sehingga berpolitik harus dibarengi dengan berintegrasi secara berkelanjutan, berkolusi untuk menjalankan kepentingan bersama guna, merangkul dan meyakinkan. Namun sejauh apapun ini dikelola akan tetap ada lawan. Saya jadi ingat ketika mengunjungi Bapak Syahrul Yasin Limpo, di Kantornya di Gowa, ketika itu beliau Bupati Gowa. Saya bersama teman jurnalis. Pak Syahrul merajuk, berkeluh kepada saya sambil memuji bahwa saya datang tepat pada saat dia sangat "runtuh" lalu disebutnya hal yang menimpa ketika itu sebagai "kematian kecil". Secara datar sayapun menyampaikan balik, akan ada hal yang lebih besar dari ini yang akan Bapak hadapi. "Masa sih dris", demikian beliau langsung memotong. "Iyah pak", jawab saya, "karena Bapak orang besar, tantangannya selalu besar. Kalau Bapak berhenti sekarang, maka semua selesai". Dont Stop Komandan ! Tidak ada kata berhenti untuk kesejahteraan Rakyat !

GUBERNURNUR ATAU KEPALA DAERAH, SIAPA YANG PILIH

Oleh M. Idris Patarai

Tempo hari ketika mengikuti latihan kepemimpinan, dulunya disebut Adum, para peserta diberi tugas membuat kertas kerja perorangan (KKP). Bagi anda yang pernah mengikuti kegiatan tersebut pasti akrab dengan istilah KKP. Adapula istilah-istilah “pohon”, misalnya pohon masalah, yang menggambarkan siklus situasi negatif, pohon sasaran yang menggambarkan siklus situasi positif dan pohon alternatif yang menggambarkan beberapa alternatif yang dapat ditempuh untuk pemecahan masalah yang ada. Metode pohon ini memberi gambaran tentang suatu masalah yang kalau kita telusuri, maka kita akan tiba dengan sendirinya pada akar masalahnya.

Lalu saya coba mencoret-coret materi KKP yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi saya sebagai staf yang ditugasi menangani pengaduan masyarakat di DPRD, kemudian muncul ide yang terinspirasi dari pengalaman menangani membludaknya pengunjung rasa di DPRD hampir setiap hari. Mereka itu datang menyampaikan aspirasi atau mengadukan masalahnya, tuntutan atau keberatan serta dukungannya terhadap sesuatu secara “presude” baik yang bersifat politik, ekonomi, perburuhan atau ketenaga kerjaan maupun hal-hal yang luas bertema hak azasi. Banyak permasalahan yang senantiasa diadakan kepada wakil rakyat di dewan itu dan dapat dipastikan pemilihan Kepala Daerah atau biasa disebut pemilihan Gubernur akan memberi warna tersendiri bagi kegiatan penerimaan aspirasi masyarakat di DPRD.

Membayangkan keropotan yang akan terjadi ditambah pikiran-pikiran lepas dari beberapa kalangan mengenai pemilihan Gubernur mendorong saya menulis KKP pada pendidikan struktural itu dengan

Rencana Kerja Pelaksanaan Semiloka dan Sosialisasi Sistem dan Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

Setidaknya ada tiga variabel yang menentukan terwujudnya suasana yang kondusif dalam proses suksesi kepemimpinan di Sulawesi Selatan, yakni:

1. Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan.
2. Tingginya saling pengertian tentang hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat.
3. Tepatnya masyarakat dalam mengusulkan dan memperjuangkan calonnya

Untuk mewujudkan suasana yang kondusif sebagaimana diharapkan, maka yang paling urgen dilakukan adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan. Setidaknya ada dua peraturan pemerintah yang harus tersosialisasi kepada masyarakat mengenai pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selain UU Nomor 22 Tahun 1999 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Perundang-undangan mengenai pemilihan Gubernur bukanlah sesuatu yang dapat ditabukan untuk diketahui secara luas masyarakat, demikian pendapat seorang teman kepada saya dalam suatu kesempatan. Bagaimana bunyi ayat-ayat dalam peraturan itu, pantas diketahui masyarakat, demikian menurutnya. Proses Sosialisasi yang mapan dan mantap akan membawa kita pada satu visi dan persepsi mengenai hal dimaksud dan terhindarlah kita dari pemahaman yang bisa saja dijadikan

pembenar bagi implementasi kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Dalam konteks hak dan kewajiban diperlukan keseimbangan ego, rasa, dan pikiran. Dalam banyak kasus seseorang terkadang hanya ingin memikirkan haknya sendiri tanpa dibarengi rasa keadilan terhadap hak orang lain. Terkadang orang tak mau tahu bahwa selain dirinya masih ada orang lain yang memiliki hak pula. Dalam konteks ini setiap anggota atau kelompok masyarakat berhak mengajukan Calon dengan segala argumentasi logis kepada Fraksi-fraksi yang ada di DPRD. Beberapa pengusaha yang tergabung dalam berbagai organisasi profesi pada suatu acara buka puasa membuat “statemen” menjagokan calon Gubernur dari kalangan pengusaha, itu wajar-wajar saja. Mungkin nanti ada dari kalangan Kampus, Petani, Partai politik, semua mempunyai hak yang sama menjagokan calon yang dijagokan. Jauh sebelumnya yaitu sekitar Oktober, Angkatan Muda pembaharuan Indonesia (AMPI) Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan rapat kerjanya di Mamuju tidak luput mengajukan pula calon, bahkan menyebut nama, itu sah-sah saja. Dalam mencalonkan dan memperjuangkan calonnya masyarakat diharapkan dapat memilih figur yang memenuhi syarat dan kriteria yang dibutuhkan daerah. Tidak didasarkan pada pendekatan emosional atau material. Bintoro Tjokromiadjoyo dalam buku Pengantar Administrasi Pembangunan mengatakan bahwa salah satu tinjauan sentralisasi dibidang pemerintahan adalah untuk melakukan pembinaan terhadap kesatuan bangsa dari afinitas-afinitas kedaerahan, kesukuan, penggolongan politik dan lain-lain. Tuntutan kearah desentralisasi dan terwujudnya desentralisasi itu terletak pada pertimbangan kematangan satu negara dalam berbangsa. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan satu fase ujian kematangan tersebut. Emil J Sady menyebutkan salah satu tujuan desentralisasi adalah “ melatih rakyat untuk bisa mengatur urusannya sendiri (Self goverment).

Kewenangan memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah persoalan yuridis yang akan menjadi arahan yang jelas kepada setiap orang tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan, karena pemerintahan pada dasarnya adalah sebuah sistem hukum (a legal system) bukan hal yang dominan politik, sehingga ambisi politik bisa dijadikan kekuatan untuk merombak tertib hukum. Undang-undang Nomor Tahun 1999 menyerahkan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada DPRD dan undang-undang 22 tersebut secara politik menyisihkan sebagian peran kepada rakyat yang kesemuanya tentu masih dalam konteks self government.

Hal ini dapat dicermati pada PP 151 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa paling lambat 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah, panitia pemilihan sudah terbentuk. Selain itu pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Seterusnya pada tahap penelitian dokumen, kelengkapan administrasi setiap nama bakal calon, Fraksi-fraksi di DPRD menerima dan menampung aspirasi dari perorangan, masyarakat, organisasi sosial politik dan lembaga kemasyarakatan. Disamping itu Fraksi-fraksi juga mensosialisasikan nama-nama bakal calon yang terdaftar. Berdasarkan aspirasi itu Fraksi-fraksi di DPRD akan mengajukan bakal calon. Sehingga jika ada keinginan agar "pemilihan Gubernur" dilakukan secara langsung, pada hakekatnya keinginan tersebut dapat terjembatani dan terjelma pada fase penerimaan dan penampungan aspirasi. Aspirasi yang ditampung itu otomatis akan menjadi bahan pertimbangan dan penilaian yang akan mempengaruhi pemilihan yang dilakukan oleh anggota DPRD. Patut diingat, ada konsekwensi moral dan politis jika pemilihan yang dilakukan oleh DPRD berbeda secara berarti dengan keinginan mayoritas rakyat daerah karena hal itu menyangkut " public accountability ". Prof. DR. M. Ryaas Rasyid, MA dalam pidato pengukuhan guru besar tetap ilmu politik

pada Institut Ilmu Pemerintahan menyatakan bahwa kewenangan DPRD untuk menilai kualitas kepemimpinan, keberhasilan atau kegagalan kepala daerah dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya perlu diperjelas. Pelaksanaan atas kewenangan itu pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban anggota DPRD kepada rakyat yang telah memilih mereka.

Kewenangan dimaksud kini telah dimiliki oleh DPRD dalam hal memilih Kepala Daerah dan menilai pertanggungjawabannya. Kalau kita tidak rela pada kondisi ini, maka artinya kita menolak pemberdayaan DPRD yang menurut Ryaas Rasyid “ keengganan untuk menerapkan “the politics of mutual trust”. MPR, DPR, DPRD yang dipilih secara bersama-sama dalam suatu pemilu yang diongkosi negara dan mahal adalah penjelmaan kedaulatan rakyat. Ajaran Rousseau tentang kedaulatan menyatakan bahwa kedaulatan rakyat itu berdasarkan kemauan umum (volonte general) dan menjelma dengan perantaraan undang-undang. Dengan demikian tidaklah yang demikian itu berarti pula bahwa pendapat umum tidak tepat diwakili dengan ucapan oknum atau kelompok. Dalam hal ini jelas perbedaan antara pendapat umum dengan pendapat pribadi atau kelompok. Pendapat-pendapat lepas yang senantiasa berkomunikasi untuk kepentingan umum sebenarnya lebih bertendensi kepada kepentingan politik. Politikus seperti ini seharusnya bersikap arif bahwa dalam dunia politik ada yang disebut realitas politik, jika sesuatu kekuatan politik harus berkuasa karena bersumber dari proses demokratis yang berdimensi prosedur kita harus fair. Kalau kita tidak bisa menendang bola gol dalam gawang jangan serta merta aturan permainan minta dirombak, saya pikir itu tidak fair.

1. Dari sini saya pikir yang harus memilih Gubernur adalah DPRD, dan Calon terpilih dikonsultasikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, disahkan dengan Keputusan Presiden.

2. Jika ada keinginan menjadikan Sulawesi Selatan sebagai percontohan pemilihan Gubernur secara langsung, mungkin kita masih bisa bertanya pada keinginan itu, mengingat hal demikian harus melalui pengkajian secara menyeluruh, integral dan menasional. Pertanyaan kita dalam hal ini adalah : apakah itu percontohan atau percobaan ? Kalau percontohan berarti melakukan sesuatu secara normatif, jelas sama dengan teladan. Kalau percobaan berarti melakukan sesuatu secara spekulatif, jelas sama dengan kelinci.

KEPEMIMPINAN ADAPTIVE TANTANGAN PILGUB SULSEL



Oleh: **M. Idris Patarai**

Hampir pasti, kontestan Pilgub Sul Sel ada 3 (tiga) : Semangat Baru, Garuda dan Sayang 2. Prototipe tiga pasang pigur yang terbungkus dalam tagline masing masing juga sudah dikenal masyarakat pemilih. Namun mengingat peranan birokrasi dalam pembangunan tidak mungkin digantikan sepenuhnya pihak swasta (Mathur, 1986), maka arti penting pemerintah semakin tidak bisa dinapikan, yang artinya Pemilukada yang akan menghasilkan Gubernur pada Januari 2013 mempunyai arti penting bagi kelanjutan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Arti penting pemilihan itu akan semakin kita rasakan jika kita mencoba menafsir beban tugas seorang Gubernur yang pada satu sisi dia adalah legitimasi masyarakat yang berdaulat dan telah memilihnya, pada sisi lain seorang Gubernur juga adalah perwujudan pemerintah pusat di daerah. Artinya Gubernur bukan hanya “orang daerah” tetapi Gubernur sekaligus “orang pusat”.

Penjelmaan diri pada posisi sentrifugal menuntut seorang Gubernur mampu mendengarkan keinginan pusat dan mampu melayani dinamika daerah dalam satu kebijakan. Sesungguhnya pada 2 (dua) peran ini tidaklah berada pada dua kutub -berhadapan- akan tetapi berada pada kepentingan yang sama. Arah kebijakan pembangunan nasional menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat tergantung pada keberhasilan pembangunan daerah; Sinergi, kordinasi dan kerjasama pusat perlu dibangun secara efektif. Disinilah diperlukan seni tersendiri seorang Gubernur yang pada dirinya melekat dua fungsi agar kepentingan nasional mengakomodasi kepentingan daerah, dan kepentingan daerah tidak melenceng dari kepentngan nasional.

Gerald S Maryanov, Cornell University, (1958) menyebutkan : “ The decentralization program in Indonesia is an approach to two significant problems ; it is a method for spreading

government to all parts of the country; it is a method for accommodating regional differences, regional aspirations, and regional demands within the confines of the unitary state". Suatu metode desentralisasi yang dinilai cocok untuk satu negara kesatuan, mendistribusi kewenangan ke seluruh wilayah negara dan mengakomodasi perbedaan regional, aspirasi regional dan kebutuhan regional dalam negara kesatuan.

Seorang Gubernur ditantang untuk mampu mensimulasikan keleluasaan daerah (*discretion*) sebagai perwujudan akan pemahaman keanekaragaman daerah (*Unity in the diversity*) melalui kecerdasan menyeimbangkan kekuatan dan kesejahteraan (*Equality*) dengan mendorong kreativitas dan partisipasi (*Democracy*) serta keteguhan, kesetiaan menjaga selalu persatuan (Integrasi Nasional).

Patut diakui bahwa kita butuh kebijakan yang memperhatikan aspek aspek penyesuaian kondisi setempat (*contextual conditions*), aspek masyarakat dan politik (*community and political*) yang merupakan tantangan kepemimpinan publik atau birokrasi (*The Public Leadership Challenge*) menurut *Brookes and Grint (2010)*.

Kesemua detail detail tersebut diletakkan kini pada arah kebijakan pembangunan dewasa ini : *prosperity* (kesejahteraan), *democracy* (demokrasi) dan *Justice* (keadilan) yang menjadi tantangan seorang Gubernur.

Di bidang ekonomi secara nasional sebelum tahun 2014 tumbuh 7%. Inflasi rata-rata 4-6 % pertahun; tingkat pengangguran 5-6 % pada akhir tahun 2014 dan tingkat kemiskinan 8-10 % pada akhir tahun 2014.

Di bidang pendidikan, pada tahun 2014 dapat dicapai rata rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas 8,25; menurunnya angka buta aksara 4,18 ; dan yang penting bagi generasi muda yang telah melalui jenjang pendidikan dasar dan menengah diharapkan dapat dicapai APK PT usia 19-23 tahun 30,0 % yang pada tahun 2008 baru dicapai 21,26 %.

Di bidang kesehatan, meningkatnya umur harapan hidup, 72,0 di tahun 2014, yang pada tahun 2008 70,7. Begitupun pada angka kematian ibu melahirkan per100.000 ribu kelahiran hidup 118 pada tahun 2014, yang pada tahun 2008 masih 228.

Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, yang pada tahun 2008 berjumlah 34 menjadi 24 pada tahun 2014. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada

anak balita yang pada tahun 2008 sebesar 18,4 % menjadi 15,0 % pada tahun 2014. Gugusan target capaian ini terletak di daerah, karena di daerahlah masyarakat itu secara riil bermukim.

Sesungguhnya untuk angka pencapaian tingkat Sulawesi Selatan sudah melebihi rata-rata nasional. Hanya saja hal ini perlu dipertahankan untuk mengimbangi daerah-daerah yang belum memberi kontribusi dan yang terpenting *best practices* (*innovasi social*) yang telah diterapkan dapat ditularkan secara berlanjut.

Memenuhi capaian capaian itu secara sinergis, pusat – daerah, dibutuhkan *figur* Gubernur yang memiliki kepemimpinan *adaptive* yang memang dikembangkan untuk *sector public (developed from and for the public sector)*. yaitu meningkatkan nilai publik; memobilisasi masyarakat menghadapi masalahnya dan mengambil keputusan bagi mereka yang sulit yaitu bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri (Heifetz,1994).

Ciri khusus kepemimpinan *adaptive* pada sisi keberhasilan menurut Heifetz, yaitu tidak menekankan pada satu individu sebagai penentu (*breaks away from heroic leadership*), melainkan keberhasilan bersama, semacam konsep “Kapal Induk”, pinjam istilahnya Komandan.

Pemimpin *adaptive* itu disimbolkan sebagai seorang pemimpin yang mampu membuat orang yang dipimpinnya berprakarsa, yaitu karena *provides a strategy* kepemimpinan *adaptive* berbentuk *system*, mekanisme dan hubungan fungsi fungsi dimana setiap unsur dan aspek berperan. Kekhususan *Leadership Adaptive* bagi sektor *public* relevan dengan gaya kepemimpinan paradigma dan manajemen pembangunan berbasis masyarakat atau berpusat pada manusia (*people centered development*).

UANG POLITIK ATAU POLITIK UANG



Oleh : M. Idris Patarai

Kalau kita bicara uang konotasinya adalah uang ekonomi atau asumsi kita tentang itu paling tidak ekonomi, itu lumrah. Namun tiba-tiba saja kita diperkenalkan suatu kegiatan yang mestinya politik tetapi bersangkutan paut dengan uang, “politik uang”. Sekalipun diakui, yang demikian itu sudah menjadi praktek perilaku politik ekonomi untuk mencapai kedudukan politik, dalam hal ini, ia mencuat kepermukaan melalui pemilihan Kepada Daerah. Dengan demikian tudingan atau arah dari sinyalemen politik uang ini mengarah pada politisi kita di daerah, yaitu di DPRD yang tempohari memilih kepala daerah. Kini setelah pemilihan itu dilakukan oleh rakyat, apakah politik uang itu segmennya serta merta beralih ke rakyat, dalam hal ini masyarakat pemilih ? Dapat diduga demikian, namun tentu tidak segepok seperti yang diduga kepada DPRD, uang itu lebih tersebar tentunya.

Disinilah letak perbedaan antara politik uang dengan uang pelicin yang lebih dulu populer. Namun bersangkutan paut dengan uang dalam versi terakhir ini, sekali lagi, tidak dikenal dalam prinsip ekonomi. Setidaknya bukan itu yang disebut “Ekonomi politik - politik ekonomi”. Didik J. Rachbini, menyebutkan politik ekonomi sebagai suatu siasat untuk melaksanakan teori-teori ekonomi secara rasional dalam alam empiris. Pembauran antara ekonomi dengan politik bisa menghasilkan metode analisis the politics theory of economies, penerapan cara pendekatan yang berasal dari teori politik untuk memahami permasalahan ekonomi atau sebaliknya, metode analisis The Economies Theory of Politics, yaitu penerapan dari cara pendekatan yang bersumber pada teori ekonomi untuk memahami permasalahan politik.

Jangankan di dunia ekonomi, pada dunia politik pun politik uang, atau uang politik tidak direstui, tidak ada dalam teori. Praktis hal ini adalah penyimpangan. Penyimpangan dari asumsi demokrasi, penyimpangan dari motif ekonomi yang asumsinya pada prinsip-prinsip ekonomi uang untuk uang, politik untuk politik.

Mari kita tengok istilah baru yang berkembang dewasa ini : money follow function, uang mengikuti fungsi. Jika wacana pemilihan langsung benar benar terjadi kelak dan seorang calon merupakan usungan partai politik, maka uang tidak disangsikan lagi akan singgah di partai, akan banyak pigur yang lebih suka mengambil jalur independen, berhubungan langsung dengan masyarakat, hitung-hitungannya lebih murah.

Pertanyaan sebagian orang, kenapa partai begitu mahal, kenapa politik butuh uang? Ada anggapan bahwa pembiayaan (maintenance) partai memang mahal. Biaya yang disediakan negara untuk itu memang tidak mencukupi dibanding aktivitas partai. Pengharapan partai akan ada swadaya dari anggota, namun anggota juga sudah tersandra oleh pola hidup yang relatif konsumtif untuk mengimbangi posisinya yang terhormat.

Patalnya pula, di erah politik begitu mahal, partai biaya tinggi lalu diterapkan sistem multi partai. Akhirnya yang mendominasi aktivitas atau rutinitas keseharian masyarakat adalah politik. Sebagai sumber kekuasaan, politik benar benar menguasai. Kenapa begitu ? Semua pada tahu, kelak kekuasaan itu akan bisa mendatangkan apa yang kita diskusikan, uang !

Idealnya sesungguhnya, mengingat biaya tinggi perpolitikan setali tiga uang dengan kekuasaan, maka tipe high class ini dapat menseleksi pigur yang cocok, pas, kena dan relevan, yaitu kaum beruang. Namun apakah dengan begitu berarti politik menjadi milik sebagian orang, kaum beruang, lalu akibatnya akan mengobok obok kekuasaan untuk kepentingan bisnis. Tidak selamanya demikian, diharapkan kelak kaum beruang itu menjadi kaum dermawan yang menjadikan politik sebagai pengabdian dan kekuasaan sebagai prestise dan ujung prestasi tertinggi yang pernah dicapai.

Masalahnya sekarang kaum beruang itu lebih suka menjaga dan menyeleamatkan assetnya ketimbang terjun ke politik. Bukan mikir ongkosnya, tetapi tidak mau susah dan ribut. Apalagi politik urusannya ribet. Akibatnya ruang ruang politik diisi mereka yang belum

mengikuti proses kaderisasi, dan maaf, sebagian orang berpendapat: politik itu merupakan lapangan kerja baru dan dengan mudah dapat mengorbit seseorang menjelma menjadi luar biasa yang akhirnya membuat sebagian dari mereka dihindangi penyakit lupa. Lupa secara sosial dan lupa secara hukum. Lupa secara sosial, ialah lupa teman bahkan lupa pemilih. Lupa secara hukum, ialah jika berkasus jawabnya lupa atau tidak tahu.

Mudah-mudahan saja kondisi yang demikian itu tidak luput dari pemikiran dan agenda reformasi yang intinya memperjuangkan demokratisasi. Jika hal itu cenderung tidak dipikirkan dan kehadirannya hanya merupakan efek samping dari yang luput dihitung, maka persegera perlu diterapi, salah satunya : kembali ke jalan yang benar !

Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru baru ini melakukan survei nasional untuk menilai pemenuhan agenda reformasi dengan jumlah sampel 1000 responden. Mayoritas (44,9 %) responden menjawab tuntutan reformasi belum terpenuhi. Untuk diingat, bahwa salah satu agenda reformasi adalah penerapan otonomi daerah yang di dalamnya adalah pemilihan kepala daerah secara langsung.

Eriyanto (2010), peneliti senior LSI menyimpulkan otonomi daerah atau pemilihan kepala daerah merupakan salah satu perubahan yang terasa. Minimal tentu tuntutan reformasi pada sisi ini telah mendapatkan dasar hukum, berupa undang undang, sebagai wujud komitmen reformasi yang kini menuntut pemenuhan substansi yang fundamental, kualitatif dan demokratis.

Anthony Giddens, anggota kehormatan King's College Universitas Cambridge, memperkenalkan apa yang ia sebut sebagai signification, yaitu kesesuaian antara ucapan dan tindakan. Hal ini merupakan interpretasi Giddens atas hakikat praktek praktek sosial dan menekankan hal ini menjadi karakter refleksif, yaitu mengetahui bagaimana berpartisipasi atau bagaimana bertindak dalam konteks kehidupan sosial termasuk di dalamnya bagaimana mematuhi peraturan (rule). Peraturan lebih merupakan pembangkit, media yang tak terpisah dalam praktek praktek sosial. Ia adalah makna sekaligus sanksi. Formulasi inilah yang disebut Giddens sebagai teori tindakan yang konon perlu didalami untuk tidak membuat reformasi kebablasan, salah arah dan menjadikan kita tetap di sini, yang sebagian orang menyebutnya bahkan : Kita setback !

TNI DAN PERANG DI DPR

OLEH M. IDRIS PATARAI

“Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”, demikian bunyi pasal 11 UUD 1945. Lalu pada tahun 1982, tepatnya Kamis 16 Desember J.C.T Simorangkir menulis pada Harian Sinar Harapan tentang pasal ini, namun terbatas pada substansi “perjanjian dengan negara lain”. Menurut waktu itu “..... kita althans for the time being, tidak ada niat menyatakan perang dan kemudian mengadakan perdamaian”.

Saat ini mungkin tidak ada salahnya jika kita bicara sebagian dari yang beliau penggal itu, yakni ‘perang’, sekalipun tidak ada niat menyatakan perang dan tidak banyak orang yang suka bicara tentang ini, ngeri !. Begitu tidak sukanya orang terhadap perang dapat dibuktikan dengan adanya gerakan “pasifisme”, yaitu gerakan anti perang. Perang memang bukan hal yang sederhana, perang adalah pilihan terakhir setelah upaya pencegahan melalui kegiatan Intelejen strategis dan diplomasi. Menurut Cheppy Hari Cahyono dan Suparlan Alhakim dalam Ensklopedi Politika perang adalah “ pertarungan antara dua kekuatan yang saling bertentangan dengan menggunakan kekuatan bersenjata”. Namun demikian adapula perang yang pada umumnya tidak menggunakan kekuatan bersenjata secara langsung, perang seperti ini disebut perang dingin. Di Indonesia kita mengenal doktrin perang rakyat semesta, yaitu perang yang menggunakan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral dengan menggunakan kekuatan militan sebagai unsur kekuatannya untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Nampak dari sini bahwa untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan dilakukan perlawanan yang bersifat kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan yang berwujud perang rakyat semesta. Seirama dengan ini adalah prinsip pertahanan keamanan negara dimana TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan wadah perjuangan bersenjata seluruh rakyat

Indonesia dan keseluruhan aspek kehidupan masyarakat merupakan wadah perjuangan tidak bersenjata untuk mendukung tercapainya perjuangan bersenjata. Perjuangan bersenjata secara bersama-sama antara tentara dengan rakyat sudah menjadi pengalaman perlawanan Indonesia menghadapi Belanda dalam bentuk perang gerilya. Dari sini pula tinjauan historisnya tentara itu berpolitik. Harold Crouch menyatakan bahwa "persepsi tentara mengenai dirinya sebagai kekuatan politik berasal dari perbedaan yang kabur tentang fungsi militer dan fungsi politik dalam masa perang kemerdekaan melawan Belanda. Sifat perjuangan itu sendiri memiliki sifat politik sekaligus juga militer". Perjuangan kemerdekaan itu telah membuahkan hasil tersendiri selain kemerdekaan itu sendiri, yakni Tentara Nasional Indonesia.

Dalam wawasan bela negara yang demikian dengan faktor historis dan empiris TNI yang cikal bakalnya adalah Tentara Rakyat, tentara pejuang kemudian menjadi tentara profesional dan sebagai satu-satunya institusi angkatan perang yang mendalami aspek-aspek perang, kapan perang dilaksanakan, bagaimana peperangan dimenangkan atas keyakinan kekuatan sendiri, keyakinan akan kemenangan dan tidak kenal menyerah menjadi perspektif perlunya TNI di DPR.

Kehadiran TNI/POLRI (dulunya ABRI) di DPR dan DPRD I dan II berawal dari suatu konsensus politik, bukan merupakan hal yang serta-merta, melainkan melalui suatu proses waktu yang lama, tersosialisasi kurang lebih tiga tahun bersama tiga rancangan undang-undang yang diajukan pemerintah bulan Nopember 1966 kepada DPR-GR. Tiga RUU tersebut masing-masing Undang-Undang Kepartaian, Keormasan dan Kekaryaan, Undang-Undang Pemilihan Umum/Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan perwakilan Rakyat serta Undang-Undang Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun kemudian pansus 3 RUU itu dapat menyelesaikan 2 RUU, yaitu RUU Pemilu dan susunan MPR, DPR dan DPRD yang disahkan dalam sidang Pleno DPR-GR tanggal 22 Nopember 1969.

Kedua undang-undang itu yang kemudian kita kenal dengan undang-undang Nomor 15 dan Nomor 16 diundangkan pada tanggal 17 Desember 1969 merupakan undang-undang yang memuat konsesnsus antara partai-partai politik, ABRI dan Pemerintah. Dikatakan konsensus mengingat pada awalnya undang-undang yang diajukan pemerintah itu mendapat kritikan dari kalangan DPR-GR. Namun pemerintah menghadapi hal itu dengan beberapa konsesi melalui pertemuan-pertemuan dan dialog dengan partai politik. Harold Crouch dalam buku *Militer dan Politik di Indonesia* menyebutkan bahwa pada tanggal 27 Juli 1967 ditetapkan apa yang dinamakan "paket" atau pokok-pokok persetujuan dalam mana kedua belah pihak memberikan konsesi-konsesi Partai mengakui hak pemerintah untuk mengangkat sepertiga dari anggota MPR dan 100 dari 460 anggota DPR termasuk sipil dan wakil-wakil ABRI. Sementara itu Pemerintah setuju untuk menerima perwakilan profesional dengan daftar partai-partai yang daerah pemilihannya meliputi propinsi, serta persyaratan tempat tinggal diadakan. Kesaksian tim peneliti penyusun *Buku Tercapainya Konsensus Nasional 1966-1969* editor Nugroho Notosusanto bahwa ada dua masalah inti dalam proses konsensus menjelang lahirnya undang-undang tersebut yakni masalah pengangkatan Anggota MPR, DPR, DPRD I dan II dan masalah sistem pemilihan dalam pemilu.

Saat ini jumlah anggota ABRI (TNI/POLRI) di DPR berjumlah 38 orang dari 500 Anggota DPR dan 10% dari anggota bagi DPRD I dan DPRD II. (UU Nomor 4 Tahun 1999). Jumlah tersebut relatif kecil di banding sebelumnya. Jumlah inipun ditanggapi sebagai sifat ngotot ABRI dan tidak mau ditawar mempertahankan anggotanya di DPR, sebagaimana ditulis Santoso dalam buku Abdurrahman Wahid dkk "Berpolitik atau kembali ke Barak". Namun demikian secara kualitatif peran Fraksi TNI/POLRI dalam situasi politik yang panas menjelang dan sampai SI 2001 cukup menarik perhatian, memukau bagi beberapa kalangan. Ketika Fraksi yang anggotanya diangkat itu tidak lagi abstain pada saat pengambilan keputusan mengenai SI, publik serta merta dapat membaca kekuatan politik, SI akan berlangsung dan pimpinan eksekutif akan jatuh. Bahkan orang bisa menebak bahwa Dekrit pun jika dicetuskan tidak akan dapat dukungan TNI/POLRI.

Fenomena ini mengesankan bahwa Fraksi yang kecil itu telah memainkan peran “stabilitator dan dinamisator”. Demikian halnya Penempatan anggota TNI/POLRI pada DPRD I dan DPRD II yang tidak dominan pada pendekatan daerah asal dapat memberi nuansa baru di era otonomi. Setidaknya mengeleminir perasaan kedaerahan akibat penokohan putra daerah di daerah. Disamping itu dapat memberi warna tersendiri, objektif dan rasional karena dapat dipastikan tidak mempunyai hubungan primordial dengan eksekutif di daerah. Dapat menjadi stabilitator dan dinamisator.

Dewasa ini dalam perspektif politik dan dalam konteks hankam peran itu niscaya semakin diperlukan. Dengan tidak berprediksi bahwa akan terjadi perang, persetujuan DPR kepada Presiden menyatakan perang mempunyai arti strategis, karena perang itu secara konsepsi adalah perang rakyat dengan susunan kekuatan untuk perlawanan bersenjata dibina sebagai bala semesta Tentara Nasional Indonesia, yaitu bala nyata merupakan kekuatan riil yang dibina dan bala potensial yang meliputi seluruh tenaga rakyat, prasarana dan sarana nasional yang telah disiapkan. Hal ini berlaku dalam konteks kita menghadapi invasi militer negara lain sebagai tinjauan jangka panjang, universal dan fundamental. Namun sekarang kita tidak sedang dalam situasi itu, kita tidak dalam perang terbatas, atau perang umum, tetapi kita dalam perang revolusioner, dimana kejahatan, kekerasan dan teror dalam masyarakat telah menjadi fenomena yang merakyat dan mendeskreditkan aparat. Apa yang dahulu kita antisipasi sebagai ancaman berupa kerusuhan karena ketimpangan sosial, karena adanya pihak yang memaksakan kehendak, pemberontakan yang bersifat sparatis telah menjadi nyata. Semua ini memerlukan pemecahan teknoratis dan keputusan politik sebagai tinjauan pragmatis kontekstual, sebagai argumen selanjutnya perlunya kita mempertahankan konsensus 1966-1969 itu.

Hingga dewasa ini masih terjadi dan mungkin mala semakin tinggi intensitasnya apa yang diutarakan Alfian dalam ulasan buku Sajdiman Suryohadiprojo, Langkah-Langkah Perjuangan Kita, bahwa terdapat sikap ganda atau ambivalent bagi masyarakat sipil, kalau tidak semua, sebagian terhadap TNI.

Ambivalent itu merupakan pertarungan antara cinta dan benci, Senang dan jengkel, suka dan tidak suka terhadap TNI.

Sikap ambivalent seperti itu menjadi tantangan dan untuk itu mungkin wajar-wajar saja, bahkan boleh dikata normal dan sehat. Sebaliknya Republik ini akan sakit dan menyakitkan jika ambivalent itu terbalik kepada sipil.

Tidak sedikit orang memaki-maki tentara secara terang-terangan dan terbuka, mengkritisi dan mendemonstrasi, tetapi hampir tidak pernah kita baca ada tentara yang memberikan kebencian dan ketidak senangan kepada sipil. Di Makassar bahkan, ada gedung megah yang dibuat oleh tentara dan diberi nama Balai Manunggal. Nama itu tentu mengandung maksud dan dari lubuk hati yang dalam yang bernama kecintaan.

Dirgahayu TNI pada usianya yang ke 56.

M. IDRIS PATARAI

PENYUNTING MAJALAH "MIMBAR ASPIRASI"
DPRD PROPINSI SULAWESI SELATAN

PRESIDEN LANGSUNG ATAU LANGSUNG PRESIDEN

Oleh M Idris Patarai

Presiden kita nanti adalah tetangga kita, orang yang kita kenal betul. Intelektualitasnya, moralitasnya, dalam hal ini, kejujurannya, keimanannya, akhlaknya; bahkan mungkin kita bisa hitung berapa inci tv-nya, merek kulkasnya dan apa saja yang ada di rumahnya, secara detail kita hafal betul. Mungkin pula sekali pernah kita menyeberangkan penganan ke rumahnya. Sebagai tetangga kita kemudian kenal betul gaya hidupnya, jumlah istrinya, perilaku anak-anaknya dan tempat sekolahnya, atau mungkin dia teman anak kita juga. Kita kenal betul, sehingga kalau betul betul dia jadi, maka kita punya orang dekat jadi Presiden. Kita bisa menelponnya dan tidak canggung. Mudah mudahan saja dia tidak berubah setelah jadi. Kalau nanti ada yang berubah, adalah tempat tinggalnya, karena dia harus pindah ke Istana, atau keharusan protokoler yang patut dipatuhi. Dengan begitu kita merasa punya Presiden, bukan punya Presiden tetapi tidak ada dalam rasa. Betapa bangganya kita terinjeksi harga diri, yaitu karena kita punya sesuatu yang kita pilih sendiri, dan itu adalah Presiden.

Sekitar itulah nanti rakyat menjiwai Presidennya, kalau Presiden itu dipilih langsung, mirip pemilihan ketua RW, langsung. Semacam *Suum Cuique Tribuere*, dimana masing masing orang dapat menerima bagian atau hak haknya.

Kalau kita memilih Presiden ibarat memilih tetangga, sudah barang tentu tetangga sebelahnya lagi dan seterusnya ramai ramai memilihnya pula, sebab bisa repot, jika pilihan berbeda, lalu hubungan antar tetangga bermasalah, terutama di daerah daerah dimana hubungan kekerabatan secara emosional sangat dekat. Dugaan seperti ini bisa terjadi karena nampaknya pemilihan Presiden secara langsung itu berimplikasi pada terjadinya basis basis kekuatan bagi para calon, ada wilayah wilayah yang menjadi kantong kantong suara bagi mereka. Dalam kondisi ini tidak dapat dihindari ada yang melenceng atau berbeda, tetapi itu paling tidak terselip satu dua diantara homogenitas pemilih di satu wilayah. Lalu kalau begitu Ketua RW kita bisa pegang peran? Itu kalau ketua kita sekaligus “*informal leader*” dan bukankah rata rata memang begitu, sekalipun sebenarnya siapa saja bisa saling mempengaruhi. Namun demikian saat ini kita hanya bisa mereka reka, karena ini adalah pengalaman pertama bagi kita selama hidup dan selama bernegara. Kesimpulannya, kita bisa pegang peranlah, malah mungkin ada diantara kita bisa menuai. Ini benar benar asyik, sekaligus *deg degan*, seperti pengantin baru menanti malam pertama, soalnya belum pengalaman dan mungkin akan

dilematis. Disatu sisi kita mengalami perubahan di dalam melakonkan demokrasi yang kita pilih sebagai system dalam menjalankan pemerintahan -dan pri kehidupan yang lain- sementara di sisi lain ,situasi itu mengantar kita kepada suatu suasana perubahan kehidupan social kemasyarakatan yang baru pula, yang sudah barang tentu mengandung ekseseks yang tidak dapat kita hindari. Bahkan yang demikian tidak menutup kemungkinan semakin memicu rasa kesukuan ,kedaerahan dan etnosentrisme lainnya.

Keta'ajuban yang kita harapkan adalah Presiden kita nanti betul betul jerih payah rakyat. Mudah mudahan yang kita pilih itu merasakan yang demikian ,sehingga terbangun rasa saling memiliki, dan bukankah proses memilih itu bisa mengalirkan rasa yang seperti itu, antara yang dipilih dan yang memilih .Kalau "Si Ahmad" menyunting "Si Siti", akan mengalirkan rasa yang menjarasnya pada derajat dan pertautan tali temali yang kita sebut "suami-istri". Apapun yang kita pilih pasti melibatkan rasa dan akan membawa kita pada suatu situasi kebersamaan, apakah dia makhluk hidup atau benda mati sekalipun.

Praktis, kita mengharap pemilihan langsung terhadap Presiden itu akan membuahkan Presiden yang menjadi kebanggaan kita dan kita tidak temukan lagi ada oknum yang membakar foto Presidennya, merobek robeknya ,melubangi matanya, menjadikannya boneka lalu mempretelinya, mencederainya dan menuding nudingnya dengan telunjuk dan dengan tulisan yang tidak senonoh.. Mudah mudahan tidak lagi. Bukankah Presiden itu adalah kebanggaan, bahagian dari "lambang lambang ekspresif" bangsa yang semestinya kita jaga martabatnya.

Presiden kita nanti bukan lagi karena dia anaknya "siapa", Presiden bukan dari sebuah pergolakan, dari rekayasa politik., sekalipun bersumber dari sebuah proses politik. Untuk menjadi Presiden tidak terbatas pada mereka yang selama ini dikenal sebagai elit ,yang bemarkas di Senayan ,sehingga tempat itu seperti persemaian dan hanya dari situ yang layak kita pilih untuk memimpin bangsa.

Lalu, bagaimana kalau calon Presiden harus diajukan oleh partai politik ,apalagi jika masing masing partai menjagokan ketua umumnya ,bagaimana dengan kandidat yang lain. dengan tetangga kita itu misalnya., Dalam hal seperti ini, partai politik telah menjadi lembaga legitimasi pejabat publik dan mempersempit peluang bagi yang lain, karena proses menjadi kandidat Presiden harus dimulai dari menjadi Ketua Umum suatu partai Politik.. Kandaslah harapan kita, pupus seketika ,jika yang demikian menjadi siasat.

Sekalipun semestinya kandidat itu muncul dari Partai Politik karena partai itu harus menjadi lembaga penjamin individu yang mendapat support sebagai kandidat. Ibarat barang yang dibeli, punya garansi, namun demikian jangan mutlak ketua umum.. Hemat kita dari awal adalah, kita pilih Presiden ala pemilihan Ketua RW, yaitu kita pilih tetangga yang sungguh sungguh kita tahu; yang selama ini punya kepedulian dengan lingkungan, kepedulian dengan kehidupan bersama dan mau tahu dan tahu masalah warga, punya keprihatinan dan perhatian. Demikian pula memilih Presiden, kita pilih yang telah memiliki “*trade record*” kemasyarakatan, kenegaraan, kebangsaan. yang memiliki latar belakang kehidupan politik, telah tersosialisasi dengan berbagai fenomena politik. Mapan dan memiliki kematangan di dalam menghadapi berbagai masalah masalah kebangsaan. Bukan sekedar cerdas, berpendidikan S1 misalnya, atau memiliki segala predikat baik, itu tidak cukup.

Presiden yang kita pilih nanti, bukan orang baru turun gelanggang. orang yang belum pernah teruji., sehingga dengan begitu *steril* dalam penilaian sementara. Ibarat mobil dalam *Show Room*, mulus tidak lecet, karena rodanya sendiri baru menyentuh aspal, kilometernya belum mencantumkan angka apapun. Dibandingkan dengan mobil yang malang melintang di jalan raya, sudah barang tentu banyak hal yang bisa dinilai, mungkin tidak mulus tetapi konkrit, nyata dan tidak semu, terukur. Ringkasnya, kita pilih yang sudah punya karir politik, bukan orang baru, langsung Presiden.***

Penulis adalah Staf DPRD Sul Sel

GOLPUT DALAM ERA MULTI PARTAI

OLEH : M.Idris Patarai

Agaknya benar pendapat yang menyatakan bahwa “Semakin banyak pilihan semakin susah bagi kita untuk memilih” Kebenaran pernyataan ini sejalan dengan kerisauan Wakil Presiden ,Hamzah Haz,yang mensinyalir terjadinya Golput pada Pemilu 2004,seperti disampaikan Roch Basuki Mangoenpoerejo,Ketua Panitia Silaturahmi Kebangsaan 2003,selesai diterima Wakil Presiden 8 Mei di Jakarta (Fajar,Jumat 9 Mei).

Mengenai ini kita bisa saja bersungut heran : Golput itu bisa terjadi,justru pada era banyak Partai bertebaran, dalam aneka nama , tanda gambar,symbol,pernyataan dan janji .Atau mungkin ada di antara kita yang *nyelutuk* bahwa akibat tebaran itulah sehingga masyarakat jadi bingung lalu memilih lebih baik diam, dan bukankah diam itu adalah emas.Tapi tunggu dulu ,apakah dengan terdiam menjadi emas seperti itu masalahnya jadi selesai.Apakah tidak bisa sedikit toleran untuk memahami bahwa memilih adalah salah satu bentuk partisipasi politik dan bukankah diam yang berkonotasi emas itu yang dimaksud adalah “tidak bicara” bukan “tidak bersuara” (baca tidak memberi suara).Lalu apa sebenarnya alasan yang mendasar sehingga ada diantara kita yang memilih Golput ?Apakah karena tidak ada “plat form” partai yang bisa seiring sejalan ; atau merasa pesimis pada keadaan yang tidak akan dapat berubah hanya dengan Pemilu ;atau karena merasa bebas untuk tidak memilih karena tidak ada lagi kekuatan memobilisasi massa ,menggiring untuk memilih dan karena Pegawai Negeri tidak lagi berpartai; atau karena merasa bahwa Golput itu juga adalah sebuah pilihan .Jika demikian kenapa tidak ada diantara kita berpikir mendirikan partai Golput ,lalu partai ini nanti menjadi oposisi dari partai partai yang membagi bagi kekuasaan dalam suatu koalisi ambisi.Ternyata bukan di situ masalahnya dan bukan itu jalan keluarnya

.Di negara negara berkembang memang merisaukan bagi pemerintah untuk meningkatkan partisipasi itu ,karena partisipasi yang lahir dari kesadaran sendiri sangat terbatas ,berbeda di negara negara demokrasi barat tingkat partisipasi yang rendah atau apati sekalipun, dapat dianggap sebagai tanda kepuasan ,tetapi di negara negara berkembang tidak demikian halnya menurut Meriam Budiardjo.

Mungkin itu sebabnya maka kita bisa menganggap layak jika ada diantara kita yang tercengang membayangkan situasi Golput itu,melihatnya sebagai gejala yang ironi,sesuatu yang

kontradiktif di era banyak pilihan sudah tercium aroma ada yang enggan memilih, dan sudah jelas ,itu bukan pertanda kepuasan pada keadaan yang dicapai sekarang .

Begitu banyaknya partai ,akan membuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) kerja keras mengatur bentuk kampanye yang efektif , mendesain bilik suara dilengkapi tanda gambar partai politik dan foto para tokoh yang menawarkan diri untuk dipilih agar bisa duduk di parlemen. .KPU itu benar benar sibuk mempersiapkan ”pesta demokrasi“(dulu disebut begitu),sehingga tidak heran jika dia menuntut fasilitas rumah ,mobil dan dibayar mahal untuk sebuah Pemilu yang dihantui Golput itu.

Sebenarnya di Indonesia menurut Meriam Budiardjo lagi, peresentasi pemilih sangat tinggi yaitu 90 % ke atas. Dia mencontohkan Pemilihan Umum Pertama (1955) peresentasenya adalah 91,4 % ,yaitu 39 juta pemilih dengan jumlah warga negara yang berhak 43 juta .Lebih tinggi lagi adalah partisipasi pada pemilu 1971 ,94 % ,yaitu 54 juta pemilih dengan jumlah warga negara yang berhak 58 juta dan Pemilu 1977, 63 juta dari pemilih terdaftar 70 juta .

Dapat dimaklumi jika tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 1955 cukup tinggi karena itu adalah pemilu pertama yang dilaksanakan sejak kemerdekaan dan konon berlangsung sangat khidmat. Kemudian menukik lebih tinggi pada pemilu 1971,karena pemilu itu adalah pemilu pertama di era orde baru ,ketika orde baru benar benar baru menancapkan kekuasaannya dengan tema pokok perjuangan “melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen” ,cukup mencengangkan dan mampu membuat orang terkesima kala itu.Kemudian pemilu 1977,sekalipun peresentasenya lebih rendah dari pemilu 1971,tetapi disitu terdapat peningkatan jumlah pemilih sebesar 9 juta . Patut diingat bahwa kala itu hanya terdapat tiga kontestan Pemilu , dua Partai Politik dan satu Golongan Karya,sekalipun di baliknya dua partai politik itu merupakan pusi dari beberapa partai politik sebelumnya yang seazas.

Kemudian pada pemilu terakhir,pemilu di era reformasi,1999 yang disebutkan Imam Tolkhah,sebagai pemilu multi partai kedua setelah pemilu 1955,terdapat 19 partai yang memperoleh kursi di DPR ,29 partai lainnya tidak mampu mengumpulkan suara untuk meraih satu kursipun,sehingga terdapat sekitar 13 juta suara yang terdistribusi hangus.

Dari 48 partai peserta pemilu ,terdapat 5 partai besar yang secara total mengumpulkan 86,7% dari total suara pemilih yang berjumlah sekitar 110 juta ,yaitu PDIP 33,8% ,Partai Golkar 22,5%,PKB 12,6%,PPP 10,7% dan PAN 7,1%. Mungkin sekali disebut 5 besar karena setelah 5 partai itu,perolehan suara partai lain anjlok di bawah 2%,sebanyak 14 partai dan selebihnya di bawah 1% .

Sebenarnya patutkah kita berharap bahwa semestinya ada hubungan saling mengisi antara jumlah partai politik dengan jumlah pemilih dalam pelaksanaan Pemilu .Dalam hal ini kita beranalog dengan Hukum Archimedes,ahli matematika Yunani.Anda tentu masih ingat pelajaran itu,yang menyatakan :” *Apabila benda padat dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air ,maka air akan naik ke permukaan seberat benda padat yang dimasukkan ke dalam bejana tersebut* “

.Signifikansi antara jumlah partai politik dengan jumlah pemilih seperti itu bisa menjadi aksioma yang layak ,karena partai politik sudah semestinya dapat menggerakkan anggotanya untuk turut berpartisipasi dalam Pemilu. Gabriel A Almond ,mencontohkan bahwa di Amerika Serikat orang berpartai lebih sering memberikan suara daripada yang tidak berpartai .Lain lagi dengan Samuel P Huntington yang menyatakan bahwa partai dalam konteks organisasi adalah produk politik modern ,yang memang dibutuhkan guna mengorganisir keterlibatan massa dalam politik.

Wall Paragoan, dalam hal ini mempunyai pendapat , bahwa ada tiga factor berpengaruh bagi satu partai politik untuk dapat meraih suara dalam suatu pemilu yang diselenggarakan secara jujur dan adil .Partama ideology atau cita cita yang jelas ;ke dua program yang bagus dan akan dilaksanakan secara konsisten ;ketiga sosok pemimpin yang bermoral populer,kharismatik, marketable ,dapat dipercaya dan berkualitas serta meyakinkan.

.Jika kita bisa menerima hal itu,maka secara obyektif kita juga bisa menduga bahwa mungkinkah partai partai yang ada tidak cukup meyakinkan dan tidak dapat berpengaruh terhadap keputusan kaum pemilih (electorate).Gabrial mengingatkan dan mungkin patut kita renungkan ,bahwa *Julius Nyerere* di Tanzania dan *Fidel Castro* di Kuba adalah dua pemimpin kharismatis negara sedang berkembang yang dapat menggerakkan massa ke dalam kegiatan politik.Dia mengungkapkan hal ini untuk meyakinkan bahwa calon calon yang memiliki daya tarik pribadi yang kuat dapat membawa banyak orang yang *a politik* ke dalam kegiatan politik .

Jika demikian , untuk menghindari Golput tidak cukup hanya dengan memperbanyak partai Kalau begitu mungkinkah ada suatu era non partai .Atau kita kerahkan kembali Pegawai Negeri Sipil ,dan tidak melarangnya menjadi anggota atau pengurus partai ? Biar ramai dan bisa peduli?Atau kita mengharap ada masa satu partai ,system partai tunggal,seperti yang pernah hampir terjadi dulu,karena dengan begitu kita akan memilih.Bukankah jika tak ada pilihan kita pasti memilih ?Berandang bukan begitu , kita butuh figur ,bukan partai .***

KONFLIK DAN PARTAI POLITIK

Oleh : M. Idris Patarai.

Jika ada di antara kita yang mengimpikan hidup tanpa politik, jangan terkejut jika ada yang ingatkan : hati - hati ! Jangan sampai Anda terjebak pada apa yang disebut tujuan eschatologis para penganut aliran Marxisme yang bercita - cita membangun kembali akhir zaman, suatu pola hubungan yang sempurna dimana politik tidak diperlukan lagi. Samuel P Huntington menyebut yang begini sebagai gagasan atavistik, hanya dapat terlaksana apabila perjalanan sejarah dibalik, peradaban dihancurkan dan tingkat - tingkat organisasi manusia diperkecil sampai hanya menjadi keluarga dan desa. Menurutnya, di dalam masyarakat sederhana komunitas dapat terbentuk tanpa politik atau setidaknya tanpa lembaga - lembaga politik yang sangat terperinci, sedangkan di dalam masyarakat yang kompleks, komunitas terbentuk oleh satu tindakan politik dan pembinaannya dilakukan melalui lembaga politik.

Jika demikian halnya, sepertinya kita tidak bisa mengelak dari konsekuensi politik. Namunpun begitu patut pula dimaklumi jika ada di antara kita sudah cukup gerah atau jera pada politik. Berbicara harus serba hati - hati, bertindak atau berhubungan harus ekstra konfidensial, jangan - jangan menjurus ke politik atau dipolitisir orang. Terakhir ini ada dua tokoh penting di Sulawesi Selatan disebut - sebut menggagas dan akan bergabung dengan salah satu pecahan partai, buru - buru tokoh kita itu membersihkan diri seperti orang kegatalan, ada yang berkomentar secara diplomatis bahwa dirinya cukup berkarir pada bidang yang telah lama ditekuninya, kalau ada keinginan mengacungkan maka didukunglah pada bidangnya itu hingga tingkat nasional. Ada pula yang secara terang - terangan menolak dengan alasan yang spesifik pula. Hal ini tentu paradoks dengan beberapa Jenderal (purnawirawan) yang menyatakan diri bergabung dalam salah satu partai yang berbeda. Untuk hal ini lebih bijak jika kita menyadari bahwa hak politik adalah bahagian dari hak - hak pribadi.

Pada spektrum yang lain, seorang teman harus berhitung beberapa kali untuk berkunjung ke suatu tempat (tepatnya rumah) sekedar silaturahmi " berminal aidin ",

terhitung, takut ditangani politik. Demikian pula ketika Pak Harto dilansir akan mendapat pengampunan berupa abolisi dari Presiden alasan pertimbangan kemanusiaan, spontan bermunculan pendapat bahwa hal tersebut akan berdampak politik. " Rancana pengampunan Soeharto justru bisa sangat politis. Nanti bisa ada yang menganggap Presiden hanya cari perlindungan jika ternyata pengampunan itu berdampak sosial politik ", demikian Hartono Marjono Anggota DPR RI dari non Fraksi menanggapi akan bergulirnya abolisi itu ke DPR (Fajar 24 Desember). Ide abolisi itu kemudian menjadi polemik antara Menteri Yusril dengan Presiden Megawati, hingga ditelusuri asal muasal sampai kronologi abolisi itu. Terakhir Amien Rais ikut bicara " Bukan masanya lagi Presiden dan Menterinya saling melempar tanggungjawab " (Fajar 28 Desember).

Dapat ditebak bahwa fenomena demikian adalah fenomena politik. Politik itu ternyata sensitif, tak ubahnya lidah yang menjilat - jilat ke sana ke mari. Politik itu di sekitar kita laksana udara yang dihirup, begitu dekatnya dengan kehidupan. Bukan hanya bagi kalangan politisi, justru juga bagi yang awam.

Kaum politisi bahkan memahami hal - hal demikian sebagai hal biasa dan mungkin yang demikian itu adalah bahagian dari politik itu sendiri, tetapi bagi kita yang awam bisa bikin sesak. Bagaimana tidak sesak napas, jika kita amati dan ternyata: di dalam politik lawan dan kawan tidak tetap batas batasnya, bahkan kadang bersinergi. " Di dalam politik tidak ada yang abadi kecuali kepentingan ", demikian pernah dinyatakan H.Mattalatta,SH,MH ketika masih Ketua KNPI di Sulawesi Selatan. Identik dengan ini adalah pernyataan Cicero yang menyatakan bahwa ada dua ciri komunitas politik, yaitu kesepakatan umum atas hukum (consensus yuridis) dan hasrat untuk mencapai keuntungan (utilitatis communio) timbal balik. Politik identik dengan intres dan mungkin itu sebabnya sehingga selalu bermuara pada konflik. David Jery dan Julia Jery dalam Collins Dictionarry Of Sociology menyebutkan bahwa secara Sosiologis konflik menyatu pada perjuangan terselubung antara individu-individu atau kelompok dalam masyarakat. Salah satunya adalah partai politik.

Konon secara historis lembaga politik terbentuk sebagai hasil interaksi dan akibat konflik yang terjadi antara berbagai kekuatan sosial. Konflik itu terjadi antara sesama partai dan di antara keseluruhan kekuatan politik. Demikian menurut Arbi Sanit dalam bukunya Sistim Politik Indonesia sambil meguntip pendapat Duverger yang membagi atas tiga tipe

konflik : Pertama konflik yang sama sekali tidak mempunyai dasar yang prinsipil ; Kedua konflik yang timbul karena terdapat perbedaan mengenai bagian - bagian dari satu prinsip itu sendiri ; dan ketiga konflik yang sama sekali bertolak dari satu prinsip dasar. Kalau kita telusuri konflik partai di tanah air, pada dasarnya berkisar pula pada tiga jenis konflik yang di utarakan oleh Duverger itu. Bahkan bisa dikatakan konflik jenis ketiga mengandung potensi yang senantiasa dapat merebak, yaitu konflik mengenai dasar negara.

Di jaman Orde Lama penyelesaian konflik jenis ini diselesaikan Soekarno dengan cara dekrit, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, bahkan kemudian Soekarno melakukan proses pelembagaan NASAKOM bagi partai - partai politik. Hal mana sudah menjadi angan - angan Soekarno sejak dulu, ketika masih Pemuda di PNI 1930, angan - angan mensinkretiskan tiga ideologi : Nasional, Agama dan Komunis. Bahkan dalam Pidato tanggal 17 Agustus 1958 Soekarno mengemukakan maklumat Pemerintah No. 3 1945 yang melahirkan banyak partai, sebagaimana di kemukakan oleh Wall Paragoan dalam buku Supremasi Sipil Lewat Multi Partai, Soekarno mengemukakan : maklumat itu telah membawa bencana.

Analisa mengenai upaya penyelesaian konflik oleh Soekarno dengan cara seperti itu dipermaikumkan bahwa hanya meyoroti upayanya bukan intensitasnya atau keberhasilannya, mengingat Soekarno tidak pernah berhasil melaksanakan ide dan rencananya untuk menyederhanakan sistim kepartaian secara berarti. Alfian dalam " Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia " menyatakan suasana ketidak stabilan yang tumbuh dan berkembang di jaman rezim Soekarno telah menjadikannya seorang tawanan dari pertentangan - pertentangan politik yang tidak pernah berhenti antara kekuatan - kekuatan politik yang berada di sekitarnya atau di bawahnya. Herbert Feith mengungkapkan bahwa antara tahun 1963 - 1965 terjadi persaingan yang sengit antar partai, sebagai keprihatinan partai non komunis terhadap kemajuan golongan komunis.

Dijaman Orde baru, untuk meredam konflik mengenai dasar negara, Soeharto menjadikan Pancasila sebagai satu - satunya azas setelah sebelumnya mempusikan beberapa partai menjadi dua dan satu organisasi sosial politik dikenal dengan Golkar. Pusi itu dimulai dari pengelompokan Partai di DPR ke dalam tiga Fraksi. Pertama Kelompok Persatuan Pembangunan dideklarasikan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tanggal 5 Januari 1973. Berpusi Partai - partai Muslim. Kedua Kelompok Demokrasi Pembangunan dideklarasikan 10 Januari 1973 dengan nama Partai Demokrasi Indonesia.

Berpusi Partai - partai Nasionalis dan Kristen. Ketiga kelompok Karya Pembangunan berakar dari sekber Golkar, terbentuk 1964.

Satu hal yang menarik untuk di catat bahwa perbedaan yang jelas antara Soekarno dan Soeharto dalam hal ini adalah apa yang dikemukakan Alfian bahwa Soekarno terutama mengandalkan kekuasaan pada pengaruh kharismanya sebagai seorang Pemimpin dan pada kepandaianya memegang kunci keseimbangan antara kekuatan - kekuatan politik yang saling bersaing dan bertentangan, dalam hal ini AD dan PKI. Sementara itu Soeharto terutama mengandalkan kekuasaannya sebagai kepala eksekutif membangun organ - organ politik yang kuat, militer dan Golkar.

Dewasa ini konflik dasar negara yang terjadi diantara partai - partai politik dapat dikatakan tidak sesengit yang lalu, minimal hal demikian tidak nampak secara utuh dipermukaan, tetapi dapat kita menggerutuh bahwa partai-partai yang ada sekarang tidak berkuku dan tidak bergigi meredam konflik dimasyarakat .

Konflik sosial itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila partai-partai politik yang ada mampu memerankan fungsinya sebagai sarana pengatur konflik.

Dalam kondisi demikian pemerintah harus punya terapi penyelesaian. Mungkin patut di renungkan prediksi politik 2002 " Indosiar ", Selasa 2 Januari, bahwa Presiden diharapkan memiliki kelincahan dan kelihaihan menempatkan diri pada konflik partai dan tidak memihak pada konflik intern partai.

Menghendaki Megawati tidak terjebak dalam konflik intern partai, tentu sangat dilematis jika Megawati di hadapkan pada kemelut PKB. Andilnya memecah partai itu tidak dapat dipungkiri. Bukan hanya karena Matori Abduljalil berpihak pada pelaksanaan "SI - 2002 ", tetapi juga karena Matori kemudian mendapat legitimasi (pengakuan) setelah ditunjuk menjadi Menteri.

Selain itu dapatkah Megawati menghindar dari " elu-elukan warna merah " yang menyambutnya ketika berkunjung ke satu daerah. Pada satu sisi ia harus bersifat netral agar tidak mengkhusus pada satu organ politik saja seperti yang terjadi di masa lalu, yang hubungannya bisa berlalu begitu saja jika terjadi hal-hal yang crucial. Pada sisi lain partai-

partai politik yang ada tidak dapat menyajikan pemecahan yang bersifat teknokratis bagi permasalahan general yang kita hadapi.

Partai - partai itu cukup dapat bergelut dengan masalahnya sendiri. Justru itu jangan tersinggung jika Rahman Arge (Fajar 30 Desember) mengajak kita tertawa - tawa biar tanpa alasan karna " dunia politik kita telah mengambil alih " kaca mata kuda " yang cuma bisa

menjangkau (Vision 2004) " jika demikian halnya partai politik kita sekedar kontestan pemilu. Ha.... ha... ha..... !

Penulis adalah
Penyunting Majalah Mimbar Aspirasi
DPRD Prop.SulSel

Dari Gusdur ke Mega, Sebuah Pendidikan Politik

Oleh : **M. Idris Patarai**

Pukul dua puluh tiga kurang sedikit melalui Info Utama Indosiar Amien Rais dengan sangat confidence menyampaikan : “Rapat Paripurna MPR dilaksanakan besok (sabtu, 21 Juli 2001). Rapat Paripurna itu dalam rangka SI atau bagian dari SI”. Demikian antara lain pimpinan parlemen itu menjelaskan kepada Indosiar. Hal itu mengingatkan saya pada satu hari, 24 Agustus 1999, waktu itu melalui pers Gusdur memastikan dirinya untuk maju sebagai calon Presiden, tentunya telah dielus-elus oleh “poros tengah” waktu itu Gusdur sangat confidence menanggapi pencalonan dirinya sebagai Presiden oleh Amien Rais. Ia yakin dukungan Amien Rais kepada dirinya sangat tulus. Demikian antara lain isi pernyataanya waktu itu.

Optimismenya menjadi Presiden kemudian mengundang perhatian banyak orang. Tony Hasym dan Yus Ariyanto dari “Forum” dalam satu wawancara menanyakan kepada Gusdur : “Kalau jadi Presiden. apa yang anda lakukan pada hari 100 pertama ?”. “Tentu saya harus mengatasi masalah-masalah ekonomi dan menghadapi krisis bangsa. Dan yang penting juga adalah menimbulkan sense of confidence atau rasa percaya diri di kalangan bangsa kita. Nah disamping itu, saya harus memulai upaya membangun pemerintahan yang bersih, clean and good government.

Lalu siapa yang menduga kemudian kalau Gusdur diberi memorandum dan kemudian di undang memberi pertanggungjawaban dalam SI yang digelar dengan agenda clean and good government, imbas dari Brunei Gate dan Bulog Gate, dari sanalah bola itu digelindingkan. kontraversi mengenai SI kemudian menjadi topik diskusi dan perbincangan para pakar tata negara, terutama ketika Gusdur mengancam Pansus Bulog Gate dan Brunei Gate sebagai Pansus Illegal dan penyelenggaraan SI yang minta pertanggungjawaban Presiden dinilainya sebagai hal yang tidak kontitusional.

Pemahaman yang demikian sangat kental di kalangan Presiden. Bahkan pakar ketatanegaraan Prof. Dr. Philipus dalam acara interaktif TVRI, sabtu 21 Juli mempertanyakan haluan negara yang mana yang Presiden langgar. Apa kreteria haluan negara itu. Ini yang harus dijelaskan MPR menurutnya. Namun kemudian pendapat itu dikomentari oleh Prof. Dr. Sully Lubis pada acara yang sama bahwa tidak perlu dipersoalkan antara haluan negara GBHN. GBHN itu adalah haluan negara dan haluan negara adalah GBHN. MPR melaksanakan SI minta pertanggungjawaban Presiden

mempunyai dua pendekatan menurut beliau, yaitu secara konstitusi dan secara politik. Secara konstitusi Presiden memang harus memberi pertanggungjawaban kepada MPR. Berikutnya secara politik Presiden adalah mandataris MPR yang harus bertanggungjawab kepada MPR.

Mengenai mandataris, TAP MPRS Nomor : XIV/MPRS/1966, menyebutkan bahwa Mandataris adalah Presiden, mandataris berkewajiban melaksanakan putusan-putusan, berkewajiban memberikan laporan pertanggung jawaban mengenai pelaksanaan putusan-putusan itu.

Presiden adalah pemegang mandat dari MPR dan MPR adalah pemegang mandat dari rakyat, menurut Rousseaupacte de gouvernement. Jika Presiden tidak memberikan pertanggungjawaban yang diminta, maka Presiden tidak hanya tidak melaksanakan putusan-putusan MPR, melakukan pembangkangan terhadap MPR, tetapi sekaligus telah melanggar ketentuan MPRS.

Kenyataannya adalah Presiden bukan hanya menolak menghadiri SI, menolak memberi pertanggungjawaban, tetapi bahkan melakukan tindakan reaktif memaklumkan pembekuan MPR dan DPR ;mengembalikan kedaulatan rakyat melalui pembentukan Badan yang akan melaksanakan Pemilu selambat-lambatnya satu tahun serta membubarkan Partai Golkar melalui fatwa MA. Otomatis maklumat yang disebut-sebut Dekrit itu mendapat reaksi keras dari pimpinan MPR dan Ketua Umum DPP Golkar. Amien Rais tidak mengindahkan sedikitpun, bahkan memajukan jadwal sidang paripurna SI dari pukul sembilan menjadi pukul delapan, sementara Akbar Tanjung mengecam Presiden telah melakukan tindakan diktator.

Dengan komulasi semua itu menjadi konsideran ketentuan MPR yang memberhentikan Presiden menyoroti ketidakhadiran Presiden, penolakan bertanggungjawab dan penerbitan maklumat yang semuanya dikategorikan pelanggaran haluan negara. Sehingga jika awalnya sebagian pakar ketatanegaraan melihat masalah ini sebagai masalah politik telah serta merta beralih menjadi masalah hukum yang kemudian bisa menjadi bukti ketidakmampuan Gusdur berpolitik. Dwi Fortuna Anwar mengomentari bahwa Dekrit Abdurrahman Wahid memperjelas dirinya melanggar konstitusi, menjebak diri sendiri. Dwi fortuna bahkan menyayangkan, betapa Gusdur tidak memanfaatkan waktu pada saat memorandum pertama dan kedua untuk melakukan dialog-dialog, tetapi malah mengabaikan dengan melakukan perjalanan keluar negeri, menuduh pansus illegal dan menantang DPR.

Abdurrahman Wahid telah luput dan tidak efisien tidak mengimprovisasikan institusi-institusi formal yang ada dibawahnya atau yang menjadi mitra kerjanya. presiden yang memiliki kekuasaan sebagai konsekwensi negara modern yang menyerahkan urusan pemerintahan dalam arti

luas ke tangan eksekutif, menurut W. Ansley Wynes, kekuasaan dalam negara yang melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Undang-undang Dasar 1945 membebani (istilah Prof. Dr. Ismail Sunny, SH dll) , lembaga Presiden – DPR adalah lembaga eksekutif – legislatif, tidak saling menjatuhkan, tetapi Harum Al-Rasyid menilai DPR bisa saja ganti baju menjadi MPR.

pertanggung jawaban presiden kepada awalnya adalah berupa singular, maka pada menteri hanya memiliki loyalitas tunggal kepada Presiden.

Wakil Presiden adalah “pembantu Presiden” maka Presiden dan Wakil Presiden di pilih satu paket. Presiden dengan kekuasaan-kekuasaan administratif dengan apa yang disebut “pouvoir reglementair”; kekuasaan yudikatif memberi grasi, amnesti dan rehabilitasi ; kekuasaan militer, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang, bahkan memiliki apa yang disebut prerogatif sebagaimana telah dipraktikkan di masa-masa lalu, termasuk *staatnoodrecht* *subjectief* *noodverordening*.

pembebanan kekuasaan Presiden seperti itu berimplikasi pada kecakapan seorang Presiden yang tidak hanya mengandalkan suplei informasi, tidak efektif memanfaatkan lembaga yang ada yang sudah diprediksi secara ketatanegaraan. Lalu apakah ini alasannya sehingga tuntutan mundur Abdurrahman Wahid menjadi solusi penyelesaian masalah. ada dua jawaban bagi kaum politisi parlemen yang beraliran pragmatis, sebagaimana diungkap dalam buku “Koalisi Mengganti Gusdur atau Mencari solusi” Buku yang merupakan rangkuman dari Curah Pendapat Anggota MPR/DPR 11 Nopember 2000 pertama, disebutkan bahwa anggota parlemen itu dilanda gejala kelelahan psikis akibat kontraversi demi kontraversi yang diciptakan Gusdur. Kedua, tuntutan mundur itu tidak bisa tidak juga menggambarkan rendahnya kompetensi dan kepabilitas anggota parlemen dalam menentukan berbagai matrik pemecahan masalah yang bercorak teknokratik. (***)

SUATU MALAM DENGAN JUSUF KALLA

Oleh : M. Idris Patarai

Kebersamaan dengan Jusuf Kalla diisi dengan pembicaraan politik, yaitu karena malam itu silaturahmi diwarnai dengan pembicaraan calon presiden dan pelaksana acara itu adalah Partai Golkar Sulawesi Selatan. Hajatan itu memang khusus untuk itu, mendengar kesediaan tokoh yang selama ini namanya disebut sebagai salah satu kandidat calon presiden yang akan ikut dalam konvensi Partai Golkar. Sepulang dari pertemuan itu, bukan hanya kesediaan yang kita dapatkan, akan tetapi juga kesiapan serta ceritera berawal darimana kesediaan itu. Ternyata sederhana sekali, yaitu berangkat dari satu kesadaran bahwa “Indonesia ini harus diurus lebih baik”. Dengan pertumbuhan ekonomi hanya 3,5 % mengindikasikan Indonesia ini tidak diurus, karena menurutnya tanpa diurus pun pertumbuhan ekonomi kita memang seperti itu. Indonesia ini akan baik jika pertumbuhan ekonominya mencapai 6 %. Faktor ini mendorongnya untuk maju. Keyakinan akan kemampuan untuk mewujudkan hal tersebut, berbekal pengalaman dua kali menjadi menteri.

Ada yang sangsi malam itu, termasuk saya, bukan terhadap kemampuan Jusuf Kalla, tetapi terhadap kemungkinan memenangkan konvensi dan untuk mendapatkan suara pemilih yang relatif jumlahnya lebih banyak di Pulau Jawa, apalagi Jusuf Kalla itu “terlalu bugis”. Istilah ini diungkapkannya sendiri. Menurutnya, seperti itu dicapkan orang kepadanya. Lalu ditanggapinya “Tidak apa apa, memang saya bugis, mau apalagi...”

Anda tentu mengingat sesuatu menyimak perbincangan seperti ini. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa Presiden Indonesia itu identik dengan suku tertentu. Hal inipun kemudian ditepisnya, “Itu tidak selamanya berlaku, ada kasus kasus tertentu tidak harus seperti itu”.

Sampai di sini saya akhirnya berpikir, bahwa nasionalismelah yang mendorongnya masuk konvensi, suatu proses seleksi kepemimpinan nasional khas Partai Golkar yang oleh banyak pihak menolehnya secara pesimistis. Namun ada pula yang mengakui konvensi Golkar itu sebagai suatu langkah maju sambil menunggu kenyataan akhir dari konvensi yang saat itu hingga pelaksanaannya mampu melambungkan Golkar dalam perbincangan keseharian, mencuri perhatian publik dan cukup menggetarkan beberapa pimpinan partai politik. Tidak sedikit yang sinis dan ada yang kecewa, bahkan Nurcholis Madjid mengawali urung untuk ikut disusul Sri Sultan Hamengkubowono.

Sebagai salah seorang yang sangsi terhadap kemungkinan “Kak Ucu”, demikian saya menyapanya malam itu ketika berdialog yang dipandu langsung H. Aji Padindang didampingi

Ketua DPD Golkar H.M.Amin Syam.Tidak tanggung tanggung saya menyebut contoh B.J. Habiebie pada Pemilu 1999 .Diusung dan dijadikan issue politik untuk meraup suara pemilih ,khususnya di Sulawesi Selatan ,hasilnya suara Golkar cukup melambung .Namun pada Sidang Umum MPR yang istimewa memilih Presiden dan Wakil Presiden suara Golkar pecah dan K.H.Abdurrahman Wahid terpilih.Pengalaman ini sangat logis bila menimbulkan kesangsian baru bagi banyak kalangan ,bahwa H.M.Jusuf Kalla tidak akan memenangkan konvensi itu.Sangat beralasan memang ,bukan hanya karena kemudian ada ketuk palu yang membebaskan Akbar Tandjung dari ancaman jeratan hukum atas kasusnya,tetapi lebih dari itu,krisis politik sangat dipengaruhi oleh perilaku politik yang tidak konsisten.,ini juga cukup mensugesti.

Kemudian suatu perubahan yang spektakuler tiba tiba terjadi, sebelum konvensi Partai Golkar berlangsung H.M.Jusuf Kalla menyatakan mundur .Sekalipun kemudian kemundurannya itu melahirkan kontraversi,khususnya di kalangan pemuka Golkar,tetapi Ia nyatakan telah berupaya melakukannya dengan baik,dengan izin dan pamit,sebagai seorang satria.Menarik diri dari Konvensi dan bukan dari keanggotaan Golkar sudah barang tentu dilakukannya dengan perhitungan yang tidak hanya memakai optik politik,tetapi pun juga matematis sebagai halnya seorang Saudagar.

Kita ketahui gambaran awal keikutsertaan Jusuf Kalla memang tidak menjanjikan harapan karena harus diakui bahwa tokoh Golkar yang lain masih merebut simpati yang signifikan,Jusuf Kalla,misalnya berada pada urutan ketiga ,yaitu diusulkan oleh 24 DPD Partai Golkar Provinsi dari 28 DPD sebagai bakal calon peserta konvensi ,lebih tinggi dari Akbar Tandjung yang hanya 21 DPD ,di atasnya hanya ada dua,Aburizal Bakrie dan Wiranto,masing-masing 27 dan 25 DPD yang mengusulkan(Kompas,31 Juli 2003).

Dengan tidak melalui konvensi ,yang mari kita lupakan itu,H.M.Yusuf Kalla (MJK) telah benar benar menjadi salah seorang calon Wakil Presiden mendampingi Susilo Bambang Yudoyono (SBY).Saya hanya ingin segarkan,bahwa pertemuan di PMCC yang diprakarsai Golkar Sulawesi Selatan bulan Juli 2003.Pak Jusuf banyak menerima masukan dan harapan,jika kelak bisa “menjadi”.Waktu itu saya tidak menyampaikan harapan pun masukan ,sekalipun memang saya ikut bicara,tetapi saya dapat pastikan bahwa harapan yang akan saya sampaikan tidak sesuai dengan suasana emosional yang melingkupi pertemuan waktu itu,sehingga saya urungkan,karena khawatir bisa memancing suara “Huuuuu” dari hadirin.Maklum konsepnya tidak populer.,sekalipun kemudian menjadi beban :mengapa tidak diutarakan saja.

Masih segar rasanya dalam ingatan dan tetap rapi tersimpan dalam catatan .Pak Jusuf malam itu menyampaikan,bahwa untuk maju menjadi calon Presiden ,Dia memulainya dengan pengorbanan

dan akan melakukan pengorbanan .Pengorbanan pertama yang akan ia lakukan ,ia sampaikan setelah mengumpulkan semua keluarga untuk “ siap siap “.Karena menurutnya hajatan besar seperti ini akan memerlukan *cost*,biaya .Sudah barang tentu bukan untuk “MP” (money politic),karena untuk *cuap cuap* atau ketemu ketemu tenggorokan harus basah,selorohnya.

Itu pengorbanan pertama ,yaitu sebelum menjadi.Adalagi pengorbanan kedua yang beliau utarakan malam itu,yakni pengorbanan setelah menjadi. Insyaallah jika terpilih ,Ia minta kepada keluarga untuk “menjauh”,alasanya tidak sedikit pejabat rusak ,karena pengaruh keluarga.

Dari ungkapan pengorbanan dari lubuk hati yang dalam yang disampaikan dengan kata yang laksana keluar tidak melalui mulut ,hadirin menyadari, terhenyak,mendecak dan berpikir bahwa Jusuf Kalla serius. Siap untuk maju ,demi Indonesia yang pada awal pertemuan ia gambarkan dengan penuh prihatin.

Lalu apapula yang tertunda malam itu yang saya urungkan.Sebenarnya saya hanya ingin menambahkan,bahwa bukan hanya keluarga yang harus menjauh dari Pak Jusuf jika kelak terpilih dan menjadi,tetapi kita yang di Sulawesi Selatan ini yang secara *ethnosentris* mempunyai kedekatan..Harus ikhlas menyerahkan Jusuf Kalla menjadi milik nasional. Hentikan menarik-narik ujung celananya hanya untuk mengurus Sulawesi Selatan saja Bahkan saya ingin katakan malam itu ”Jangan pilih menteri dari Sulawesi Selatan,Kalau Bapak sudah Presiden atau Wakil Presiden,itu sudah cukup.Kalaupun ada yang muncul di Kabinet dan itu bukan dari Bapak ,itu persoalan lain”.Ungkapan saya ini tentu sangat kontroversial dan memancing banyak kalangan untuk panik ,bahkan berang.Sebenarnya saya hanya ingin mengatakan,bahwa salah satu kelemahan Bapak B.J. Habibie dulu,ialah karena terlalu dikerumuni orang Sulawesi Selatan.Namun demikian yang ini tidak perlu menyita energi dulu.,karena perlu pula dipikirkan bahwa akan ada pengorbanan ketiga.Selain pertama dan kedua tadi.Pertama, sebelum menjadi.Kedua ,setelah menjadi.Ketiga,kalau tidak menjadi.....Sekalipun memang ada prasasti “ Siap menang siap kalah “.(***)

Penulis adalah Pemerhati Pilpres

PERSPEKTIF DEMOKRASI DALAM OTONOMI DAERAH

OLEH : M.Idris Patarai

Tidak ada perubahan yang substansial,itu yang kita hafal betul ,ketika wacana revisi UU No 22 Tahun 1999,tentang Pemerintahan Daerah mencuat ke permukaan.Lalu tenang tenang saja kita menunggu datangnya rencana tersebut.Namun apa yang terjadi ,ketika pertamakali rencana itu dimediasi oleh Departemen Dalam Negeri ,tak luput Hari Sabarno bicara panjang mengenai hal ini dan menimbulkan tanggapan luas bernada berang ,khususnya bagi yang membidani lahirnya Undang Undang tersebut .Bagaimana tidak sekusut itu,undang undang yang sebelumnya terdiri dari 16 bab akan menjadi 18 bab,134 pasal akan berubah menjadi 152 pasal .Lebih banyak dari yang direvisi ,sehingga terkesan terjadi perubahan total.

Bukan hanya itu, setidaknya ada empat poin menonjol yang akan mengalami perubahan mengacu pada konsepMendagri.Ke empat poin itu,yakni :Seleksi untuk menjadi perwira ,bintara dan tantama Polri dilakukan di propinsi dengan memperhatikan sistim hukum ,budaya,adat istiadat dan kebijakan Gubernur.Poin selanjutnya adalah,Ketua Dewan Pertimbangan Badan Otonomi Daerah dirubah menjadi Dewan Otonomi Daerah ,kalau sebelumnya diketuai oleh Mendagri ,maka konsep revisinya diketuai Wakil Presiden danMendagiPelaksanaHarianSeterusnya draf revisi tersbut mengutip

konsep kelautan ,bahwa laut adalah wilayah negara yang dikuasai pemerintah,yang pengaturannya tidak mungkin didesentralisasikan karena dua hal : pertama aspek keamanan nasional,keadilan antar daerah dan hajat hidup orang banyak ; kedua bertentangan dengan undang undang pembentukan daerah yang menyebutkan laut sebagai batas wilayah ,bukan bagian wilayah. (Kompas,30 Januari 2000)

Namun demikian ,bukan itu yang membuat "wah" orang daerah,akan tetapi ada pasal yang mengejutkan ,yaitu pasal yang menyangkut DPRD dapat dibubarkan oleh Presiden. "Tidak heran jika hal ini dinilai sangat ekstrim mengingat keberadaan DPRD mengindikasikan bahwa di daerahpun pemerintahan dilakukan atas dasar permusyawaratan.Bhenyamin Hossein ,1995menyebutkan bahwa setidaknya-tidaknya ada dua pasal dalam konstitusi perlu dipahami sungguh sungguh bila kita ingin memahami betapa

perlunya desentralisasi dan otonomi itu. Pasal itu ialah pasal 1 ayat (1) mengenai bentuk kesatuan negara Indonesia dan pasal 2 ayat (1) mengenai utusan dari daerah-daerah dalam keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (hal ini masih relevan dengan Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen, sekalipun istilah utusan dari daerah-daerah dalam keanggotaan majelis itu dikenal dewasa ini dengan DPD, Dewan Perwakilan Daerah). Pasal pertama menentukan bobot dan kadar otonomi daerah, sedangkan pasal kedua bertalian dengan posisi dan peranan daerah otonom dalam skala politik nasional.

Selama masa penjajahan Belanda hingga tahun 1903, Hindia Belanda merupakan "gecentraliseerd geregeerd land", dekonsentrasi yang sangat hirarkis untuk keperluan penetrasi politik. Pada 1903 barulah lahir undang-undang desentralisasi yang membuka kemungkinan untuk mewujudkan daerah otonom yang meliputi kresidenan (gewest) atau bagian dari kresidenan (geedelte van een gewest). Hal demikian mengandung strategi kolonial untuk mencapai tujuan "efisiensi administrasi", (A.D.A. Dekat Angelino: 1931. J.S. Furnuval: 1944. Hary J. Benda: 1979, Bhenyamin Hoessein: 1995)

.Desentralisasi model Pemerintahan Belanda tersebut adalah desentralisasi yang lebih diarahkan untuk mencapai efisiensi administrasi dengan mengorbankan nilai demokrasi.

Hal tersebut dapat dipahami bila kita mengamati karakteristik penyelenggaraan desentralisasi di Hindia Belanda, dimana pembentukan daerah otonom dimulai di kota-kota administrasi, peran ganda pimpinan eksekutif, komposisi keanggotaan dewan yang direkayasa dan dewan berfungsi sebagai lembaga penasehat. Nanti dalam periode Wet op de Bestuursvorming 1922, strategi itu mengalami sedikit perubahan. Tujuan desentralisasi untuk mencapai efisiensi administrasi dan partisipasi melalui pembentukan propinsi otonom, kotapraja otonom dan kabupaten otonom. Nilai demokrasi sedikit diakomodasi dalam desentralisasi dengan cara memberi kesempatan kepada penduduk pribumi untuk terlibat dalam pemilihan anggota dewan. Fungsi dewan tidak lagi sebagai lembaga penasehat melainkan dalam bidang legislative, demikian Bhenyamin Hoessein. Hingga masa kemerdekaan semua aturan menyangkut otonomi daerah dengan mengacu pada konstitusi yang berlaku, senantiasa memperhatikan aspek-aspek demokrasi, sekalipun desentralisasi yang dianutnya masih sangat variatif dalam pelaksanaannya dan sekalipun undang-undang itu tidak semua diberi nama undang-undang tentang

desentralisasi, tetapi kita cukup pahami bahwa itulah hakekat yang dianutnya. Undang-Undang yang pernah ada tersebut, yaitu: Undang-Undang No. 1 Tahun 1945; Undang-Undang No. 2 Tahun 1948; Undang-Undang No. 1 Tahun 1957; Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959; Undang-Undang No. 18 Tahun 1965; Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dan terakhir yang berlaku saat ini dan disebut-sebut akan direvisi itu adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999.

Kalau kita cermati UU Nomor 22 Tahun 1999 azas desentralisasi itu bersifat devolusi, yaitu desentralisasi dalam arti yang sebenarnya yang populer disebut dengan "pemberian otonomi" yang oleh Bintoro Tjokroamdjoko menyebutnya sebagai suatu delegasi kewenangan secara hukum, yang berarti penyerahan tugas-tugas pemerintahan kepada tingkat daerah yang tidak saja bersifat administratif, tetapi dengan demikian juga bersifat politik, yaitu pengambilan keputusan terakhir pada bidang-bidang tertentu diserahkan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi di bawah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, Kepala Daerah tidak lagi merangkap sebagai kepala wilayah, demikian halnya daerah kabupaten dan kota tidak merangkap sebagai daerah administrasi. Terdapat penguatan fungsi DPRD sebagai lembaga pengawas terhadap eksekutif sebagai konsekuensi pemilihan dan penetapan kepala daerah oleh DPRD dan prinsip "accountability" kepada rakyat dari otonomi yang menekankan prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat.

Namun demikian pengendalian Pemerintah Pusat masih mendominasi kebebasan daerah yang jauh dari sekedar menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pernyataan ini dikemukakan oleh Syamsul Bachri dengan mengambil contoh pada pasal 32 ayat (3), bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan selaku kepala daerah, Bupati/Walikota bertanggungjawab kepada DPRD. Namun demikian ketentuan ini dibatasi kemudian oleh ayat (4), di mana Peraturan Tata Tertib DPRD yang mengatur tentang pertanggungjawaban Kepala Daerah masih harus disesuaikan dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah. Demikian halnya dengan tatacara pertanggungjawaban Kepala Daerah yang ditolak untuk kedua kalinya oleh DPRD ditetapkan oleh Pemerintah. DPRD tidak berwenang membuat peraturan tata tertib yang isinya tentang pengusulan pemberhentian Kepala Daerah yang pertanggungjawabannya ditolak untuk kedua kalinya. Posisi lemah DPRD seperti itu yang menurut konstitusi keberadaannya untuk memberi sugesti sekaligus legitimasi bahwa di

daerahpun pemerintahan dilaksanakan musyawarah akan semakin tersudut dengan adanya keinginan dari konsep revisi bahwa DPRD dapat dibubarkan oleh Presiden. Kalau demikian bagaimana tinjauan kita terhadap demokrasi pemerintahan daerah.***

Masyarakat primitif ancumannya adalah binatang buas.

Masyarakat modern ancumannya adalah sesama manusia

DIPERLUKAN NASIONALISME PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

Oleh :M. Idris Patarai
Staf DPRD Propinsi Sulawesi Selatan

Ada pertanyaan mendadak sontak memenuhi kepala saya saat sedang hormat pada “merah putih” yang berkepak kepek di sisi tiang yang membusur langit, laksana ekspresi saya yang tengah tengadah pada sang bendera itu. Pertanyaan yang berkepak kepek di antara alunan *Indonesia Raya* yang mengiringi pengibarannya, ialah: “Siapa mula mula berpikir kita harus merdeka ?”

Pertanyaan itu tiba tiba saja melompat keluar kemudian perlahan lahan terjawab sendiri. Untung saja, karena akan menjadi bodoh jika diajukan pada orang lain, paling tidak orang tergelitik gelih mendengarnya dan bisa saja berpikir, “ ini aneh”. Bahwa ilham dan semangat merdeka itu bermula dari nasionalisme, itupun setelah mengingat-ingat organisasi Boedi Oetomo, berdiri 20 Mei 1908, sebagai organisasi pertama di antara bangsa Indonesia yang disusun dengan bentuk modern dan besar artinya. Dari akar inilah menurut A.K. Pringodigdo (Endang Shaifuddin Anshari, 1986). gerakan nasionalis sekuler lainnya muncul sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan mencita citakan Indonesia merdeka berdasarkan kebangsaan. Gerakan Nasionalis sekuler itu kemudian ditandai dengan lahirnya partai politik sekuler.

Tidak hanya sampai di situ bila kita berkeinginan menggugah nasionalisme partai politik. Perbincangan kita pun akan berkembang jika kita kemukakan pandangan kaum nasionalis Islam, bahwa berdirinya *Sarikat Dagang Islam*, 16 Oktober 1905, sebagai titik tolak pergerakan nasional. Ditandai lahirnya partai politik berbasis Islam setelah sarikat itu sendiri mengubah nama menjadi Partai Sarekat Islam (PSI), tahun 1923.

Lalu kemudian tidak asing bagi kita jika ada yang menyatakan bahwa kemerdekaan itu adalah keinginan politik, penuntutan dari kebebasan politis dari kolonoal Belanda. Bermula dari gerakan social, kedaerahan, keagamaan dan oleh mereka yang tergolong cendekia yang sempat mengecap pendidikan secara barat, kendati kita ketahui tabiat Belanda yang hampir tidak memberi kesempatan kepada kaum nasionalis untuk membentuk partai politik yang didukung rakyat.

Namun kenyataannya jauh sebelum kemerdekaan partai-partai di tanah air sudah didirikan dan dengan nasionalismenya telah meretas jalan menuju Indonesia merdeka. Sekalipun kita mengenal pula sebelumnya ada perlawanan-perlawanan terhadap kekuatan asing yang pada beberapa literatur, periode perjuangan seperti itu disebut pra nasionalisme: "*the pregenitor of Indonesian Nasionalism*". Namun demikian periode itu hanyalah ukuran waktu yang dibaliknya ada nilai yang bersifat konstan, sehingga yang berbeda hanyalah tantangan yang dihadapi masing-masing generasi, nasionalisme selalu diperlukan, tanpa menghubungkannya dengan satu kelompok tertentu atau aliran tertentu, apalagi mempertentangkannya. Sekalipun kita menyadari bahwa di tanah air pernah terjadi perseteruan-perseteruan antar golongan nasionalis, katakanlah nasionalis Islam dengan nasionalis sekuler pada permulaan tahun 1930-an atau golongan nasionalis yang pro dan anti Jepang pada tahun-tahun sebelum 1942.

Bagaimana mengungkapkan harapan dan menuangkan kekesalan terhadap peristiwa-peristiwa sejenis *Buleleng* kepada partai-partai politik yang berhasil menyeberangi verifikasi, mengacungkannya *victor* memasuki arena pemilu 2004, agar mampu menjaga martabat bangsa dalam even politik sejenis pemilu, itulah yang menjadi kekhususan yang menarik untuk kita unkit.

Pengutamakan nasionalisme dalam menjalankan fungsinya sebagai *intres agregation* atau *intres articulation* menjadi rambu-rambu yang patut ditancapkan lebih tinggi dari bendera partai yang bertengger di pohon-pohon. Dengan *nation* diharapkan partai tidak tergiring dan terjebak dalam satu situasi yang memandang: partai adalah segalanya, merasa benar sendiri dan mengisolasi yang lain secara apriori, suatu sikap yang cukup memancing suasana panas. Aksi pengrusakan kantor partai politik oleh massa panatik partai tertentu, pembakaran bendera dan atribut partai lainnya tuntutan pembubaran, bahkan sampai pada tindakan pembantaian dan pembunuhan, telah cukup membekali asumsi kita, bahwa telah terjadi kegagalan, sebut saja kesalahan partai politik dalam melakukan pendidikan politik, bahkan gagal menanamkan hakekat partai politik sebagaimana disebutkan **Huntington**, bahwa partai politik sebagai produk politik modern dibutuhkan guna "mengorganisir" keterlibatan massa dalam kegiatan politik. Untuk hal ini diperkuat **Sigmund Neumann**, bahwa kediktatoran berkembang di kalangan massa yang "tidak berbentuk". Kita simak pula pertimbangan BP-KNIP, pada rapatnya 30 Oktober 1945 memutuskan untuk membentuk Partai Politik atas dasar konsep "multi partai" dengan harapan partai politik akan "memperkokoh perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan

pemeliharaan keamanan bangsa”.Dari sisi ini tidak ada salahnya jika kita menyandarkan harapan pada partai politik untuk memelihara ketentraman.

Kita pasti tidak bisa selesai berpikir dan merenungi, bagaimana mungkin massa partai tidak ubahnya dengan “bonek” massa pendukung partai sepak bola, tanpa doktrin. Pengecualian dalam hal ini jika kita mau menerima pendapat bahwa keterlibatan massa dalam partai politik dewasa ini memang melalui pendekatan “oblong”, “perut”, bukan desakan dari “dada” atau “jangkauan” kepala. Dan bagi kita, ini adalah kesalahan berikutnya yang dilakukan partai dalam merekrut massa. Dengan tidak mencoba untuk pesimis terhadap keberadaan partai partai dewasa ini yang kita harapkan membawa angin segar di 2004 itu, nampaknya tidak ada hal yang menonjol, kecuali jumlah yang bertambah secara kuantitas. Ada partai yang lahir tanpa “roh”, walaupun punya, sangat samar. Kita sebut tanpa roh jika kita selangkan dengan pendapat **Herber Feit**, bahwa partai itu ibarat tubuh dan ideology adalah rohnya, Klasifikasi partai partai itu masih seperti pada keberadaan partai pasca reformasi 1998, sebagaimana pula dikemukakan **Wall Paragoan**, sebagian memiliki hubungan dengan basis partai lama, kemudian ada yang sementara mencari basis tertentu pada segmen social tertentu; serta partai yang mempunyai ciri inklusif, terbuka. Bahkan kemudian kita dapat menyadari bahwa ada beberapa partai baru yang merupakan pecahan dari satu partai sebelumnya, lahir dari perseteruan, tepatnya perbedaan kepentingan, sempat memperebutkan nama partai, bolak balik ke pengadilan, dengan tujuan merebut symbol dan segmen pemilih.

Bagaimanapun, keberingasan massa partai sebagai suatu yang penomenal, partai politik yang terkesan “kosong” tidak bisa pula dipisahkan dengan sikap sebagian politisi yang senantiasa berjingkrak dari satu partai ke partai yang lain, bergantung siapa yang dapat memberi tempat duduk. Lebih parah dari yang bonek itu, politik perut!***

MILITER,APAKAH SEBUAH DUNIA YANG BERBEDA

Oleh M.Idris Patarai

Lima Oktober Dua ribu tiga, penulis mengangkat opini “Ada yang Terlalu Takut pada Tentara”,dimuat di koran ini tepat pada tanggal itu.Takut itu bermotif jika tentara berpolitik dan yang takut itu paling juga orang politik.Hakekatnya, ketakutan itu sendiri sudah *politik*.

Sebenarnya bukan hanya praktisi politik yang menghendaki tentara itu tidak lagi berpolitik tetapi merebak ke beberapa kalangan.Sikap TNI juga jelas ,tidak akan lagi.Akan tetapi kemudian dalam RUU Pemilu, TNI/POLRI diiming iming bisa memilih,anehnya tidak bisa dipilih,kalau mau dipilih harus memilih pensiun .Hal ini kemudian menjadi perhelatan baru,pro-kontra.

Hak politik bagi Anggota TNI/POLRI tempo hari itu sempat menjadi polemik sekalipun Menteri Dalam Negeri Hari Sabarno menghimbau:”Jangan diperdebatkan terlalu tajam” .Hari Sabarno bahkan dituding bahwa konsep itu dari dirinya dan dia tangkal,bahwa “ itu dari pemerintah”.

Berbagai unsur dalam masyarakat ikut memberi argumen,ada yang mengomentari cukup diberi hak memilih,jangan hak dipilih,ada yang menghendaki mereka itu netral saja.Munir,SH,aktivis perjuangan hak azasi manusia (HAM) bahkan sampai pada tahap menghimbau untuk menggugat jika hak dipilih itu diberikan .”Kalau hak untuk memilih masih diperdebatkan,tetapi kalau dipilih ini prinsip yang harus kita gugat”,tegasnya. (Kompas,13 Juni 2002).Akan tetapi ketika pimpinan TNI/POLRI meminta untuk sementara hak pilih pasif dan aktif itu jangan diberlakukan dulu,demi keberhasilan reformasi internal dalam tubuh TNI/POLRI,ditanggapi sebagai kepura puraan untuk mengambil simpati.

Selalu saja ada suara suara minor ,sumbang,termasuk yang mencuat saat ini dalam rangka pilpres.”Jangan pilih calon presiden dari militer”.Pernyataan profokatif ini menjadi tema tema spanduk pengunjuk rasa di berbagai kota .Lebih jauh,sebelumnya sudah bermunculan pernyataan serupa, tidak setuju jika tentara menjadi Presiden .”Jika tentara diperbolehkan menjadi calon Presiden atau Wakil Presiden akan mengancam supremasi sipil yang baru mulai ditegakkan”.Pernyataan yang ini lain lagi,lebih argumentatif.

Sebenarnya sah sah saja , boleh saja ,sepanjang tidak tendensius,tetap dalam koridor demokrasi dan tidak menyerang privasi orang.Barangkali pula perlu kita hitung hitung apakah mendikotomikan sipil-militer menguntungkan atau tidak.Ketakutan berlebihan dan tidak mendasar terhadap militer bisa meretakkan hubungan dalam rangka **supremasi sipil** yang harus dilandasi sikap

mental “*mutual respect*” dan “*mutual trust*”.Supremasi sipil tidak dapat ditegakkan dalam suasana berbeda dan tidak percaya pada militer. Demikian halnya reformasi internal TNI memerlukan dukungan yang tulus dari masyarakat.Namun bagaimana masyarakat dapat memberi dukungan jika keinginan memahami TNI hanya setengah hati,terdapat keragu-raguan dan *suggestive*.

Tekanan kepada militer menimbulkan rasa ingin tahu orang terhadap hubungan sipil –militer dan menimbulkan analisis,bahwa sikap apriori demikian muncul dibenak orang yang mempertentangkan sipil-militer.Suatu hal yang berisiko untuk didikotomikan.Kita semua akan terbentur jika tiba pada posisi mengisolasi militer,semacam larangan merebut hati rakyat dan menjadi tumpahan kemarahan *kronis*.

Di Indonesia ada kesamaran perbedaan sipil-militer,sebagaimana samarnya politik dan keamanan secara komperhensif.Dalam konsolidasi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan,hubungan sipil-militer menjadi histori tersendiri dan dari situ siapa yang bisa disalahkan jika TNI mengalami pertumbuhan *non military*,situasinya seperti itu.Sejarah,tuntutan perjuangan dan keselamatan negara kesatuan (NKRI) menuntut TNI mengambil peran. Ideologi yang tidak mantap,partai politik yang selalu konflik,legislatif yang lemah dan eksekutif yang senantiasa mengalami pergeseran kekuasaan merupakan faktor pendorong bagi institusi TNI memposisikan diri.”Sebagai pengawal Bangsa Indonesia,para pejabat militer tidak ingin melihat kekacauan sipil yang membahayakan negara dan persatuan nasional”,demikian antara lain ditulis Larry Diamond dan Marc F.Plattner (ed.) dalam Buku “Civil-Military Relations and Democracy”.

Jati diri yang demikian kemudian disertai membenaran membenaran ideologis,konstitusi dan filosofi menjadi realita yang menghimbau kita untuk jangan tutup mata.Perjalanan panjang TNI yang dikenal sebagai hal pertama yang kita miliki setelah merdeka memberi legitimasi sebagai institusi “untuk rakyat”: melindungi,mengamankan negara dan menjamin rasa tenteram. Namunpun demikian sejarah juga mencatat dan kita tidak boleh mengabaikan bahwa tentara melakukan pula tindakan tindakan *koersif*. Banyak kasus yang mendeskripsikan keterlibatannya,baik langsung maupun tidak langsung.Kasus kasus itu memperlihatkan tindakan tindakan represif dan aksi aksi kekerasan yang dilakukannya Hal ini kita harapkan telah menjadi agenda penting dalam konsepsi paradigma baru TNI yang professional .

Dilemmanya sekarang,sebagai hal yang patut kita pikirkan adalah realita antagonis .Sikap tegas pimpinan TNI untuk tidak masuk dalam wilayah politik senantiasa mengalami hambatan dan menjadi tidak mudah.Tidak hanya mengalami resistensi secara kompleks dari eksternal TNI dan *over pressure*, tetapi harus diakui bahwa perkembangan sejarah telah berpengaruh secara sosiologi dan

psikologi di kalangan sipil. Di satu sisi ada yang menghendaki militer “*politik no, professional yes*” Pada sisi lain elit sipil itu tidak “PD” (percaya diri) bila tidak bersama militer.” *Backmind* yang ada di kepala elit sipil masih militeristik”, demikian kritik J Kristiadi Pengamat Politik CSIS (Kompas 3 Agustus 2002). Bahkan ada yang menggoda tentara untuk berpasangan dalam pilpres 5 Juli, Amin Rais sendiri pernah menggadag gadang calon wakil dari kalangan TNI, “Jika didampingi wapres dari kalangan TNI ia yakin integrasi bangsa akan terjaga”, demikian dikemukakannya dalam jumpa pers dengan wartawan Australia di Jakarta, 12 September 2003. Anda juga tentu masih ingat jika Jenderal Endriartono Sutarto diberitakan mendapat tawaran paket wapres, sekalipun tidak membuat sang “panglima” tergiur. Hal ini menggambarkan kesejatan seorang prajurit.

Seorang prajurit sejati selalu menilai bahwa eksistensinya adalah sebuah panggilan, tugas dan pengabdian. Jika intensitas keadaan tidak membutuhkannya prajurit akan tetap pada posisinya, ini adalah konsistensi perjuangan. Untuk hal ini patut kiranya disisipkan di sini Tajuk Rencana Kompas tanggal 14 Juni 2002 yang diberi judul “**Benarkah Prajurit itu menuntut hak politik**”. Tajuk itu merinci bahwa “ukuran keberhasilan seorang prajurit dilihat dari kemampuan untuk melaksanakan tugas di lapangan, di medan perang. Kebanggaan seorang prajurit adalah pada bintang bintang di pundaknya. Seorang prajurit sejati tidak akan bangga bila menjadi bupati, gubernur atau menteri sekalipun, ia akan bangga apabila menjadi komandan, menjadi panglima....”

Jika demikian halnya, maka Wiranto, Susilo Bambang Yudoyono dan Agum Gumelar, calon Presiden dan Wakil Presiden, apakah pengecualian?. Bukan, karena TNI bagi mereka kini hanyalah apa yang kita sebut almamater, seperti calon yang lain punya almamater, dan semua calon itu berpeluang untuk terpilih menjadi **Presiden**, Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan perang. Suatu kekuasaan yang oleh Ismail Suny menyebutnya “kekuasaan militer” bagi Presiden (***)

Penulis adalah Staf DPRD Sulawesi Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. 1999. *Capita Selecta: Kebudayaan Sulawesi Selatan*. Ujung Pandang: Hasanuddin University Press.
- Appleby, P. 1952. *Morality and Administration in Democratic Government*. Baton Rouge: Louisiana State University Press.
- Beilharz Peter, 2005. *Teori Teori Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Budi Cahyati Sugijanto Soegijoko dkk, 2005. *Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Yayasan Sugijanto Soegijoko dan Urban and Regional Development Institut*, Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi.
- Budiardjo, Miriam, 1982, *Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta Pt. Gramedia.
- Bintaro, Tjokroamidjojo. 1991. *Pengantar Administrasi*. Jakarta: LP3ES.
- Bird, Richard, M and Francois Vaillancourt. 1998. *Fiscal Decentralization in Developing Countries*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crouch, Harold, 1991, *Militer dan Politik di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Deddy S Bratakusumah, "Kenapa Megapolitan?", Kompas 14 Maret 2006.
- Diamond, Larry & Marc F. Plattner (ed.), 2000, *Hubungan Sipil-Militer & Konsolidasi Demokrasi*, Jakarta, Pt. Raja Grafindo Persada.
- Edward L. Polinggomang dkk, 2004, *Sejarah Sulawesi Selatan*, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.
- Penelitian Prakarsa, 2010. *Inovasi sosial penyelenggaraan pemerintahan yang baik*.
Jurnal Sekretariat Negara, 2010. *Negarawan*, Jakarta, Sekretariat Negara.
- Goulet, Denis; *The Cruel Choice; A New Concept in The Theory of Development*; New York; Atheneum; 1977

- Hardiman F. Budi, 2010. Ruang Publik; Melacak Partisipasi Demokratis dari Polis sampai Cyberspace, Jakarta: Kanisius.
- Haque, M.S. 1994. The Emerging Challenges to Bureaucratic Accountability: A Critical Perspective, in A. Farazmand (ed.), Handbook of Bureaucracy. New York: Marcel Dekker.
- Hadi Sabari Yunus, 2005, Klasifikasi Kota, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi Sabari Yunus, 2005, Klasifikasi Kota, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Huntington, Samuel P., 1995, Gelombang Demokratisasi Ketiga dalam Abadi, Setiawan dkk, Jakarta Pt. Pustaka Utama Grafiti.
- Jo Santoso, 2006, Kota Tanpa Warga, Jakarta: KPG-Centropolis.
- Rustiadi Ernani dkk, 2009 Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, Jakarta : Yayasan Obor.
- Riggs, Fred W. 1964. Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Maniruzzaman, 1998, Militer kembali ke Barak sebuah Studi Komparatif, Yogyakarta, Pt. Tiara Waca Yogya.
- Markus Zahnd, 1999 Pembangunan Kota Secara Terpadu, Semarang, Soegijapranata University Press.
- Mas'ood Mochtar dkk, 1982 Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- McCallum, B. 1984. The Public Service Manager: An Introduction to Personnel Management in Australia Public Service. Australia: Longman, Cheshire.
- Mishra, Satis. 2003. Desentralisasi di Indonesia: Beberapa Pemikiran Dasar. Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jakarta, 20 Maret 2003.
- Moenir, H. A. S. 2006. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.

- Partowidagdo, Widjajono. 2004. Mengenal Pembangunan dan Analisis Kebijakan. Bandung: Program Pascasarjana Studi Pembangunan, Institut Teknologi Bandung.
- Paragon, Wall, 1998, Membangun Supermasi Sipil Lewat Multi Partai, Jakarta, Misaka Galisa.
- Patarai, Idris, 2006. Pembangunan Berkarakter, Mengubah yang Semu Menjadi Nyata. Makassar: Hasanuddin University Press.
- Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, Jakarta: Universitas Indonesia
- Prakarsa, 2010. Inovasi Sosial Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.
- Prasojo dkk. 2006. Kinerja Pelayanan Publik. Jakarta Timur: YAPPIKA.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pelayanan Publik.
- Pallawa, Andhy dan A. Asfat Azis (Editor). 2003. Pembauran di Makassar: Agenda yang Tertinggal. Makassar: Global.
- Ravidar Kumar, 2009, “Trends in Urban Growth and Objectives of Sound Planning”, <http://townplanninglectures.blogspot.com/2009>; wikipedia/Lewis Mumford; Parsudi
- Ravidar Kumar, 2009, “Trends in Urban Growth and Objectives of Sound Planning”, <http://townplanninglectures.blogspot.com/2009>; wikipedia/Lewis Mumford; Parsudi
- Riggs, Fred W. 1964. Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Riggs, Fred N., "Agraria and industria - towards a typology of comparative administration", dalam W. J. Siffin, Ed. Toward the Comparative Study of Public Administration, Bloomington, Indiana University Press, 1957.
- Sukatanya, Yudistira dan Gunawan Monoharto (Editor). 2000. Makassar Doeloe Makassar Kini – Makassar Nanti. Makassar: Yayasan Losari.
- Suny, Ismail, 1983, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, 1983, Yogyakarta Aksara Baru.

Scott, Foresman and Company; dan Arnold Toynbee, 2006 (1976), Sejarah Umat Manusia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sutiyo, 2007, Megapolitan, Jakarta: Elex-Media/Gramedia.

Seers, Dudley; The Meaning of Development, bagian dari The Meaning of Development; Dalam International development Review Vol.11, No.4; 1969

World Bank. 2000. Concept of Fiscal Decentralization and Worldwide Overview.

Yamin, Muhammad, 1982, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia,

Yunus, 2005, Megapolitan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=9491>

http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Pemberantasan_Korupsi

CURICULUM VITAE

IDENTITAS PRIBADI

Nama : H. MUHAMMAD IDRIS PATARAI
Tempat/tgl.lahir : Sidrap,31 Desember 1957
Agama : Islam
AlamatRumah : Jl. Kintamani No 45 Bukit Baruga, Antang - Makassar

IDENTITAS KELUARGA

ISTRI

Nama : Hj. Sarminaliah
Tempat/Tgl. lahir : Ujung Pandang, 24 Juli 1965
Agama : Islam

ANAK

1. Nama : ThathmainnulQulubMallageni
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 21 September 1992
2. Nama : Muhammad IshlahManessa
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 2 Mei 1994
3. Nama : TabayyunPasinringi
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 22 April 1996

BAPAK DAN IBU KANDUNG

NamaBapak/TempatTanggalLahir :Made K./Tanru Tedong Tahun 1925
Purnawirawan TNI-AD - Nrp. : 293106
NamaIbu/TempatTanggalLahir : Berlian/Tahun 1930

BAPAK DAN IBU MERTUA

NamaBapak/TempatTanggalLahir : JeppuManessa/Tahun 1930

Pensiunan Karyawan PT. Semen Tonasa

Nama/Tempat/Tanggal Lahir : Sitti Dg. Tino/Tahun 1932

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : Tahun 1969 Watampone
2. SMP : Tahun 1974 Watampone
3. SMU : Tahun 1977 Watampone
4. S1 : Fakultas Sospol UNHAS Makassar Tahun 1986
5. S2 : Jurusan Administrasi Pembangunan
UNHAS Makassar Tahun 2001
6. S3 : Jurusan Administrasi Publik
Universitas Negeri Makassar 2010s

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staf Biro Bina Spiritual Setda Sul-Sel Tahun 1988
2. Kasubag Pelayanan dan Bantuan Sosial
Biro Bina Sosial Setda Sul.Sel. Tahun 1991
3. Staf Tata Usaha Dinas Pendapatan Daerah
Tk. II Kabupaten Bone Tahun 1992 -2001
4. Kasubag Pengaduan Masyarakat Bagian
Kehumasan Sekretariat DPRD Prov. SulSel Tahun 2001 - 2004
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2004 - 2008
6. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar Tahun 2008 - 2009
7. Kepala Bappeda Kota Makassar Tahun 2009 - 2012
8. Kepala BPM Kota Makassar Tahun 2012 – 2012

RIWAYAT ORGANISASI

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Organisasi Intra Sekolah (ketua) | Tahun 1972 - 1977 |
| 2. DewanKerjaCabangGerakanPramuka Kab. Bone | Tahun 1975 - 1976 |
| 3. DPD AMPI Tk. I Sul-Sel | Tahun 1985 - 1990 |
| 4. DPD KNPI Tk. I Sul-Sel | Tahun 1980 - 1995 |
| 5. PD. XIX FKPPi Sul-Sel | Tahun 1991 - 1994 |
| 6. DPD Golkar Tk. II Bone | Tahun 1992 - 1997 |
| 7. DPD Golkar Tk. I Sul Sel | Tahun 1999 - 2004 |
| 8. Dekopinda Kota Makassar | Tahun 2010- 2015 |
| 9. ICMI Se Indonesia Organisasi Wil.Sul-Sel | Tahun 2011- 2016 |
| 10. IKM Sidenreng Rappang | Tahun 2010-2015 |
| 11. Ikatan Penerbit Sulawesi Selatan | Tahun 2012-2017 |

RIWAYAT KURSUS DAN PELATIHAN

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. LatihanPendidikankependudukan | Tahun 1991 di Ujung Pandang |
| 2. LatihanPendidikanJurnalistik | Tahun 1991 di Ujung Pandang |
| 3. Penataran P-4 PolaCalonPenatar(Manggala BP 7) | Tahun 1994 di Jakarta |
| 4. DiklatPerencanaanPendidikan | Tahun 1989 di Ujung Pandang |
| 5. PenataranKewaspadaanNasional | Tahun 1991 di Jakarta |
| 6. PenataranHukum Tata Usaha Negara | Tahun 1991 di Ujung Pandang |
| 7. DiklatAdministrasiPemerintahan | Tahun 1992 di Ujung Pandang |
| 8. OrientasiPelaksanaanTugas DPRD | Tahun 1992 di Makassar |
| 9. OrientasiPemerintahan di Daerah | Tahun 1992 di Wajo |
| 10. DiklatManajemenPelayanan Prima | Tahun 2001 di Makassar |
| 11. DiklatPimpinan Tk. IV/ ADUM/SEPADA/SEPALA | Tahun 2002 di Makassar |
| 12. DiklatPimpinan Tk. III SPAMA/SPADYA | Tahun 2003 di Makassar |

13. Diklat Penyusunan Renstradan Lakip Tahun 2003 di Makassar
14. Diklat Manajemen Sumber Daya Tahun 2004 di Makassar
15. Managing Changes Developing Tahun 2004 di Makassar.
16. Training of Leadership in Local Government: Decision, Action, Result (Dare) Conduct by: Lee KuanYuw School of Public Policy and World Bank Institute, 22 Mei-22 Juni 2010.
17. Training Programme for Local Government Officials by Northern Illinois University – USA 17 June – 1 July 2011.
18. Wastewater Treatment Management in Bangkok Thailand 07 – 12 August 2011.
19. Mengikuti The 9th Biennial Conference of Asian Association of Psychology yang berlangsung di Kunming China, mulai tanggal 28 s/d 31 July 2011.
20. Diklat Pimpinan Tk.II / Tahun 2011 di Makassar
21. Training Effective Urban Infrastructure Programme –dan Mayor & Exekutive Roundtable - Cities Development Initiatives for Asia (CDI), tanggal 11 s/d 20 Januari 2012.

PIAGAM PENGHARGAAN

1. Piagam penghargaan Knpi, Sebagai Peserta Pendidikan Dan Latihan Kader Jurnalistik Pemuda Se Indonesia Bagian Timur. Tahun 1984
2. Piagam Penghargaan dari Kepala BP-7 Pusat sebagai Peserta Penataran P-4 Pola Calon Penatar Tahun 1984.
3. Piagam penghargaan departemen Perindustrian Dan Perdagangan, Sebagai Peserta Seminar Pemasyarakatan Uu No. 32/1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Tahun 1998
4. Piagam Penghargaan Menteri Negara Pemuda Dan Olahraga, Sebagai Peserta Penataran Kewaspadaan Nasional Bagi Pemuda Angkatan VII. Tahun 1991
5. Piagam Penghargaan dan Satya Lencana Pengabdian 15 tahun dari Presiden RI. Tahun 2003
6. Piagam Penghargaan Satya Lencana Pengabdian 20 tahun dari Presiden RI Tahun 2008

TULISAN YANG PERNAH DIPUBLIKASIKAN:

Buku:

1. Arung Palakka Pembebas Tanah Bone (2003);
2. Potensi Diri PNS: Tantangan dan Pengembangan (2004);

3. Reorganisasi Kebijakan Pelayanan Publik – Suatu Tinjauan Strategis Membangun Makassar dari Dalam (2005):
4. Posisi Koperasi Sekunder dalam Pembinaan Koperasi Primer - Suatu Tinjauan Pembinaan Puskud Hasanuddin terhadap Anggotanya (2000);
5. Pembangunan Berkarakter (2006);
6. Prestasi Makassar (2007).
7. Ombudsman Kota Makassar, Pengalaman Membangun Ombudsman Daerah (2008)
8. Restorasi Indonesia ; Membangun Demokrasi Etik dan Politik Solidaritas (2010)
9. TOA-YA ri MANGKASARA (2010)
10. Kota Dunia Makassar (2010)
11. Dari Makassar Menggugat (2011).
12. Dan Lain Lain

PERJAJANAN KE LUAR NEGERI DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

1. Mewakilipemuda Indonesia dalam Program Pertukaran Pemuda di Jepang, The Friendship Programme Indonesia – Japan 21th Century, Tahun 1986.
2. Safari Investor ke Thailand dan Taiwan, The Mission Investment Taiwan and Thailand, Tahun 1997.
3. Pertemuan International Conference on Eco Cities and Workshop for Esat Asia Pilot Eco Cities, October 21-23, 2010, in Yokohama, Japan.
4. World City Summit and Singapore International Water Week by Lee Kuan Yew Enterprise 04-08 Juli 2011.

Pengalaman Kerja:

1. Direktur Umum Puskud Hasanuddin, 1997 - 2000
2. Pimpinan Redaksi Majalah Mimbar Aspirasi DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, 2002-2004.
3. Anggota DPRD Tingkat II Bone 1992 - 1997

Pengabdian Masyarakat:

1. Mengasistensi Penyusunan Renstra DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone dan Kota Palopo (2002).
2. Senantiasa membawa materi pada Diklat Penjurusan dan Diklat Prajabatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur dan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

3. Manggala BP-7 Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar (1984-1991)
4. Pemakalah dan moderator dalam berbagai seminar.
5. Mengajar pada berbagai perguruan tinggi swasta di Makassar.
6. Mendorong Teraksananya Delegasi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar ke Camat (2007)
7. Tim Perumus Kebijakan Penerapan Pakta Integritas Pemerintah Kota (2007)
8. Mengadvokasi Pendirian Ombudsman Daerah Kota Makassar dan menjadi Sekretaris Tim Rekrutmen Komisioner Ombudsman Daerah Kota Makassar (2008)
9. Pengadvokasi Pendirian Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Makassar (LPI) kerjasama Transparency International Indonesia dan menjadi Ketua Tim Rekrutmen Komisioner LPI (2010)
10. Mengadvokasi terbentuknya Tim CSR dan PKBL Pemerintah Kota Makassar (2010)
11. Tergabung dalam (Center for Regional Economic Research (CORNER) melakukan Penelitian Peningkatan Kapasitas Kinerja Pelayanan Publik Pemerintah Kota Makassar.
12. Ketua Pembangunan Masjid Hijratul Qadri 2003 – 2010
13. Pengurus PHBI Kelurahan Antang 2004 – 2014

OBSESI DALAM PEMERINTAHAN KOTA MAKASSAR 2013 – 2018

Penerapan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK)

- Epektifitas Pelayanan Perizinan yg terjangkau dan berorientasi investmen
- Penerapan Tunjangan Kinerja Daerah
- Pembentukan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)
- Publik assesmen APBD yang epektif dan akuntabel
- Pakta Integritas PNS/Pejabat Struktural
- Pengelolaan Manajemen Kepegawaian berdasarkan kinerja dan terdesentralisasi secara berjenjang
- Penerapan manajemen stratejik dalam pelayanan publik melalui Sasaran Kinerja Pegawai
- Epektifitas pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- Adanya Standar Operasional dan Prosedur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Melanggengkan kebijakan/regulasi dan kelembagaan best practices penyelenggaraan pemerintahan yang baik melalui regulasi Perda
- Pelebagaan assesment dan evaluasi kinerja yang melibatkan OMS dan stakeholder
- Membangun Makassar sebagai Kota yang layak dihuni dan berkelanjutan (Liveable and Sustainable)
- Membangun Strategi Pemerintahan Koalisi Masyarakat Sipil, stakeholder dan Jaringan International.

Makassar, 2012

H. M. IDRIS PATARAI

Esai-Esai Politik Reformasi

© Muhammad Idris Patarai Cetakan Pertama, Oktober 2012

Desain Sampul/Lay Out,

Festa M.F. Goenawan - Friska Monita Goenawan

Diterbitkan oleh:

De La Macca

(Anggota IKAPI Sulsel No.007 /SSL/03)

Jln. Borong raya No. 75 A Lt. 2 Makassar 90222 Telp. 0411-2410294-0811468957

Email : gunmonoharto@yahoo.com

Hak cipta dilindungi oleh Undang- Undang.

Dilarang mengutip isi buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan Penerbit.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

159 + xii halaman.

ISBN : 978 979 3897 57 8